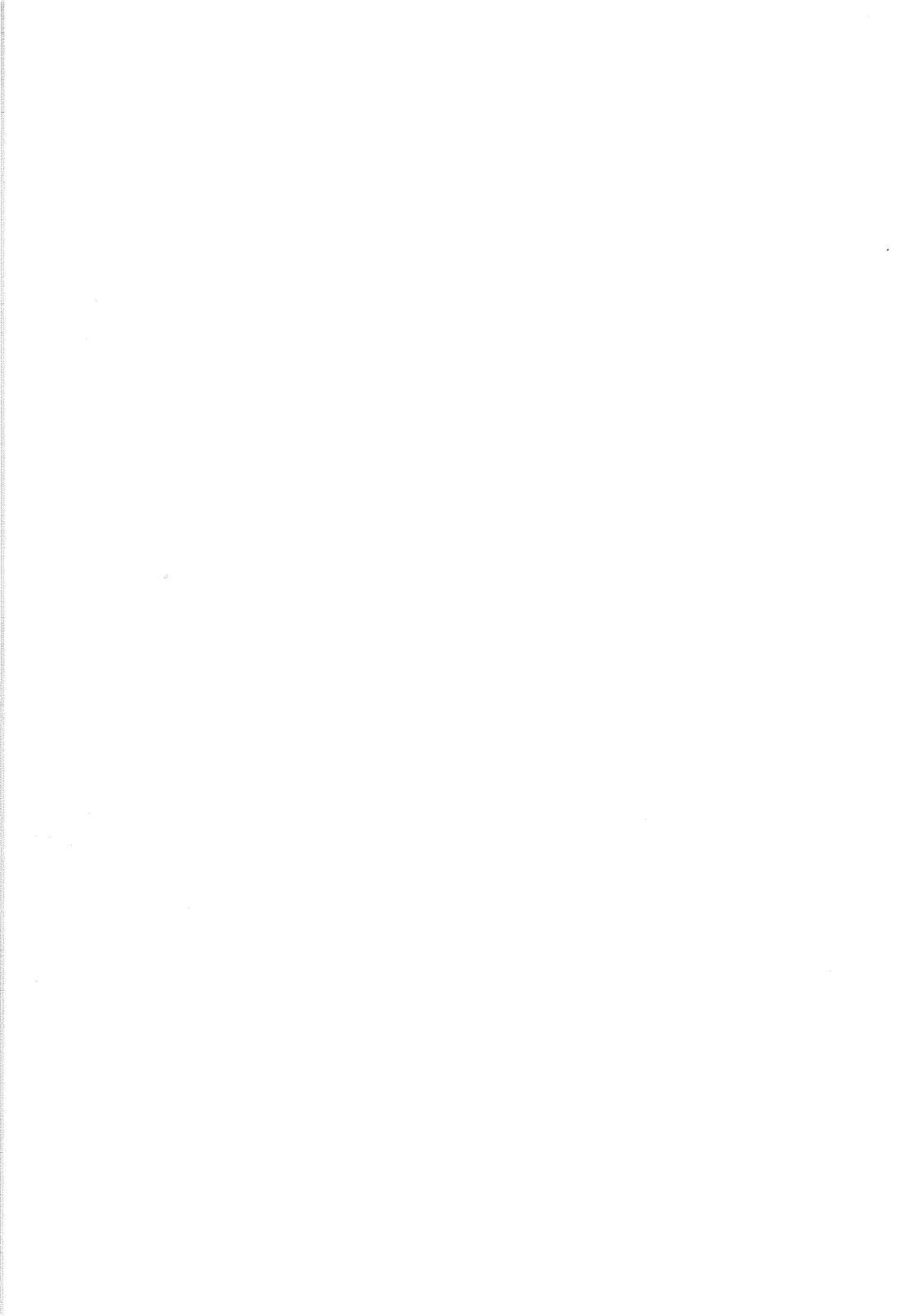


# **HUBUNGAN ANTAR ETNIK DI INDONESIA :**

**KASUS DI TANGERANG, BEKASI, BANDUNG, SEMARANG DAN SURABAYA**



PMB - LIPI

# HUBUNGAN ANTAR ETNIK DI INDONESIA :

## KASUS DI TANGERANG, BEKASI, BANDUNG, SEMARANG DAN SURABAYA

*Hayaruddin Siagian (Editor)*

*Abdul Rachman Patji*

*Rochmawati*

*Soewarsono*



Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
(PMB - LIPI)  
Jakarta, 2000



# KATA PENGANTAR

Konflik dan kerusuhan massal yang merebak di Indonesia sejak 4 tahun terakhir ini telah membuat banyak pihak merasa sangat prihatin. Tidak hanya karena konflik dan kerusuhan tersebut memakan korban jiwa dan harta benda tetapi juga karena konflik dan kerusuhan tersebut mulai makin dirasakan akan membahayakan sendi-sendi negara kesatuan Indonesia, yang telah lama ditegakkan dengan susah payah, dengan cucuran darah dan keringat.

Pada saat yang sama, ada keprihatinan yang mendalam di kalangan ilmuan dan pengamat sosial budaya karena ketidak mampuan mereka memberikan penjelasan atau jawaban yang memuaskan ketika banyak warga masyarakat menoleh ke arah mereka untuk mendapatkan jawaban tentang sebab-sebab peristiwa tersebut. Sebagian dari mereka menyadari bahwa peristiwa-peristiwa tersebut hanya dapat dijelaskan jika ada pengetahuan yang mendalam dan baik tentang masyarakat di mana konflik dan kerusuhan itu terjadi. Sayangnya pengetahuan semacam itulah, yang kini sangat langka. Berbagai perubahan sosial budaya yang berlangsung di depan mata nampaknya tidak pernah diketahui secara mendalam dan teliti sehingga pengetahuan tentang mekanisme dan proses perubahan yang terjadi juga tidak pernah memadai.

Pengetahuan tentang berbagai macam konflik yang terjadi yang diperoleh bukan dari lapangan, tetapi dari majalah, surat kabar, berita televisi dan radio telah mendorong para pengamat memberikan penjelasan, yang seringkali tidak memperjelas permasalahan tetapi malah mengaburkannya. Misalnya dalam penjelasannya adanya dugaan bahwa perbedaan latar belakang etnik dan agama merupakan faktor-faktor yang dianggap telah menyebabkan terjadinya konflik dan kerusuhan.

Dengan penelitian yang dilakukan oleh Tim Penelitian tentang Hubungan Antar Etnik dan Konflik Sosial di Indonesia di daerah sekitar

perkotaan di Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang dan Surabaya nampak bahwa perbedaan latar belakang etnik dan agama pada dasarnya bukan merupakan penyebab konflik. Konflik terjadi sebagai akibat fungsi persaingan dalam penguasaan sumber-sumber daya tertentu yang terbatas sifatnya atau merupakan fungsi dari pembagian kerja yang didasarkan pada spesialisasi dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu menganggap perbedaan etnik sebagai faktor pemicu konflik komunal pada dasarnya mencerminkan ketidakpahaman tentang fenomena etnisitas itu sendiri serta keterkaitannya dengan kondisi dan situasi sosial budaya masyarakatnya.

Meskipun demikian, sumbangan pemikiran dari berbagai kalangan terutama ilmuwan masih diharapkan untuk penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Mudah-mudahan buku ini mendapat perhatian khususnya dalam memahami interaksi sosial antar etnik di Indonesia. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berpartisipasi terhadap pelaksanaan penelitian ini.

Jakarta, Desember 2000

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI

Ttd.

**Dr. Riwanto Tirtosudarmo**

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> Oleh Tim Peneliti	1
<b>BAB II      HUBUNGAN ETNIK BATAK DENGAN SUNDA DI KOTA BANDUNG</b> Oleh Hayaruddin Siagian	10
<b>BAB III     ORANG BIMA DI CIKUPA TANGERANG: STUDI HUBUNGAN ANTAR ETNIK DAN KONFLIK SOSIAL</b> Oleh Abdul Rachman Patji	28
<b>BAB III     MASYARAKAT BETAWI SEBAGAI PENDUDUK ASLI DI BEKASI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENDATANG</b> Oleh Rochmawati	66
<b>BAB IV      MASYARAKAT ARAB SEMARANG DALAM HUBUNGAN ANTAR ETNIK DAN KONFLIK SOSIAL</b> Oleh Abdul Rachman Patji & Hayaruddin Siagian	90
<b>BAB V      ETNIS (ITAS) URBAN SURABAYA: ORANG MADURA DI KAMPUNG-KAMPUNG KELURAHAN SIDODADI, KECAMATAN SIMOKERTO</b> Oleh Soewarsono	115



# BAB I

## PENDAHULUAN

Oleh Tim Peneliti

### LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagaimana diketahui Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai penduduk multi etnik. Berdasarkan hukum adatnya diperkirakan Indonesia memiliki 366 etnik atau suku bangsa, yang distribusinya sebagai berikut: 49 suku bangsa di Sumatera, 7 suku bangsa di Jawa, 73 suku bangsa di Kalimantan, 117 suku bangsa di Sulawesi, 30 suku bangsa di Nusatenggara, 49 suku bangsa di Maluku dan sekitar 49 suku bangsa di Irian atau Papua (Sukanto dan Taneko, 1985; 23). Selain itu masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang bermigrasi ke Indonesia sejak awal abad ke 19, yaitu etnik Cina, Arab dan India.

Kenyataan ini menjadi perhatian bapak pendiri negara ini. Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan bahwa dasar negara yang akan dibentuk adalah negara kebangsaan, yang mengacu kepada pemikiran Ernest Renan, yang disampaikan pada kuliah umumnya yang berjudul *Qu'est qu'une nation?* di Universitas Sarbone, Paris tahun 1882.

Dalam sidang tersebut ditetapkanlah bahwa negara Indonesia didirikan atas adanya kesatuan solidaritas, yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setiakawan antara satu dengan lainnya, yang tercipta oleh perasaan pengorbanan di masa lampau (Ernest Renan, 1882; 3-6). Kemudian pemikiran tersebut diundangkan dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yang mencantumkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Akan tetapi dalam perkembangannya nampaknya pemahaman seluruh warga negara tentang heterogenitas etnik ini dan isi konstitusi

tersebut tidak lah sama. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peristiwa yang terjadi, menelan banyak korban materi dan jiwa. Peristiwa tahun 1998 diwarnai oleh anti etnik Cina, kemudian pada tahun 1999 hingga sekarang berkembang peristiwa-peristiwa yang bernuansa agama dan etnik, seperti Ketapang, Kupang, Sambas, Cipayung, Yogyakarta, Mataram, Ambon dan Poso. Kita juga telah menyaksikan bahwa kasus Ambon masih terus bergolak.

Jadi serangkaian kerusuhan itu dengan jelas memperlihatkan bahwa ada upaya-upaya untuk mempersoalkan perbedaan latar belakang etnik dan agama dalam masyarakat kita yang multi kultural. Dari berbagai media massa diperoleh informasi bahwa peristiwa tersebut meletus karena adanya upaya beberapa oknum atau provokator. Diduga di balik berbagai aksi tersebut adalah adanya kepentingan-kepentingan yang hendak diwujudkan (Dicky Lopulalan, dkk, 2000; 20-21).

Temuan di atas akan adanya rekayasa atau peranan para provokator sangat menarik. Tetapi ia akan berperan baik apabila konteks sosialnya telah cukup matang untuk diprovokasi. Sebab secara teoritis masyarakat adalah sebuah jaringan sosial dari berbagai pasangan situasi konflik. Jaringan yang saling berkaitan inilah yang menyebabkan perbedaan dalam aspek tertentu tidak secara linier menampilkan wujud konflik. Dalam hal ini Taufik Abdullah menyatakan bahwa perbedaan etnik dan agama membuat seseorang dalam situasi konflik, tetapi persamaan tingkat pendidikan, status ekonomi, gaya hidup memperkecil kemungkinan situasi konflik itu diaktualisasikan menjadi konflik terbuka. Misalnya, di satu sisi perbedaan status ekonomi adalah salah satu sumber konflik tetapi di sisi lainnya kesamaan agama, kampung halaman, kepertaian dapat meredam konflik menjadi terbuka. Konflik menjadi terbuka dan terwujud secara fisik karena affinitas antara situasi konflik telah terjadi. Jika perbedaan status ekonomi sangat dirasakan sebagai sumber ketidakadilan maka ikatan seagama dan sekampung tidak berfungsi (Tim Peneliti PMB, 1999; 21).

Seiring dengan itu hasil penelitian Tim Peneliti PMB tahun 1999 atas lima kota Bandar Lampung, Tangerang, Bekasi, Bandung, Solo dan

Surabaya menunjukkan bahwa meletusnya konflik sosial tersebut dipengaruhi oleh adanya prasangka atau stereotype etnik tertentu terhadap etnik lainnya terutama karena perlakuan atau kebijakan pemerintah yang berkuasa cenderung diskriminatif (Tim Peneliti PMB-LIPI, 2000). Itu berarti bahwa kebijakan diskriminatif itu menjadi salah satu sumber prasangka yang membuat masyarakat merasa tidak puas. Sudah tentu kondisi demikian apabila tersosialisasi secara baik dan meluas akan mempermudah provokator menyulut meletusnya amok massa.

Jika dilihat dari corak dan bentuk manifestasi konflik sosial yang terjadi perlu dipertanyakan mengapa hanya dilokasi tertentu faktor tersebut ditampilkan sebagai unsur disintegratif yang mengancam integrasi sosial. Atau dengan kata lain mengapa masyarakat di lokasi tertentu dapat mengelakkan disintegrasi sosial atau konflik sosial yang mengesankan. Oleh karena hal tersebut di atas maka penelitian tahun 2000 ini masih dilanjutkan dengan fokus perhatian pada kota atau lokasi yang berpenduduk heterogen yang dapat mengelakkan terjadinya konflik sosial yang bersifat terbuka. Informasi demikian sangat diperlukan dalam upaya mencari komponen-komponen bangsa yang potensial guna mewujudkan masyarakat madani (*civil society*); masyarakat yang beroperasi dengan landasan moral dan etika serta menjunjung supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia.

## PERMASALAHAN

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa hubungan antar etnik di Indonesia mempunyai dimensi yang amat kompleks. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang menjadi sumber integrasi dan disintegrasi antar etnik, bagaimana hubungan antar etnik itu berlangsung, apakah bentuk dan wujud manifestasi interaksi antar etnik berlangsung diwarnai oleh faktor ekonomi, politik, psikologis, religiusitas dan biologis. Selain itu perlu juga dipertanyakan bagaimanakah peranan elit lokal, pemerintah pusat dan lokal dalam menciptakan interaksi antar etnik yang serasi.

## TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi interaksi sosial yang terjadi dalam aktivitas sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik di daerah Bandung, Bekasi, Tangerang, Semarang dan Surabaya. Selain itu juga untuk menggali kemungkinan-kemungkinan adanya jaringan dari bawah, yang memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat seperti kelompok keagamaan, kelompok etnik maupun kelompok sosial politik untuk membina relasi-relasi sosial ekonomi dan politik. Dengan demikian akan tumbuh upaya saling memahami dan berkembang suasana solidaritas sosial serta membuka peluang kerjasama secara maksimal. Peluang sosial budaya yang tumbuh dari bawah seperti itu dapat menjadi basis yang kokoh untuk mengembangkan relasi yang harmonis. Model sosial budaya demikian akan dapat menghindari berkembangnya watak diskriminatif, sentimen ras, keagamaan ataupun golongan dan prasangka negatif terhadap kelompok lainnya.

## KERANGKA TEORITIS

Kunci utama hubungan antar etnik adalah interaksi suatu etnik dengan etnik lainnya. Konsekwensi interaksi itu dapat bersifat negatif atau positif. Interaksi yang bersifat negatif misalnya adalah berupa konflik yang dapat menjurus ke arah disintegrasi sosial. Sebaliknya, interaksi yang bersifat positif, misalnya adalah kerjasama yang menjurus ke arah integrasi sosial. Dalam perkembangannya bentuk interaksi itu dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama faktor objektif, yaitu tingkat pendidikan, agama, kultur dan status sosial ekonomi, dan kedua faktor subjektif ialah perasaan dan persepsi seseorang yang berasal dari suatu etnik terhadap etnik lainnya. Artinya interaksi sosial atau interaksi antar etnik adalah hasil proses objektifikasi dan subjektifikasi (Berger dan Luckman, 1990; 10).

Hubungan antar etnik dan konflik sosial itu dapat dipahami melalui proses keseharian mereka baik pada level kolektif maupun individual. Seiring dengan itu, Mely G. Tan (1995) menyatakan bahwa hubungan antar etnik harus dilihat sebagai hubungan kekuasaan dan sering sebagai hubungan antar kelas ekonomi. Itu berarti bahwa hubungan antar etnik di Indonesia cenderung dipengaruhi faktor penguasa dan kesenjangan ekonomi. Hal ini dapat dipahami mengingat transformasi sosial, ekonomi dan politik dalam lima puluh tahun terakhir, terutama selama Orba telah memberikan peluang yang sangat besar bagi terjadinya konsolidasi ekonomi kelompok-kelompok tertentu yang berakibat makin parahnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat (Faruk, dkk, 1999; 30).

Timbulnya konflik disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan di antara etnik. Ada pihak yang merasa dikalahkan dan tertekan dan sebaliknya pihak lainnya merasa dimenangkan. Yang merasa dikalahkan mencari jalan keluarnya dengan cara halus (protes) maupun kekerasan seperti melakukan pengrusakan, pertikaian dan permusuhan (Parsudi Suparlan, 1999; 9). Perbedaan kepentingan tersebut biasanya meliputi masalah struktural seperti legitimasi penguasa, keamanan dan geografi etnik, masalah politik seperti diskriminasi institusi politik dan elit politik, masalah sosial ekonomi seperti diskriminasi sistem ekonomi dan modernisasi dan pembangunan, masalah kultural/persepsi seperti pola diskriminasi kultural dan persepsi terhadap eksistensi etnik (Michael E. Brown, 1997; 5).

## DEFINISI OPERASIONAL

Penelitian ini menggunakan beberapa batasan operasional untuk memudahkan kegiatan penelitian. Hubungan antar etnik diartikan sebagai interaksi etnik tertentu dengan etnik lainnya, yang menjadi warga/penduduk di daerah penelitian di Cikupa(Tangerang), Cicaheum(Bandung), Jaka Mulya(Bekasi), Dadapsari(Semarang), dan Sidodadi (Surabaya).

Sedangkan etnik ialah kelompok yang memiliki ikatan asal-usul dan budaya sebagai produk evolusi dalam kondisi yang relatif terisolasi (HP. Fairchild, 1967). Selain itu konflik adalah pertentangan karena adanya perbedaan kepentingan.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang melihat apakah interaksi antar etnik bersifat negatif atau positif. Apakah hubungan antar etnik tersebut dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat individual atau kolektif. Bagaimanakah persepsi pemerintah, elit lokal dan tokoh-tokoh orsosmas dan orsospol terhadap heterogenitas etnik.

### 2. Populasi.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berusia 20-60 tahun yang berperan sebagai tokoh masyarakat, birokrasi, tenaga pengajar, mahasiswa yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang luas mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan masalah etnik.

### 3. Sampel.

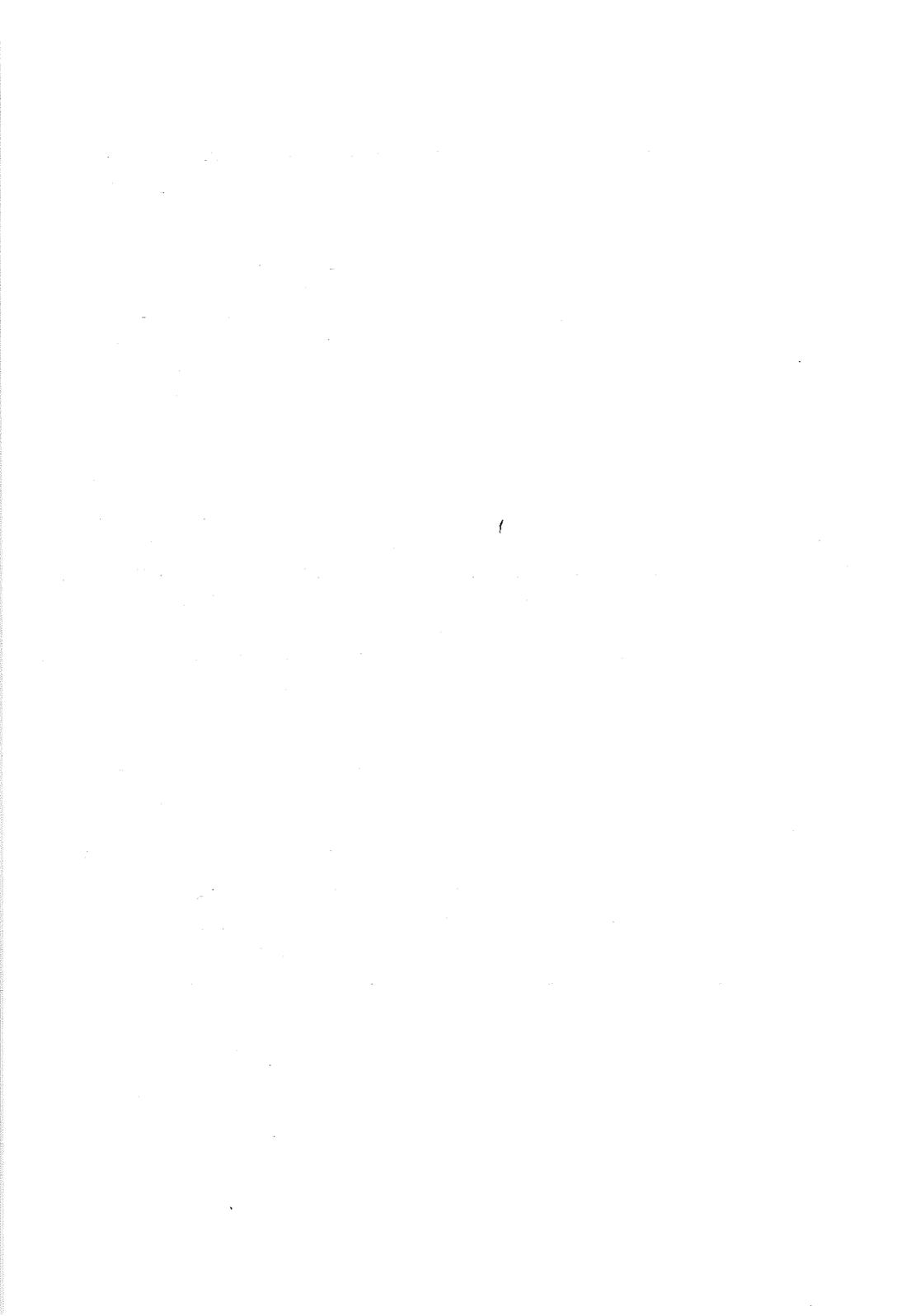
Teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Caranya, mendatangi instansi-instansi seperti Kelurahan, Kecamatan, Kepolisian, Rt/RW, perguruan tinggi dan rumah-rumah penduduk. Apabila di antara mereka tergolong sebagai tokoh dan memahami perkembangan hubungan antar etnik maka mereka akan dijadikan sebagai nara sumber. Jumlah sampel yang akan digunakan sebesar 30 orang per lokasi dan mewakili setiap etnis yang ada di daerah penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder melalui penelusuran literatur, hasil-hasil penelitian dan dokumentasi. Selain itu menggunakan data primer melalui nara sumber dengan melakukan wawancara mendalam. Yang terakhir pengumpulan data dengan observasi lapangan. Pengamatan langsung dan penelitian dilakukan selama 16 hari dalam bulan Juli atau Agustus 2000.

#### 5. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di lima lokasi kota; satu lokasi dalam satu kota Bandung, Bekasi, Tangerang, Semarang dan Surabaya. Lokasi penelitian berada di daerah kompleks perumahan yang mempunyai penduduk heterogen. Komplek perumahan yang dimaksud adalah komplek yang didiami oleh berbagai etnik dengan bergagai jenis pekerjaan. Pemilihan lokasi ini berhubungan dengan perkiraan bahwa interaksi antar etnik akan berlangsung dan interaksi mereka akan berkaitan dengan berbagai kepentingan. Sifat dan manifestasi interaksi mereka pun akan dipengaruhi oleh kepentingan itu. Selain itu pemilihan lokasi ini juga berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya berada di daerah-daerah heterogen.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Brown E, Michael, Cs (eds.), 1997: *Nationalism and Ethnic Conflict*, Cambridge, The MIT Press.
- Berger, Peter & Luckman, Thoman 1999: *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Jakarta, LP3S.
- Dicky Lopulalan, dkk. (editor) 2000: *Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial*, Jakarta, LP3S.
- Faruk, dkk. (editor) 1999: *Hasil Penelitian Tentang Hubungan Antar Etnis dan Antar Iman di Kalangan Mahasiswa di Yogyakarta. Pengalaman, Kesaksian dan Refleksi Kehidupan Mahasiswa di Yogyakarta*, Jakarta.
- Fairchild, HP. (editor) 1967: *Dictionary of Sociology*, New Jersey, Adam & Co.
- Mely G. Tan, 1995: *Hubungan Mayoritas-Minoritas Dalam Masyarakat Majemuk: Suatu Masalah Integrasi Sosial*, Jakarta, Proyek Pengkajian Dinamika Sosial Budaya Dalam Proses Industrialisasi-LIPI.
- Parsudi Suparlan, 1999: *Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya*, dalam *Jurnal Antropologi Indonesia* 23 (59); 1-19.
- Renan, Ernest, 1961: *Qu'est qu'une nation?* (Apakah Nasion itu), Jakarta, Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1974: *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta.
- Stanley Prasetyo, 1999: *Rasisme dan Rasialisme: Antara Keilmuan dan Stereotip Sosial Yang Salah Kaprah*, dalam *Dari Keseragaman Mejuju Keberagaman: Wacana Multikultural Dalam Media*, Jakarta, LP3S.

Sukanto dan Taneko, 1985: *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta.

Tim Peneliti PMB, 1999: *Pemecahan Masalah Hubungan Antar Etnis: Etnisitas dan Konflik Sosial*, Seri Penelitian PMB-LIPI, 05/1999.

Tim Peneliti PMB, 2000: *Etnisitas dan Integrasi di Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*, Seri Penelitian PMB-LIPI, 05/2000.

## **BAB II**

# **HUBUNGAN ETNIK BATAK DENGAN SUNDA DI KOTA BANDUNG**

Oleh Hayaruddin Siagian

Keragaman etnisitas masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang harus dianggap sebagai peristiwa historis dan ideologi, yang telah diikrarkan oleh pendiri negara ini dalam Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Penolakan terhadap keragaman etnik ini akan membuat terjadinya disintegrasi bangsa Indonesia. Meskipun demikian, perjalanan sejarah bangsa ini sering diwarnai oleh berbagai peristiwa yang mengancam integrasi nasional. Pemahaman tentang makna keragaman ini mengalami pasang surut. Di beberapa daerah perkotaan di tanah air, keragaman ini diperalat dan dipolitisir menjadi ajang kerusuhan, yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian sangat besar baik secara fisik maupun material, terutama sejak bulan Mei 1998.

Salah satu kota yang terhindar dari kerusuhan adalah kota Bandung. Pada hal sebelumnya kota ini sering di landa berbagai peristiwa yang sarat dengan persoalan Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA). Para pengamat ilmu sosial menyatakan bahwa kota Bandung dahulu lain dengan kota Bandung sekarang. Artinya perkembangan pemahaman masyarakat kota ini tentang persatuan nasional makin terintegrasi. Oleh karena itu perlu ditelusuri faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dinamika masyarakatnya. Apakah dalam kehidupan masyarakat telah berkembang toleransi antar etnik. Apakah masyarakatnya telah berintegrasi secara social atau mempunyai daya resistance terhadap berbagai upaya yang bersifat disintegratif.

Aspek-aspek tersebut di atas lah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Sebab berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di daerah-daerah kerusuhan di kota-kota lainnya di tanah air, seperti Jakarta, Ambon, Kalimantan Barat dan Mataram menunjukkan bahwa: (1) terjadinya kerusuhan disebabkan oleh adanya ketidak harmonisan interaksi antar etnik, terutama antara pendatang dengan penduduk lokal dalam kehidupan bermasyarakat,(2) lokasi kerusuhan berada di sentra-sentra bisnis dan(3) pelaku kerusuhan di lapangan berasal dari daerah kumuh.

Seiring dengan itu penelitian ini dilakukan di kelurahan Cicaheum,kecamatan Kiaracandong kota Bandung. Memang harus diakui bahwa pemilihan kelurahan ini tidak dimaksudkan untuk representasi seluruh kelurahan di kota Bandung. Yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi ini adalah kharakteristiknya, seperti lokasinya berada di daerah perkotaan padat penduduk dan heterogenitas warga masyarakatnya. Selain itu kondisi lokasi penelitian ini hampir sama dengan kota-kota yang mengalami kerusuhan di tanah air, terutama dari segi latar belakang kehidupan social budaya dan sosial ekonomi masyarakatnya.

Pusat perhatian penelitian ini ialah hubungan antar orang Batak yang merupakan etnik pendatang dengan orang Sunda yaitu etnik lokal di daerah ini. Tujuan dan ruang lingkup studi adalah upaya menelaah berlangsungnya proses hubungan antar kedua etnik. Potensi apakah yang menjadi pendorong dan yang menjadi kendala terhadap kelangsungan hubungan kedua etnik tersebut.

## **KEADAAN Sosial Budaya**

Kecamatan Kiaracandong adalah salah satu kecamatan dari 22 kecamatan di kota Bandung. Daerah ini dikenal sebagai gerbang masuk maupun gerbang keluar kota Bandung. Dari daerah ini lah warga dari sebagian besar kota-kota tingkat II propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah,

Yogyakarta dan Jawa Timur masuk dan keluar kota Bandung. Di daerah ini terdapat terminal bus luar kota, dalam kota dan stasiun kereta api.

Di Kiaracondong terdapat juga bermacam-macam industri menengah atau pabrik dan industri kecil atau rumah tangga, mulai dari industri tekstil, konveksi, minuman, tahu, tempe, anyam-anyaman sampai obat-obatan. Selain itu juga terdapat pusat pertokoan (di sekitar Jl. A. Yani dan Jl. Supratman) dan pasar tradisional yang dibangun oleh pemerintah daerah. Adanya fasilitas transportasi, industri dan pusat pertokoan itulah yang menjadi daya tarik (full factor) utama bagi banyak pendatang dari berbagai daerah lainnya di Indonesia datang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah kecamatan Kiaracondong khususnya dan kota Bandung pada umumnya.

Dengan penelitian lapangan yang dilakukan dapat diketahui bahwa warga masyarakat daerah Kiaracondong terdiri dari etnik Sunda dan pendatang dengan latar belakang etnik atau suku bangsa Aceh, Batak, Minangkabau, Palembang, Lampung, Jawa, Madura, Banjar, Manado, Ambon, Bugis, Flores, Irian dan etnik keturunan Cina, Arab, Keling dan Eropa. Heterogenitas etnik ini menurut informasi beberapa warga masyarakat Sunda telah berlangsung lama, yaitu diperkirakan sejak menjelang tahun 1950-an. Pada saat itu pendatang (kecuali etnik keturunan) datang ke Bandung sebagian untuk bersekolah dan yang lainnya karena pindah tugas. Sebelumnya ciri sosial budaya masyarakat Kiaracondong didominasi oleh petani dan masih bersifat homogen, yaitu etnik Sunda.

Akan tetapi sejak tahun 1970-an sebagian besar pendatang masuk ke daerah ini untuk merantau, yaitu datang untuk bekerja baik sebagai buruh pabrik, guru, pedagang, tentara, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, sopir, pengusaha maupun pekerja di sektor jasa. Dalam perkembangannya lambat laun lahan pertanian beralih fungsi menjadi proyek pembangunan seperti perumahan, perkantoran, pertokoan dan pendidikan. Etnik Sunda pun secara perlahan masuk dalam jaringan sektor modern seperti bekerja sebagai pedagang dan pegawai kantor.

Dalam pada itu pula nampak adanya perkembangan baru dalam kehidupan sosial antar etnik. Makin lama berkembang perkumpula-perkumpulan atau paguyuban tanpa mempersoalkan latar belakang etnik. Perkawinan campuran pun makin berkembang.

Dengan demikian keadaan struktur sosial masyarakat di Kiaracandong pada saat ini merupakan hasil suatu perubahan yang diakibatkan oleh program pembangunan. Perubahan struktur sosial tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan, di antaranya timbulnya kesadaran kebersamaan yang dijiwai semangat keindonesiaan. Mereka cenderung beranggapan bahwa latar belakang dan identitas kebudayaan masing-masing etnik bukan ajang untuk konflik dan permusuhan.

## KELURAHAN CICAHEUM DAN PENDUDUKNYA

Cicaheum adalah salah satu dari 6 kelurahan di wilayah kecamatan Kiaracandong, kota Bandung. Kelurahan ini didirikan pada tahun 1992. Pada bulan Agustus 2000, kelurahan Cicaheum berpenduduk sebanyak 2930 Kepala Keluarga(KK) atau 12.706 jiwa, yang terdiri dari 5.729 laki-laki dan 6.977 perempuan. Kini kelurahan ini melingkupi 75 Rukun Tetangga(RT) atau 12 Rukun Warga(RW). Jumlah KK pada masing-masing RT hampir merata antara 34-38 KK.

Luas wilayah kelurahan ini ialah 87 Ha. Sedangkan batas wilayah kelurahan Cicaheum ialah sebagai berikut:

- Sebelah Utara ialah kelurahan Padasuka
- Sebelah Selatan ialah kelurahan Babakan Surabaya
- Sebelah Barat ialah kelurahan Babakan Surabaya
- Sebelah Timur ialah kelurahan Antapani

Seluruh lahan di daerah ini diperuntukkan untuk pemukiman, pertokoan, perkantoran, sarana pasar dan sarana transportasi.

Penduduk Cicaheum dapat dibedakan menurut etnik, yakni Sunda sebesar 39%, Jawa sebesar 30%, Batak sebesar 17%, Cina sebesar 8% dan lainnya (Minangkabau, Ambon, Manado, Makassar, Flores) 3%. Pada umumnya lokasi tempat tinggal mereka telah membur antara suatu etnik dengan etnik lainnya. Artinya, lokasi pemukiman yang bersifat eksklusif secara etnik tidak ditemukan di daerah kelurahan Cicaheum.

Meskipun jumlah penduduk etnik Sunda cukup besar, akan tetapi bukan berarti bahwa mereka seluruhnya penduduk asli daerah Cicaheum. Penduduk aslinya hanya berkisar 9%. Jadi yang lainnya sebanyak 30% adalah etnik Sunda yang berasal dari daerah-daerah diluar kota Bandung.

Dari segi mata pencaharian, penduduk daerah ini bekerja pada berbagai sektor modern atau sektor jasa.

**Tabel No.1**  
**Penduduk Menurut Status Atau Pekerjaan**

No.	Status/pekerjaan	Jumlah	%
1	Pegawai negeri sipil/ABRI	1982	33,3
2	Pegawai swasta	2375	40,0
3	Perbankan	11	0,2
4	Perdagangan(warung, kios, toko)	492	8,3
5	Transportasi(pemilik becak,ojek,oplet)	708	12,0
6	Pelayanan hukum	3	0,04
7	Jasa keterampilan	223	3,7
8	Jasa persewaan	157	2,4
9	Pemulung	4	0,03
<b>J u m l a h</b>		5951	100,00

Sumber: Profil Desa/Kelurahan Cicaheum Tahun 1999

Dengan table di atas nampak bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor swasta sebesar 39%, sedangkan yang bekerja sebagai wiraswasta atau usaha sendiri ialah sebesar 24,5%. Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja di administrasi pemerintahan/ABRI jauh lebih sedikit, hanya sebesar 36,5%, dibandingkan dengan yang bekerja di swasta dan wiraswasta. Artinya jumlah penduduk yang menggantungkan penghasilan kepada pihak pemerintah relatif sedikit.

Meski pun demikian di daerah ini masih terdapat jumlah pengangguran yang relatif cukup besar. Sebagian kecil pengangguran ini merupakan tenaga kerja baru karena putus sekolah dan pendatang dari luar daerah. Sedangkan sebagian besar timbul karena beberapa perusahaan tekstil dan konveksi gulung tika akibat krisis moneter yang berkepanjangan dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

**Tabel No. 2**  
**Penduduk menurut angkatan kerja**

No.	Angkatan kerja	Jumlah	%
1.	Penduduk usia kerja yang bekerja	5951	74,5
2.	Penduduk usia kerja yang belum bekerja	2030	25,5
Jumlah		7981	100,0

Sumber: Profil Desa/Kelurahan Cicaheum Tahun 1999

Menurut beberapa tokoh masyarakat, besarnya tingkat pengangguran ini mempunyai persoalan tersendiri bagi daerah ini. Mereka mengkhawatirkan akan timbulnya persoalan baru yang dapat mengganggu kenyamanan dan kerukunan antar warga apabila tidak mendapat pemecahan di kemudian hari.

Kekhawatiran ini dapat saja terjadi apabila ditelusuri peristiwa-peristiwa kerusuhan yang terjadi di tanah air sejak tahun 1997.

Kerusuhan itu berkembang dari masalah ekonomi ke arah masalah SARA dan pelakunya di lapangan pun pada umumnya adalah pengangguran, yang dibayar dan diprovokasi oleh oknum-oknum tertentu yang menginginkan adanya disintegrasi dan destabilisasi bangsa Indonesia.

Jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan penganggur tersebut nampak bahwa mereka adalah angkatan kerja yang berpendidikan SD-SLTA. Sedangkan penduduk yang berpendidikan akademi dan universitas tidak satu pun yang menjadi penganggur.

**Tabel No. 3**  
**Kualitas Angkatan Kerja Menurut Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	%
1.	Tidak tamat SD	400	5,0
2.	Tamat SD	1597	20,0
3.	Tamat SLTP	1895	23,6
4.	Tamat SLTA	2593	32,4
5.	Tamat Akademi(D1-D3)	415	5,2
6.	Sarjana		
	a. S1	127	1,5
	b. S2	100	1,2
	c. S3	94	1,1
<b>J u m l a h</b>		7981	100.0

## SEJARAH KEDATANGAN ORANG BATAK

Secara historis kedatangan orang Batak ke daerah Bandung dapat dibagi dalam tiga periode. Pertama, sebelum Indonesia merdeka, orang Batak datang untuk bersekolah atau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi seperti ITB. Kedua, kebijakan pemerintah pada awal kemerdekaan, yaitu adanya mutasi tempat pekerjaan terutama bagi tentara/ABRI. Pada saat itu, sebagian tentara Bukit Barisan didatangkan untuk bergabung dengan Komando Daerah Militer(Kodam)Siliwangi,

demikian juga halnya dengan tentara Siliwangi dikirim ke Sumatera Utara untuk bergabung dengan Kodam Bukit Barisan. Ketiga, sejak menjelang tahun 1950-an, orang Batak datang ke daerah ini selain untuk melanjutkan sekolah juga untuk mencari pekerjaan pada instansi pemerintah dan swasta.

Dalam pada itu sekitar tahun 1956 sebagian dari mereka, sebanyak 5 KK bermukim di daerah Cicaheum dan berbaaur dengan penduduk asli Sunda dan pendatang lainnya yang berasal dari berbagai daerah lainnya di tanah air, seperti Jawa, Madura, Minangkabau, Makassar, Manado dan Ambon. Pada saat itu rumah-rumah penduduk masih jarang dan sebagian besar lahan di daerah Cicaheum masih berupa pesawahan dan kebon. Mereka memilih daerah ini karena jaraknya dengan lokasi tempat kerjanya dan dengan pusat kota(Alun-Alun) mudah dijangkau. Waktu yang digunakan dari rumah ke kantor atau ke Alun-Alun cukup dengan 15 menit dengan kendaraan umum, seperti sadu atau andong dan becak.

Kemudian sejak awal tahun 1970-an, jumlah orang Batak yang bermukim di daerah Cicaheum makin meningkat. Hal ini terjadi diduga karena sebagai berikut: pertama, putra/putri pendatang pertama tersebut di atas, yang sudah berkeluarga bermukim di daerah ini. Kedua, demikian juga halnya dengan mereka yang telah selesai melanjutkan pendidikan memilih bermukim di daerah ini karena dekat dengan tempat pekerjaannya di perusahaan-perusahaan atau industri-industri skala menengah di daerah Cicaheum dan skala besar, seperti tekstil di daerah sebelah Timur wilayah Cicaheum. Ketiga, adanya pendatang baru atau pemukim baru, yang datang dari daerah asal terutama dari berbagai kecamatan di daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Mereka yang terakhir ini pada umumnya adalah bujangan atau belum berkeluarga dengan pendidikan akhir Sekolah Menengah Umum(SMU)seperti SMA dan Sekolah Kejuruan seperti STM dan SMEA. Di samping itu sebagian dari mereka telah mempunyai keterampilan seperti montir, supir dan pembukuan. Menurut informasi, pada saat pertama sampai di kota Bandung mereka tinggal sementara

dengan keluarga dan kenalan. Setelah bekerja atau mendapat penghasilan, mereka pindah dan tinggal di rumah kontrakan atau kost milik orang-orang Sunda didaerah Cicaheum. Mereka memilih daerah ini karena lokasi pekerjaannya sebagai pegawai perusahaan swasta dan pemerintah, pedagang, tambal ban, perbengkelan dan supir berada di sekitar daerah Cicaheum.

Kini pada saat penelitian lapangan ini dilakukan, jumlah orang Batak yang bermukim di wilayah Cicaheum telah mencapai 17%(712) dengan 118 KK. Sebagian besar mereka telah memiliki rumah sendiri dan dan sebagian di antaranya telah mempunyai beberapa rumah kontrakan.

Meskipun jumlah mereka cukup besar, tetapi pemukimannya tidak bersifat eksklusif. Di daerah ini tidak ditemukan lokasi pemukiman atau perumahan yang bercirikan Batak seperti kampung Batak. Pemukiman mereka berbaur dengan pemukiman warga lainnya dari berbagai etnik.

Apabila dihitung secara rata-rata maka setiap RT di kelurahan Cicaheum dihuni oleh 3 KK orang Batak. Selain itu jika dibandingkan dengan jumlah etnik lainnya yang menjadi penduduk kelurahan Cicaheum maka etnik Batak menduduki urutan ketiga setelah etnik Sunda dan Jawa.

## Aspek-Aspek HUBUNGAN ANTAR Etnik

Terjadinya suatu interaksi sosial diawali dengan adanya kontak fisik. Kemudian kontak ini berkembang ke arah komunikasi yang berbentuk kerja sama di satu pihak dan permusuhan di pihak lainnya. Bentuk komunikasi itu dipengaruhi oleh substansinya, yaitu kepentingan-kepentingan yang terlibat di dalamnya. Jika kepentingan-kepentingan masing-masing bertemu dan saling mengisi maka akan terbentuk suatu kondisi kerjasama. Sebaliknya jika kepentingan itu bertentangan maka akan terbentuk kondisi konflik atau permusuhan. Jadi ringkasnya, adanya kepentingan yang hendak dicapai oleh individu-individu atau kelompok-

kelompok etnik demi eksistensi hidupnya akan menciptakan interaksi sosial atau hubungan sosial.

Akan tetapi apabila interaksi antar individu, misalnya antara pedagang dengan konsumen lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan individual maka dalam hubungan antar etnik prosesnya akan lebih banyak berkaitan dengan latar belakang sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik masyarakatnya. Misalnya interaksi antara pedagang, seorang Sunda dengan pembeli, seorang Batak dapat dianggap sebagai bersifat individual. Mereka melakukan tawar-menawar, kemudian tercapai suatu harga yang disepakati bersama. Namun jika hubungan itu dipandang dari segi sosial budaya maka interaksi kedua etnik tersebut dikenal sebagai representasi etnik Sunda dengan etnik Batak.

Dengan demikian interaksi antar etnik adalah suatu bentuk interaksi sosial yang di dalam prosesnya individu atau kelompok yang berinteraksi selain mewakili kepentingan dirinya, juga berkaitan dengan misi atau kepentingan kelompoknya dan masyarakatnya secara bersamaan.

## Aspek Ekonomi

Dinamika kehidupan perekonomian masyarakat Cicaheum dipengaruhi oleh sektor modern, yaitu jasa administrasi pemerintahan dan jasa industri dan perdagangan. Demikian pula bagi warga pendatang seperti orang Batak. Alasan orang Batak bermukim di daerah Cicaheum dimotivasi oleh faktor kedekatannya dengan tempat mereka bekerja seperti perusahaan-perusahaan industri, instansi-instansi pemerintah, pusat perdagangan dan pasar tradisional. Selain itu faktor lainnya yang mempengaruhinya ialah harga rumah atau lahan untuk perumahan dan ongkos/sewa rumah kontrakan relatif murah dibandingkan dengan daerah lainnya.

Berbeda dengan etnik lainnya, terutama etnik Sunda, dalam memilih bidang pekerjaan nampaknya orang Batak cenderung tidak memilah-milahnya. Bagi mereka yang penting dapat menghasilkan uang

dengan cara terhormat. Pendapat ini dibenarkan oleh beberapa nara sumber dari etnik Sunda(UJ, CS dan K). Dalam pandangannya orang Batak dapat bekerja di bawah terik matahari dan melakukan pekerjaan kasar seperti kernet. Malah mereka menyatakan bahwa orang Batak pada umumnya adalah pekerja keras dan suka menabung. Selain itu mereka mudah beradaptasi dan pandai menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat setempat.

Sikap inilah yang menjadi salah satu modal bagi orang Batak sehingga mudah memperoleh informasi dari kenalannya dan tetangganya terutama etnik Sunda dan Jawa tentang lowongan pekerjaan di berbagai kegiatan. Misalnya beberapa nara sumber orang Batak(MS,PM dan SS) yang bekerja sebagai karyawan perusahaan industri Yamatex, sejak tahun 1982 menyatakan bahwa informasi tentang lowongan pekerjaan mereka peroleh dari tetangganya etnik Sunda dan Jawa. Mereka pun mengemukakan pengalamannya dan pengalaman teman-temannya etnik Batak di daerah Cicaheum bahwa orang Batak memperoleh pekerjaan di berbagai sektor kegiatan lebih banyak karena adanya relasi yang baik dengan kenalan dan tetangga etnik Sunda dan Jawa.

**Tabel No. 4**  
**Orang Batak Menurut Status Pekerjaannya**

No	Status pekerjaan	Jumlah	%
1.	PNS/ABRI	8	7,20
2.	Pegawai Swasta	18	16,20
3.	Perbankan	3	2,70
4.	Perdagangan: Warung	7	6,30
	Kios	8	7,20
	Toko	3	2,70
5.	Jasa keterampilan (tam-ban, perbengkelan dan leveransir)	25	22,50
6.	Jasa transportasi (supir, kernet dan montir)	28	6,20
	Pensiunan PNS/ABRI		
Jumlah		118	100,00

Dengan tabel di atas nampak bahwa sebagian besar, sebanyak 56,9%(61) orang Batak bekerja di lapangan atau berhubungan langsung dengan warga masyarakat. Salah satu hal yang menarik ialah konsumen atau pemberi kerja kepada mereka berasal dari berbagai etnik, diantaranya etnik Sunda, Jawa dan Cina. Ketika ditanyakan kepada seorang etnik Sunda(W) yang menjadi konsumen perbengkelan orang Batak, mengapa lebih suka

Berlangganan dengan orang Batak? Jawabnya harganya lebih murah dan kualitas pekerjaannya lebih baik dari yang lainnya. Pemilik bengkel tersebut (PM) pun mengakui bahwa harga yang dikenakan kepada konsumennya relatif murah karena mereka membeli barang-barang yang diperlukan langsung dari pabrik atau grosir besar dengan harga pabrik. Mereka memperoleh untung tidak terlalu banyak, tetapi usaha tetap lancar.

Itu berarti bahwa mereka berinteraksi dengan warga dari berbagai etnik karena adanya perasaan saling menguntungkan secara ekonomi. Jadi agak berbeda dengan mereka, orang Batak yang bekerja di kantor atau perusahaan industri/pabrik berinteraksi dengan etnik Sunda, Jawa dan etnik lainnya hanya karena adanya hubungan kerja yang telah diatur secara formal.

Dalam kenyataannya hubungan antara wiraswasta dengan konsumen atau langganan ini sering berkembang ke arah suasana keakraban; dalam waktu senggangnya mereka sering bertemu secara informal dan membicarakan tentang berbagai hal diantaranya pengalaman dan adat-istiadat masing-masing. Biasanya hubungan demikian berlanjut ke arah kunjung- mengunjung antar keluarga dan saling bantu-membantu apabila salah seorang di antara mereka menghadapi kesulitan, termasuk kesulitan ekonomi.

Atas keuletan dan kerja kerasnya, sebagian besar, sebanyak 72% (85) orang Batak di daerah Cicaheum ini telah memiliki rumah sendiri dan di antaranya sebesar 22% (19KK) telah mampu menyekolahkan putra-

putrinya sampai di perguruan tinggi. Selain itu terdapat sebesar 6%(5) mempunyai rumah kontrakan masing-masing mempunyai 6-10 rumah petak. Juga terdapat 4%(4) pengusaha transportasi masing-masing mempunyai 3-5 angkutan kota(Angkot).

Dalam menjalankan usaha seperti bidang perbengkelan, leveransir dan transportasi, mereka merekrut tenaga kerja dari berbagai etnik. Mereka tidak mempersoalkan latar belakang etnik, yang menjadi pertimbangan utama adalah keterampilan dan kejujuran. Salah seorang pengusaha leveransir(FM) menyatakan bahwa ia mempunyai 3 orang yang beretnik Sunda yang menjadi kepercayaannya. Mereka mendapat gaji dan imbalan lainnya yang pantas. Kelihatannya karyawan tersebut merasa puas dan senang. Ketika wawancara dilakukan dengan salah seorang karyawan tersebut diperoleh informasi bahwa bekerja dengan orang Batak seperti pimpinannya tersebut sangat menyenangkan karena konsisten, tegas, terus terang dan menghargai pendapat dan jerih payah. Ia tidak mempersoalkan bosnya dari segi latar belakang etnik.

Pendapat yang sama dengan sang karyawan tersebut di atas juga diperoleh dari 4 orang kepala rumah tangga(I, W, E dan CS) yang beretnik Sunda, yang menjadi penghuni rumah kontrakan RS dan PH. Mereka menyatakan bahwa dalam memilih rumah kontrakan tidak mempersoalkan siapa pemiliknya dan dari mana asal usulnya. Yang menjadi pertimbangan adalah ongkos sewanya murah, lingkungannya aman, dekat dengan tempat kerja dan pemiliknya ramah. Selanjutnya mereka menyatakan kebetulan rumah bapak RS dan PH sesuai dengan seleranya sehingga mereka menempatinnya.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa perbedaan latar belakang, terutama asal usul etnik tidak menjadi penghalang bagi terciptanya interaksi sosial ekonomi antara orang Batak dengan orang Sunda di daerah Cicaheum. Faktor sosial ekonomi di daerah ini dapat melintasi perbedaan latar belakang dan menjadi sarana terciptanya hubungan atau interaksi timbal balik antara etnik Batak dengan etnik Sunda yang saling menguntungkan.

## Aspirasi politik dan ADMINISTRASI Rt/Rw

Tingkah laku politik masyarakat Cicaheum berkaitan dengan kehidupan politik nasional dan lokal. Pada setiap pemilihan umum masyarakat ikut serta baik dalam kampanye maupun dalam menyampaikan hak pilihnya. Pada masa pemerintahan parlementer dan Soekarno, mayoritas warganya menjadi pendukung PNI. Pada masa pemerintahan regim Soeharto, mayoritas warga menjadi pendukung Golkar, sedangkan yang lainnya menjadi pendukung PPP dan PDI.

Selanjutnya pada pemilu yang baru lalu tahun 1999, warga menjadi pendukung 15 partai politik. Tiga partai terbesar di antaranya adalah PDIP dengan perolehan suara sebesar 61%, Golkar dengan perolehan suara sebesar 28% dan PPP dengan perolehan suara sebesar 11%.

Perubahan tingkah laku pemilih pada pemilu 1999 berkaitan dengan makin berkembangnya kebebasan menyampaikan aspirasi politik dan adanya *image* yang bersifat negatif terhadap kepemimpinan Soeharto dan Golkar. Menurut seorang tokoh masyarakat AS dari etnik Sunda, Soeharto dan Golkar menerapkan dan mengembangkan kebijakan kolusi, korupsi dan nepotisme(KKN). Akibatnya Indonesia mengalami krisis baik secara ekonomi maupun politik(desintegrasi nasional). Meningkatnya jumlah pemilih PDIP diduga karena warga beranggapan bahwa PDIP akan menampung aspirasinya dalam membangun bangsa Indonesia.

Menurut nara sumber EW etnik Sunda, pemilu tahun 1999 berbeda dengan pemilu sebelumnya terutama dalam substansi kampanye partai-partai peserta pemilu. Dalam kampanye pemilu yang baru lalu hampir tidak terdengar lagi materi kampanye yang mengandung SARA. Suasana kampanye lebih bertanggung jawab dan nyaman. Dengan perkataan lain, hampir seluruh partai menyampaikan kampanyenya yang berisi pemberantasan KKN, keadilan, penegakan hukum dan meningkatkan rasa kebangsaan.

Dalam perolehan suara ternyata PDIP lah yang meraih suara terbanyak. Menurut nara sumber tersebut, pemilihnya mayoritas etnik Batak, Sunda dan Jawa. Diperkirakan alasan mereka adalah bahwa PDIP lebih nasionalis dan merupakan representasi dari mantan Presiden Soekarno. Bagi mereka PDIP lah yang terbaik, yang dapat menyalurkan aspirasi mereka.

Selain itu keunggulan PDIP tersebut juga diduga dipengaruhi oleh struktur kepengurusan PDIP baik pada tingkat kecamatan Cicaheum, tingkat II kota Bandung maupun pada tingkat I propinsi Jawa Barat. Dalam struktur organisasinya, personalia atau kepengurusan pada ketiga tingkatan tersebut terdiri dari berbagai etnik, terutama Sunda, Jawa dan Batak. Sudah tentu model kepengurusan demikian menjadi salah satu daya tarik bagi pemilih karena mencerminkan adanya rasa kebersamaan tanpa membeda-bedakan latar belakang warga.

Tingkat kedewasaan warga Cicaheum tentang berbangsa dan bernegara pun nampaknya makin baik. Hal ini dapat dirasakan bahwa setelah pemilu tahun 1999 permusuhan atau konflik antar kader partai-partai politik peserta pemilu belum pernah terjadi. Malah yang berkembang adalah hubungan mereka satu dengan yang lainnya berjalan baik. Jadi dapat dikemukakan bahwa aspirasi politik warga Cicaheum: "kebersamaan dan kesejukan" dapat menciptakan hubungan antar etnik berkembang baik. Oleh karena itu model demikian hendaknya dipelihara dan dikembangkan agar perbedaan latar belakang etnik tidak mengarah kepada konflik dan pertikaian yang dapat meluluh-lantakkan integrasi nasional.

## Aspek Kekerabatan

Perbedaan etnik di daerah ini nampaknya tidak menjadi penghalang terhadap berlangsungnya interaksi antar warga dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan mereka cenderung dipengaruhi oleh aktivitas yang berhubungan dengan mata pencahariannya. Max Weber menyatakan kelompok masyarakat demikian lebih terikat kepada

diprensiasi, masing-masing warga disibukkan oleh pekerjaannya(Mustafa O. Attir, eds:182).

Jadi kekerabatan secara etnik di daerah ini sangat longgar. Yang banyak ditemukan adalah kekerabatan antar etnik. Menurut salah seorang nara sumber, A yang beretnik Sunda kekerabatan antar etnik di daerah ini telah berlangsung sejak tiga dasawarsa yang lalu. Kekerabatan tersebut terbentuk melalui perkawinan campur. Misalnya suami etnik Batak, isteri etnik Sunda, atau etnik Jawa dan sebaliknya. Model rumah tangga demikian sudah tidak asing lagi di daerah ini. Ketika ditanyakan kepada salah seorang suami orang Batak MS(51tahun) dan isterinya orang Sunda T(42 tahun), apakah orang tua/keluarga masing-masing merestui perkawinan mereka? Sang suami menjawab bahwa pada awalnya keluarganya kurang mendukung tetapi setelah diberikan pengertian akhirnya mereka merestuinnya dengan menyatakan silahkan tetapi anak orang dan keluarganya jangan dikecewakan. Sebaliknya sang isteri menyatakan bahwa orang tuanya pada awalnya menolak bukan karena perbedaan etnik melainkan karena perbedaan agama.

Persoalan ini sempat menghambat perkawinan mereka selama kurang lebih 3 tahun. Akhirnya direstui setelah orang tuanya merasakan bahwa calon suaminya bersikap baik dan simpati, juga karena telah diberi pengertian oleh seorang kerabatnya, yang kebetulan telah banyak bergaul dengan keluarga orang Batak. Sejak itu hubungan kekerabatan antara keluarga suami dengan keluarga isteri sangat akrab. Di antara mereka sering kunjung-mengunjungi dan saling bantu-membantu apabila menghadapi kesulitan.

Model kekerabatan demikian relatif banyak ditemukan di daerah ini. Itu berarti bahwa di daerah ini berlaku pepatah”tak kenal maka tak sayang”. Makin sering bertemu, berkomunikasi dan bertukar pikiran maka kemungkinan untuk makin akrab dan saling menyayangi makin besar, sebab dengan sendirinya akan timbul sikap saling memahami dan saling menghormati. Pada akhirnya perbedaan latar belakang terutama dari segi etnik dan kepercayaan bukan lagi sebagai ajang permusuhan tetapi malah menjadi alat perekat integrasi sosial secara alami.

Jadi salah satu kunci diterimanya orang Batak di daerah ini berkaitan juga dengan nilai-nilai kultur yang melekat pada mereka, yaitu daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungannya. Di perantauan mereka tidak eksklusif tetapi mereka berbaur dengan tetangga(Bungaran A. Simandjuntak, 1995; 35).



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bappeda Kotamadya Bandung, 1998: *Bandung Dalam Angka 1998*.
- Kelurahan Cicaheum, 1999: *Profil Desa/Kelurahan Cicaheum 1999*
- Mustafa O. Attir, eds; 1989: *Sosiologi Modernisasi: Telaah Kritis Tentang Teori, Riset dan Realitas*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Tim Penelitian PMB-LIPI, 2000: *Etnisitas dan Integrasi di Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*, PMB-LIPI, Jakarta.
- Simandjuntak A. Bungaran, 1995: *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*, Disertasi, UGM, Yogyakarta.



### **BAB III**

## **ORANG BIMA DI CIKUPA TANGERANG :**

# **STUDI HUBUNGAN ANTAR ETNIK DAN KONFLIK SOSIAL**

Oleh Abdul Rachman Patji

### **LATAR BELAKANG**

Orang-orang Bima yang daerah asalnya adalah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, baru mulai menetap pada tahun 1974 di wilayah Kecamatan Cikupa, Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, saat ini termasuk Propinsi Banten. Sebagai pelopor yang pertama kali datang di Cikupa adalah seorang bernama ZB. Ketika itu sudah mengantongi ijazah Sekolah PGA (Pendidikan Guru Agama) Islam. ZB meninggalkan kampung halamannya awal tahun 1970. Ketika masih di Bima ZB sudah diangkat sebagai pegawai negeri, tetapi dalam menekuni profesi sebagai guru di SR (Sekolah Rakyat) di pedalaman luar Jawa ketika itu, dinilainya kurang menjamin masa depan yang memadai. Oleh karena itulah ZB merantau ke pulau Jawa dan pertama-tama tinggal di wilayah Tanjung Priuk, Jakarta. Setelah mengerjakan bermacam-macam jenis pekerjaan di Jakarta, karena ada masalah dan, menurutnya, juga karena kurang puas dengan penghasilan yang diperoleh, akhirnya pindah ke Bitung, Cikupa, pada tahun 1974.

Sebenarnya, awalnya dia berniat merantau ke Sulawesi Selatan karena ada yayasan "Muhammadiyah" yang mau menjadi sponsor. Namun, ketika itu ada pula temannya yang pulang kampung dari Jakarta, bernama AG yang sarjana hukum mengajaknya. ZB mengikuti ajakan AG yang di Jakarta mengaku mengajar di beberapa sekolah sebagai honorer dan sudah memiliki percetakan stensil. Di Jakarta, ZB pertama kali ikut mengajar di SDI (Sekolah Dasar Islam) "Mathlaul Huda" di wilayah Jakarta Barat. Setelah itu dia menambah tempat mengajarnya di SD Al-Huda dan SMP Muhammadiyah, Tanjung Duren yang letaknya dekat Pasar Kopro masih di Jakarta Barat. Sambil mengajar ZB juga aktif

di organisasi Muhammadiyah Jakarta Barat, yang menurutnya sangat bermanfaat karena melalui keaktifan di situ bertambah banyak teman dan pengalaman. Pergaulannya pun bertambah luas dengan bermacam-macam orang, termasuk pula jenis pekerjaannya.

Pergaulan di Jakarta membuat ZB terlibat dalam pekerjaan yang lain, bahkan agak menyentuh perbuatan yang dianggap masyarakat umum "pemerasan harkat kemanusiaan". Menurut ZB, ketika itu dia beruntung mempunyai seorang teman (orang Banten) sangat akrab. Temannya inilah yang menyuruhnya untuk bertobat. Prosesnya, pertamanya temannya meminta dia berhenti mengajar, kemudian mengantarnya menemui seorang alim bernama Kyai Haji Chatib Gios di Tangerang. Atas anjuran pak Kyai, ZB disuruh ke Bitung, daerah antara Tangerang dan Cikupa, untuk dibimbing oleh salah satu santri pak Kyai sendiri. Dari sinilah kehidupannya mulai berubah, artinya ZB telah meninggalkan pekerjaan "pemerasan" tetapi sekaligus berhenti mengajar di beberapa perguruan agama.

Di Bitung, Cikupa, ZB mulai kembali bekerja sebagai karyawan perusahaan percetakan "Panca Simpati" sampai tanggal 23 Nopember 1977. Keluar dari perusahaan percetakan itu, dia bekerja di sebuah perusahaan meubel "PT Surya Mahkota Sumber Industri" di Jatake, Tangerang. Sementara bekerja di perusahaan meubel, karena beberapa masalah, terutama soal gaji yang kurang cukup, ZB juga melamar pekerjaan lain. Akhirnya, pindah pekerjaan lagi, diterima di "PT Cipta Terampil Makmur", pabrik sepatu khusus ekspor merek "Puma" di Cikupa. Di pabrik ini ZB bekerja sampai tahun 1995 karena perusahaannya bangkrut. Sesudah itu, ZB bekerja lagi di "PT Agrindo Maju Lestari", sebuah perusahaan yang bergerak di bidang peralatan pertanian.

Sukses ZB dapat bekerja di perusahaan industri di Cikupa tersebar luas beritanya di kampung halamannya. Oleh karena itu datang pula beberapa orang sekampungnya di Tangerang dengan tujuan mencari pekerjaan di perusahaan industri. Pada tahun 1976 datang seorang bernama MU yang sebelum sampai di Desa Talagasari, Cikupa, pernah

pula bekerja macam-macam di Jakarta. Di Cikupa MU punya pengalaman bekerja di beberapa perusahaan industri dan pada saat ini (tahun 2000) masih bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan industri meubel yang produksinya untuk ekspor. Kemudian pada tahun 1979, seorang bernama MA datang langsung di Talagasari, Cikupa; jadi tidak lagi merasakan kehidupan di Jakarta lebih dulu. Seperti yang lain, MA juga pertama-tama mencoba bekerja di beberapa perusahaan industri (seperti di PT Sydney Metal), namun karena alasan tidak kerasan dan mendambakan pekerjaan yang bisa memberikan jaminan pensiun, sehingga dengan modal ijazah SPG yang dimiliki MA mengajukan permohonan menjadi guru pada tahun 1980. Pada tanggal 23 April 1982, MA diangkat dan berprofesi sebagai guru SD sampai sekarang. Menurut MA, dirinya termasuk salah satu dari hanya empat orang "barang langka" di kalangan orang-orang Bima di Tangerang, maksudnya yang bekerja diluar bidang perusahaan industri. Dari seluruh orang Bima yang tinggal di Kabupaten Tangerang ada 2 orang menjadi guru SD, 1 orang guru SMP di Balaraja dan seorang lagi guru SMA di Tangerang.

Motivasi untuk bekerja di daerah Tangerang tidak berapa lama tidak hanya meliputi orang-orang sekampung ZB, tetapi juga sudah meluas ke kampung, desa, bahkan kecamatan lain di Bima. Gelombang perantauan orang Bima ke Tangerang terjadi sejak tahun 1980-an. Pada tahun 2000 orang Bima yang masuk ke Tangerang masih berjumlah rata-rata 30 orang setiap bulan. Itulah sebabnya orang-orang Bima yang bertempat tinggal di Tangerang semakin banyak. Di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, mereka tinggal di satu desa yang sama, yaitu Desa Talagasari. Bahkan salah satu RT (Rukun Tetangga) di desa tersebut, yaitu RT XIII, warganya mayoritas (menurut Ketua RT nya hampir 80%) orang Bima. Tinggal secara mengelompok menimbulkan "persepsi" sebagian penduduk bahwa orang Bima kurang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat setempat. Oleh karena setiap orang Bima yang masuk ke Kecamatan Cikupa memilih bertempat tinggal di Desa Talagasari menyebabkan sudah sekitar 30 % penduduk desa tersebut adalah orang Bima. Keadaan ini menimbulkan pengaruh yang signifikan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat desa tersebut.

Sekarang orang-orang Bima yang tinggal di Desa Talagasari, Cikupa, pada umumnya berasal dari 3 (tiga) wilayah kecamatan di Bima, yaitu Kecamatan Belo, Bolo dan Wera. Banyak orang Bima memilih daerah Tangerang sebagai tujuan untuk bekerja adalah karena beberapa faktor. Pertama, mencari orang seditaerah asal yang sama menjadi salah satu faktor mereka memilih wilayah Tangerang sebagai tujuan untuk bekerja. Kedua, Tangerang sudah dikenal luas di Bima sebagai daerah industri, bahkan "hubungan antar wilayah" (Tangerang dengan Bima) sudah dikembangkan melalui saling-kunjung aparat pemerintah dari kedua daerah. Saling kunjung itu digagas oleh organisasi-organisasi perantau Bima, seperti IKRA, IMB (Ikatan Masyarakat Bima). Ketiga, para perantau baru dari Bima tidak perlu memikirkan soal pemondokan apabila datang ke Tangerang karena untuk sementara mereka bisa tinggal di rumah atau pondokan orang Bima yang sudah lama dan lebih dulu menetap. Keempat, selain dari organisasi para perantau Bima, juga dari pemilik rumah atau pondokan informasi kerja di berbagai perusahaan industri di Kabupaten Tangerang dapat diperoleh. Kelima, tokoh-tokoh masyarakat Bima di Desa Talagasari, Cikupa, diberi "wewenang" oleh kepala desa setempat untuk mengurus langsung segala keperluan orang-orang Bima di desa tersebut. Jadi tidak melalui pengurus RW/RT.

Di Cikupa Tangerang, orang-orang Bima bukan satu-satunya kelompok etnik migran (perantau). Akibat daya tarik industri ada beberapa warga kelompok etnik yang tinggal di daerah itu, antara lain Aceh, Batak, Melayu, Minangkabau, Semendo, Lampung, Betawi, Jawa, Madura, Banjar, Manado, Bugis, Makassar dan Ambon serta etnik warga keturunan Cina, Arab dan Keling. Keadaan itu memperlihatkan bahwa di wilayah itu telah terjadi hubungan antar warga etnik sebagai suatu proses sosial yang harus dilalui oleh masyarakat mejemuk. Dibandingkan etnik lainnya, keberadaan etnik Bima mempunyai kekhususan sendiri yaitu selain jumlah warganya terbesar, juga meskipun sudah lebih 20 tahun berdiam di wilayah itu, ternyata pada tahun 1997 pernah terlibat "konflik" dengan warga masyarakat setempat. Peristiwa "konflik" itu akan menjadi bagian dari studi yang tidak hanya

menyangkut wujud dan substansinya, tetapi juga dalam kerangka suatu proses hubungan antar etnik secara lebih luas.

Fokus utama penelitian ialah hubungan antar orang Bima dengan warga masyarakat (khususnya masyarakat lokal). Tujuan dan ruang lingkup studi ialah menelaah kelangsungan suatu proses hubungan antar etnik, dinamika, perubahan dan kendala-kendalanya serta konflik yang pernah ada. Artinya penelitian ini adalah upaya untuk mencari jawaban atas beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana hubungan antar etnik itu sebagai suatu proses dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial budaya berbeda?. Adakah kendala atau rintangan yang menyebabkan proses itu berjalan lambat; atau sebaliknya kondisi apa yang mempercepat suatu proses penyesuaian (adaptasi) bagi pendatang dan proses penerimaan untuk masyarakat lokal ?. Mengapa dalam proses-proses sosial timbul konflik?. Bagaimana menyelesaikan konflik sosial yang terjadi?.

Ditetapkannya wilayah Kecamatan Cikupa sebagai lokasi penelitian didasarkan kepada informasi yang diperoleh ketika mengurus izin penelitian di Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang. Dasar pertimbangannya ialah jumlah terbesar kelompok pendatang orang Bima di wilayah Kabupaten Tangerang bertempat tinggal di kecamatan tersebut. Hubungan mereka dengan penduduk lokal selain sangat dinamis, dalam pengertian yang positif, seperti disinggung di atas ternyata pernah juga pernah "dinodai" oleh semacam konflik yang terjadi pada tahun 1997. Berkaitan dengan hal itu, sesuatu yang menarik pula dikemukakan adalah keberhasilan warga kelompok masyarakat dari kedua pihak menyelesaikan konflik, sehingga tidak meluas seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

## KEADAAN Sosial Budaya

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang. Kecamatan Cikupa adalah salah satu dari 19 kecamatan di kabupaten tersebut. Bersama-sama dengan kecamatan

Balaraja, Curug dan Tigaraksa, dikenal sebagai wilayah industri utama di kabupaten Tangerang. Di wilayah Kecamatan Cikupa terdapat 72 perusahaan industri (pabrik) yang mencakup 29 jenis usaha atau kegiatan, mulai dari perusahaan industri atau pabrik kerupuk dan batak sampai industri/pabrik tekstil dan obat-obatan. Adanya industri-industri itulah yang menjadi salah satu daya tarik (*full factor*) utama sehingga banyak pendatang (migran) dari berbagai daerah lain Indonesia datang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Cikupa khususnya dan di wilayah Kabupaten Tangerang pada umumnya. Pada tahun 2000, kantor Kecamatan Cikupa mencatat adanya 37.495 orang yang bekerja di 72 pabrik yang ada.

Sebagaimana sudah disinggung di depan selain orang Bima juga terdapat warga etnik lain yang berdiam di Cikupa. Adanya perusahaan industri yang tenaga kerjanya (terutama tenaga ahli) sebagian masih dipegang bangsa asing menyebabkan pula adanya penduduk warga negara asing (WNA) bertempat tinggal di Kecamatan Cikupa. Pada tahun 1998 jumlah mereka sebanyak 64 orang, terdiri atas 47 laki-laki dan 17 perempuan. Dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Tangerang, jumlah ini merupakan yang kedua terbesar setelah Kecamatan Ciputat yang penduduk WNA-nya berjumlah 386 orang. Fakta heterogenitas etnik dan penduduk tersebut baru mulai berkembang secara pesat setelah dibangun perusahaan-perusahaan industri di daerah tersebut pada tahun 1980-an. Sebelumnya wilayah Cikupa hanya merupakan daerah pertanian, ladang dan tegalan. Ketika itu mayoritas masyarakatnya masih menunjukkan ciri sosial-budaya yang bersifat lebih homogen, yaitu orang Sunda.

Dengan demikian keadaan struktur sosial masyarakat di Cikupa pada saat ini sudah merupakan hasil suatu proses perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan industri. Suatu proses modernisasi kehidupan juga masih sedang terjadi yang tentu saja misinya sekurang-kurangnya mempunyai perbedaan dengan keadaan masyarakat sebelum masuknya industri. Perubahan struktur sosial yang diakibatkan oleh industri adalah sesuatu yang baru bagi masyarakat lokal sehingga

memperlihatkan kecenderungan, antara lain terjadinya interaksi antara masyarakat lokal dan pendatang dari bermacam-macam daerah asal.

Lokasi penelitian adalah Desa Talagasari yang merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah Kecamatan Cikupa, Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang. Desa ini terletak sejauh 0,1 km dari ibukota kecamatan, 15 km dari ibukota kabupaten. Talagasari mempunyai luas wilayah 374 Ha, seluruhnya berupa dataran rendah yang cukup subur apabila diperuntukkan sebagai lahan pertanian, tanpa perbukitan dan pegunungan serta batas-batasnya adalah di sebelah utara Desa Sukaraja, di sebelah selatan Jalan Raya Serang, sebelah barat Desa Talaga dan sebelah timur Desa Pasirgadung. Menurut catatan mengenai kependudukan, pada tahun 1999, Desa Talagasari berpenduduk sebanyak 8.525 jiwa dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) 1.670. Penduduk sebanyak itu terdiri atas 4.075 laki-laki dan 4.450 perempuan.

Ada dua jenis pekerjaan, yaitu buruh industri perusahaan dan sektor pertanian tanaman pangan, yang banyak dilakukan oleh penduduk Desa Talagasari. Jumlah pekerja dari jumlah keseluruhan penduduk berdasarkan dua jenis pekerjaan yang ditangani menunjukkan 4.956 orang (sekitar 58%) bekerja di sektor swasta. Sektor swasta di sini terutama terkait dengan karyawan (buruh) di perusahaan industri dan pabrik-pabrik yang banyak terdapat di wilayah Kabupaten Tangerang. Sedangkan penduduk di sektor pertanian tanaman (pangan) tercatat hanya 100 orang (sekitar 1,2%) dari seluruh penduduk desa. Mereka terdiri atas petani pemilik tanah sawah 47 orang, petani pemilik tanah tegal/ladang 31 orang, penyewa/penggarap 32 orang.

Pekerjaan penduduk lainnya adalah yang berstatus pegawai negeri (PNS ditambah anggota ABRI) sebanyak 132 orang. Mereka terdiri atas pegawai desa, guru, mantri kesehatan dan perawat serta bidan dan anggota ABRI. Penduduk yang bergerak di sektor jasa dapat dirinci sebagai berikut, yaitu (1) jasa lembaga-lembaga keuangan (perbankan, perkreditan rakyat, pegadaian dan asuransi) sebanyak 9 orang; (2) jasa perdagangan (pasar desa/kelurahan, warung, kios dan toko) berjumlah

142 orang; (3) jasa penginapan (losmen, hotel, wisma, asrama/pondokan) 2 orang; (4) jasa komunikasi dan angkutan (angkutan tak bermotor, angkutan sepeda motor, mobil kendaraan umum, perahu/ketinting, angkutan laut, kapal motor laut, angkutan udara) sebanyak 113 orang; (5) jasa hiburan/tontonan (sandiwara, bioskop, pemutaran film keliling) 5 orang; (6) jasa keterampilan (tukang kayu, tukang batu, tukang jahit/bordir, tukang cukur) 47 orang; (7) jasa lainnya (listrik, gas, air, konstruksi, persewaan, dan lain sebagainya) sebanyak 25 orang.

## Aspek-aspek Hubungan Antar Etnik

Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa aspek yang menjadi sarana proses hubungan atau interaksi antar etnik di daerah penelitian. Dalam beberapa aspek perhatian yang lebih seksama ditujukan kepada proses interaksi antar orang Bima dan orang Sunda. Suatu interaksi terjadi karena adanya kepentingan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, tidak hanya disebabkan oleh adanya keperluan satu pihak. Jadi ketika kita sedang berjalan-jalan di suatu tempat kemudian seorang bertanya mengenai alamat yang dicari atau suatu peristiwa yang terjadi di suatu tempat, bukanlah suatu bentuk proses interaksi, tetapi hanya merupakan proses komunikasi biasa dan sifatnya insidental saja. Interaksi mempunyai arti dan makna lebih dalam bagi pihak-pihak yang terlibat serta didasari atas keinginan mencapai kebutuhan yang diinginkan dan memenuhi kepentingan yang didambakan oleh masing-masing pihak.

Suatu contoh proses interaksi yang sederhana dan sangat terbuka ialah hubungan antar pembeli dan penjual. Dalam proses itu pembeli mempunyai kepentingan mendapatkan barang dengan harga semurah-murahnya, sedangkan penjual berkepentingan memperoleh untung yang besar dari penjualan barangnya. Dalam proses itu ada dua tujuan yang berbeda, bahkan berlawanan, namun karena hanya melalui proses seperti itu kepentingan masing-masing dapat terpenuhi, maka penjual dan pembeli meskipun dalam posisi berseberangan akan selalu berhubungan. Justeru dari posisi saling berbeda itu, mungkin juga dalam prosesnya

disertai konflik (dalam hal ini tawar-menawar), kemudian pada akhirnya akan tercipta saling pengertian.

Hubungan antar etnik adalah suatu bentuk interaksi sosial yang di dalam prosesnya individu-individu atau kelompok-kelompok yang berinteraksi selain mewakili kepentingan dirinya, sebenarnya seringkali juga membawakan misi atau kepentingan kelompok dan masyarakatnya secara keseluruhan. Ketika dalam proses atau akibat interaksi terjadi salah pengertian atau gesekan yang menimbulkan peristiwa konflik, maka peristiwa itu tidak hanya dilihat sebagai hasil tindakan individual, namun juga dicap sebagai tindakan sosial (kelompok dan/atau masyarakat). Konsekwensinya muncul citra sosial yang bersifat negatif. Sebaliknya pada proses atau hasilnya yang bersifat positif maka kelompok dan masyarakatnya akan memperoleh kenangan yang baik.

### *Aspek Ekonomi*

Ditinjau dari segi pemanfaatan lahan, Kecamatan Cikupa memperlihatkan potensinya sebagai daerah pertanian. Luas tanah pertanian di kecamatan ini, berdasarkan keadaannya pada bulan Juni 2000, adalah 2.846 Ha dengan perincian untuk pertanian padi sawah 2.464 Ha dan untuk pertanian palawija/padi gogo 382 Ha. Peruntukan pertanian seluas itu adalah kurang lebih 63 % dari seluruh luas wilayahnya, yaitu 4.512 Ha. Kemudian pemanfaatan lahan untuk industri menempati urutan kedua dengan luas 1.386 Ha atau kurang lebih 31 % dari keseluruhan luas kecamatan.

Meskipun tanah untuk pertanian dua kali lebih luas dari tanah untuk industri, namun dilihat dari segi jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri ternyata jauh lebih banyak. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, meliputi petani pemilik, penggarap/penyakap dan buruh tani, berjumlah 4.454 orang (sekitar 6% dari jumlah penduduk); sedangkan mereka yang bekerja di bidang industri berjumlah 36.594 orang (48,2% dari keseluruhan penduduk). Hal ini berarti jumlah pekerja industri lebih delapan kali lipat dari jumlah

pekerja pertanian. Berdasarkan angka-angka tersebut maka adalah sangat wajar apabila Kecamatan Cikupa disebut sebagai daerah industri.

Gambaran di tingkat Kecamatan Cikupa juga hampir sama keadaannya di tingkat desa Talagasari. Dalam perkataan lain aspek kehidupan ekonomi masyarakat Cikupa sangat dipengaruhi oleh jasa industri. Demikian pula bagi penduduk pendatang seperti orang Bima. Bahkan kedatangan orang-orang Bima di Cikupa salah satunya adalah karena dimotivasi oleh tujuan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan industri. Dapat dikemukakan bahwa dari seluruh keluarga orang Bima yang berdiam di Talagasari, Cikupa, pada saat ini hanya 1 kepala keluarga yang bekerja di luar bidang industri, yaitu sebagai guru Sekolah Dasar.

Interaksi di bidang ekonomi, khususnya di lingkungan industri, antara orang Bima dengan warga kelompok masyarakat lainnya, termasuk orang Sunda, dapat dikatakan tidak terjadi secara langsung dalam nuansa keetnikan. Perusahaan industri sebagai tempat mencari nafkah sebagian besar keluarga orang Bima dan sekaligus menjadi media interaksi tidak hanya mengharuskan mereka berhubungan dengan orang Sunda saja, tetapi juga dengan orang-orang dari sukubangsa lain yang bekerja di perusahaan industri. Dibawah manajemen setiap industri, baik orang Bima maupun yang lainnya mengikuti berbagai pola aturan yang sama dengan suatu orientasi meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian dapat pula menjamin kehidupan mereka.

Dalam kondisi seperti itu hubungan bernuansa etnik seringkali kurang menjadi perhatian karena hubungan kerjasama sebagai pekerja di perusahaan industri merupakan faktor yang lebih dikedepankan. Dilatarbelakangi oleh kesamaan nasib sesama pekerja industri, justru seringkali menghasilkan kesamaan pandangan dan visi dalam menekuni pekerjaan dan bekerja untuk masa depan yang lebih baik. Hal ini berarti sistem interaksi yang terbangun dilandasi oleh kepentingan dan tujuan yang sama.

Beberapa pekerja industri (orang Sunda, Jawa, Betawi, Lampung, dan lain-lain) yang mempunyai teman sekerja orang Bima

rata-rata menyatakan bahwa orang Bima cukup toleran, perhatian kepada teman, dan terpenting bisa bergaul dengan siapa saja di perusahaan. Secara pribadi mereka juga tidak atau belum pernah mempunyai pengalaman yang kurang baik (seperti terlibat keributan, cekcok yang mengarah kepada adu pisik) dengan teman kerja orang Bima.

Manajer industri, pengusaha (pemilik perusahaan) juga mempunyai kesan tersendiri terhadap pekerja orang Bima. Mereka menyatakan orang-orang Bima memiliki motivasi dan etos kerja yang cukup tinggi, bertanggung jawab dan sangat berorientasi kepada penyelesaian pekerjaan secara menyeluruh. Pekerja orang-orang Bima tampaknya sangat menghargai waktu, oleh karena itu mereka lebih senang menghabiskan waktu di lingkungan pekerjaan daripada kembali ke rumah. Seorang tokoh (sesepuh) masyarakat Bima, ketika ditanya mengenai motivasi kerja orang Bima, menyatakan bahwa mereka itu kalau mencari pekerjaan di sektor industri salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah perusahaan industri yang bisa memberikan kerja lembur. Tentu saja sikap kerja demikian juga dilandasi harapan bahwa semakin banyak bekerja juga akan mendatangkan hasil (gaji/upah) yang lebih besar. Atas dasar itu mereka lebih banyak bekerja di perusahaan-perusahaan industri sepatu (misalnya Nikkei, Isso) selain karena memberi gaji/upah lebih besar, juga lebih sering memberikan kesempatan kepada karyawan atau pekerjanya untuk kerja lembur.

Meskipun sebagian sudah memiliki rumah sendiri, namun kehidupan orang Bima belumlah dapat dikatakan sejahtera, mapan, dalam realitas yang sesungguhnya. Keadaan itu tercermin dari banyaknya anak-anak keluarga Bima tamatan SD, SLTP dan SLTA yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi karena alasan biaya dan masih terbatasnya penghasilan orang tua mereka. Cerminan lain ialah kondisi rumah-rumah mereka yang sangat sederhana, sebagian dibangun atau didirikan di lingkungan yang sangat padat, lahan sempit, sehingga menimbulkan kesan terbentuk suatu kehidupan "slam" atau perkampungan kumuh.

Pemukiman orang Bima di Talagasari, khususnya di RT.13, disebut oleh seorang pejabat desa seperti “terowongan” dimana terdapat lorong (jalan setapak) pembatas antara rumah-rumah yang pintunya saling berhadapan, tetapi lebarnya tidak lebih dari setengah meter. Ketika seseorang masuk ke sana akan sulit melihat langit karena tertutup oleh atap-atap rumah yang saling bersentuhan. Dengan kondisi kehidupan ekonomi orang Bima yang juga sama saja dengan kondisi ekonomi sebagian besar penduduk lokal (orang Sunda), menurut seorang pejabat di kantor Kecamatan Cikupa, tidak akan menjadi sumber kecemburuan sosial yang bisa berakibat terjadinya konflik sosial antar etnik.

Kerja keras perantau Bima di Cikupa juga dimotivasi oleh keinginan merubah kehidupan ekonomi ke tingkat yang lebih baik. Keinginan tersebut sebenarnya untuk sebagian didorong oleh kondisi di kampung halaman yang kurang menjanjikan peluang mendapatkan hasil (uang) secara teratur dan rutin, berkesinambungan, yang kepastiannya lebih meyakinkan, dan dalam tempo yang tidak terlalu lama.

“Masa merantau masa kerja”, “kalau mau mendapat penghargaan yang memadai maka bekerja keraslah”, demikian diucapkan oleh beberapa orang dari mereka. Hasil kerja keras kiranya memang terlihat pada kehidupan mereka di desa Talagasari, Cikupa. Beberapa orang yang ketika awal kedatangannya di desa itu tinggal di rumah-rumah sewaan, pada saat ini sudah memiliki rumah sendiri. Meskipun kondisi rumahnya sederhana, namun apabila ada anggota keluarga dari kampung sudah bisa memanfaatkannya sebagai tempat istirahat (tinggal) sementara. Untuk memiliki rumah sendiri mereka menggunakan strategi “sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit”. Menarik cerita seseorang yang menyatakan bahwa tanah rumahnya yang luasnya sekitar 90 meter persegi dibeli secara cicilan dengan harga per meter mulai dari Rp.5000 sampai Rp.150 ribu rupiah. Pada saat ini harga tanah di wilayah tersebut sudah mencapai Rp 200 ribu per meter persegi.

Berhubung sebagian besar orang Bima di Cikupa adalah pekerja industri, maka sifat interaksi ekonomi di luar bidang tersebut kurang

terjadi secara intensif. Artinya, warga Bima tidak ada yang menjadi pedagang pasar maupun toko. Mereka lebih banyak sebagai pihak pembeli untuk hampir semua jenis barang kebutuhan sehari-hari. Posisi demikian berpengaruh khusus pada tataran interaksi mereka. Apabila kita sempat berjalan-jalan ke pasar Cikupa jangan heran apabila beberapa penjual (orang Sunda, Cina, dan lain-lain) yang terlibat dalam proses tawar-menawar dengan pihak pembeli orang Bima menggunakan sepatah dua kata bahasa Bima. Kiranya faktor bahasa Bima telah dijadikan pula sebagai alat komunikasi dalam proses interaksi ekonomi di daerah ini.

### *Aspek Politik (KEPARTAIAN DAN PEMERINTAHAN Lokal DESA)*

Tingkah laku politik orang Bima di Cikupa tidak terlepas dari konteks perpolitikan nasional dan lokal. Sebagaimana diketahui tidak ada satu partai yang didirikan atas dasar etnik. Oleh karena itu setiap warga dari suatu etnik tertentu bebas untuk menjadi anggota atau menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai politik yang disukainya. Begitu pula warga masyarakat Bima di Cikupa sejak zaman Orde Baru sampai masa reformasi sekarang. Kebebasan itu menyebabkan orang Bima di Cikupa, yang pada saat ini sudah sepertiga dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Talagasari juga terbagi-bagi dalam berbagai partai politik. Dilihat dari segi proses interaksi politik orang Bima Cikupa juga melakukannya dengan warga dari berbagai etnik, terutama orang Sunda. Interaksi politik yang lebih intensif tentu saja dilakukan dengan orang-orang sesama warga separtai.

Dari penelitian lapangan dapat diketahui bahwa pada masa Orde Baru, orang-orang Bima banyak terlibat dalam dua partai saja, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan GOLKAR (Golongan Karya). Simpatisan PPP lebih banyak, sedangkan mereka yang menjadi simpatisan GOLKAR adalah terutama anggota keluarga yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Banyaknya warga Bima menjadi simpatisan PPP disebabkan komitmen partai ini yang teguh terhadap perjuangan kebangsaan dan negara tanpa meninggalkan landasan ke-Islam-an. Implementasi dari rasa simpati terhadap PPP diwujudkan

dalam keikutsertaan mereka sebagai pengurus partai di tingkat Kecamatan Cikupa.

Ketika masa Orde Baru berlalu dan digantikan oleh masa Reformasi, jumlah partai politik kemudian berkembang pula dari hanya 3 partai menjadi 48 partai yang menjadi kontestan Pemilu (Pemilihan Umum) pada tahun 1999. Keterlibatan orang Bima dalam partai di masa Reformasi juga semakin berkembang, dalam pengertian mereka terlibat tidak lagi pada dua partai saja tetapi pada beberapa partai. Selain mereka yang tetap berada di PPP dan GOLKAR, sudah ada pula yang masuk ke beberapa "partai Islam" seperti PUMI, PAN, dan PBB. Bahkan Ketua PUMI (Partai Umat Muslim Indonesia) tingkat Kecamatan Cikupa dijabat oleh MU, warga Bima penduduk Desa Talagasari. Pada Pemilu 1999 yang lalu, PUMI di Kecamatan Cikupa memperoleh sebanyak 154 suara atau hanya 0,17% dari seluruh pemilih di Kecamatan Cikupa yang berjumlah 102.278 orang. Dengan jumlah suara yang diperoleh PUMI tersebut belum bisa menjadi legitimasi bagi ketuanya untuk menjadi salah satu anggota DPRD Tingkat II Tangerang. Tetapi di wilayah RT 013, Desa Talagasari, yang sebagian besar penduduknya orang Bima peringkat PUMI adalah nomor tiga setelah GOLKAR dan PDIP.

Jika pada aspek politik kepartaian, meskipun sudah ada yang menduduki jabatan ketua di tingkat kecamatan, sebenarnya orang Bima masih lebih berperan sebagai simpatisan. Sebagai warga partai suaranya belum banyak berpengaruh terhadap konstelasi politik di tingkat kecamatan sekalipun. Berbeda dari peranan mereka tersebut, pada aspek politik pemerintahan di tingkat Desa Talagasari, Cikupa, peranan orang Bima sangat menentukan. Hal ini disebabkan oleh jumlah mereka yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala desa lebih dari 1.000 orang. Jumlah orang Bima di Desa Talagasari sangat signifikan untuk menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan sosial-politik pemerintah desa, seperti untuk memenangkan pemilihan kepala desa.

Kepala Desa Talagasari saat ini, HN, sekiranya tidak didukung oleh penduduk warga Bima pada pemilihan yang lalu (1994?) mungkin

saja hanya menjadi calon untuk kesekian kalinya. HN bisa lolos karena masyarakat Bima kecewa terhadap kepala desa sebelumnya, HT, yang saat itu kembali lagi mencalonkan diri. Menurut beberapa sumber, kekecewaan itu sudah muncul sebelum pemilihan kepala desa karena HT terlanjur salah ngomong dan cukup menyinggung perasaan orang Bima. Ketika itu HT (GOLKAR) mengatakan “semua orang berbaju hijau (maksudnya warga PPP) akan diusir dari Talagasari”. Mendengar omongan pengusiran itu, penduduk masyarakat Bima yang ketika itu mayoritas menjadi pendukung PPP bersatu tekad tidak akan lagi memberi dukungan kepada HT, sehingga pada waktu pilkades (pemilihan kepala desa) betul-betul tidak terpilih lagi.

Kekuatan dalam interaksi politik pemerintahan desa yang dimiliki penduduk masyarakat Bima di Desa Talagasari rupanya disadari oleh kepala desa saat ini. Selain karena terpilih berkat dukungan penuh dari masyarakat Bima, juga karena beberapa alasan lainnya, misalnya untuk kemudahan, sehingga kepala desa menunjang beberapa keinginan dan kegiatan masyarakat Bima. Dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan seperti pembuatan KTP, pencatatan orang Bima yang datang dan pergi dari Talagasari, permintaan surat-surat keterangan, dan lain sebagainya sesepuh atau tokoh masyarakat Bima diberikan “kewenangan” langsung mengurusnya. Dalam pengertian untuk urusan yang berkaitan dengan masyarakat Bima tidak perlu melalui Ketua RT dan RW untuk sampai ke Kepala Desa Talagasari.

Sebagai contoh, terjadi ketika penelitian, penulis dapat menyaksikan sendiri seorang warga Bima (ST, perempuan) yang beberapa hari sakit sehingga tidak bisa masuk bekerja di perusahaan atau pabrik tempat kerjanya. Dia datang ke seorang sesepuh/tokoh masyarakat Bima. Kedatangannya untuk meminta bantuan agar sesepuh itu mengurus surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan bahwa dia (ST) betul-betul sakit dalam beberapa hari. Surat keterangan itu, yang juga dilampirkan bersama dengan surat keterangan dokter diperlukan sebagai maklumat kepada yang berwenang di tempat kerjanya bahwa dia tidak masuk kerja bukan karena halangan yang dibuatnya sendiri.

Contoh lain, ketika dilakukan pelaksanaan Sensus 2000 yang lalu, anak-anak dari keluarga Bima, atas dukungan dan rekomendasi Kepala Desa Talagasari, diberi kepercayaan masuk sebagai anggota pelaksana sensus. Mereka secara khusus ditugaskan mendata penduduk yang berdiam di RT. 013. Dilihat dari status mereka sebagai warga desa sebenarnya tugas itu adalah sesuatu yang biasa, merupakan bentuk partisipasi mereka terhadap kegiatan pemerintah desa; namun dari sisi pemerintah desa sendiri adalah merupakan kesempatan memupuk, melestarikan hubungan sosial dengan masyarakat Bima yang selama ini sudah dibina.

Karena “kekuatan” yang dimiliki masyarakat Bima itu pula mendorong kepala desa dan stafnya semakin mempererat interaksi sosialnya dengan masyarakat Bima. Demikian pula sebaliknya. HN yang oleh stafnya sendiri digelar “Kepala Desa Bima” melakukannya hampir setiap hari. Dilakukannya dalam bentuk lebih sering berkunjung di lingkungan tempat tinggal masyarakat Bima (RT.013) dibandingkan dengan di RT lainnya. Dalam rangka menjalin hubungan sosial yang lebih intensif kepala desa Talagasari ikutserta memelopori berdirinya “Bima Talakap” (artinya: “Bima bicara atau Bima bangkit”) suatu kelompok persatuan sepak bola orang-orang Bima di Desa Talagasari. Kelompok ini aktif melakukan kegiatan olahraga bersama warga kelompok masyarakat lainnya, meskipun waktunya secara berkala. Tujuan utama pembentukannya sebagai persiapan menghadapi “Bima Cup” yang biasa dilakukan dua tahun sekali, dimana diadakan pertandingan sepakbola antar kelompok-kelompok masyarakat Bima di seluruh wilayah Jabotabek.

Mengurus penduduk warga masyarakat Bima, menurut Ketua RT. 013, biasa-biasa saja dan pengalaman selama ini menunjukkan tidak ada susahnya. Sekalipun mereka pendatang untuk mencari hidup dan bekerja harus dianggap orang setempat saja. Dianggap sama dengan warga lainnya agar secara bersama bisa membangun atau melakukan sesuatu untuk kebaikan semua. Membangun hubungan atau interaksi sosial dengan orang Bima dilakukan melalui orang-orang tua (sesepuh/tokoh) di kalangan mereka. Oleh karena orang-orang tua

(sesepuh/tokoh) masyarakat Bima di Talagasari, Cikupa, memang banyak di RT. 013 maka ketua RT tidak menuakan hanya salah satunya, tetapi semuanya. Jika hanya seorang dituakan, misalnya yang pertama kali datang di Talagasari, dikhawatirkan bisa menimbulkan kecemburuan dari sesepuh Bima lainnya. Dalam kaitannya dengan urusan RT, ketua RT.013 juga tidak pernah menghubungi mereka karena kedudukannya sebagai ketua “Ikatan Masyarakat Bima” atau karena suatu posisi yang berhubungan dengan etnisitas dan daerah asal. Mereka biasa diajak atau dihubungi karena dianggap sebagai tokoh masyarakat di RT.

Menurut informasi keberadaan masyarakat Bima di Tangerang, khususnya di Desa Talagasari, Kecamatan Cikupa, juga menjadi dasar dikembangkannya hubungan-hubungan antar pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dengan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima, Nusa Tenggara Barat. Kedua belah pihak sudah pernah saling mengunjungi yang diwakili oleh Kepala Sospol masing-masing. Saling mengunjungi antar beberapa anggota DPRD Tingkat II juga sudah pernah dilakukan.

### *Aspek (KEGIATAN DAN ORGANISASI) SOSIAL*

Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan di sini, yaitu pengajian dan kehidupan keagamaan (Islam), urusan kematian serta perkumpulan orang-orang Bima dalam kapasitasnya sebagai masyarakat perantau. Pada tingkat wilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi) orang-orang Bima memiliki pengajian baik untuk kaum ibu (perempuan) maupun kaum bapak (laki-laki). Pengajian ini dilakukan secara berpindah-pindah, bergilir, dari satu tempat ke tempat (daerah tempat tinggal banyak orang Bima) lainnya. Pengajian secara rutin dilaksanakan setiap bulan dan diorganisir oleh organisasi-organisasi masyarakat perantau, misalnya, IKRA (Ikatan Keluarga Wera) Bima, Jabotabek. Selain pengajian juga untuk kehidupan keagamaan lainnya mereka mengadakan buka puasa bersama dilanjutkan dengan shalat tarawih, ceramah agama, pada setiap minggu pada bulan puasa setiap tahun. Kecuali tahun 2000, sebelumnya mereka juga setiap tahun

menyelenggarakan acara halal bil halal. Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin rasa kekeluargaan, silaturahmi dan pembinaan keagamaan bagiarganya.

Di Talagasari, Cikupa, warga masyarakat Bima tidak memiliki kelompok pengajian tersendiri. Untuk pengajian di tingkat desa, RT, mereka ikutserta bergabung dengan warga masyarakat lainnya dari bermacam-macam sukubangsa. Menurut ketua RT. 013 berbagai pelaksanaan kegiatan keagamaan dilaksanakan di mushallah RT. Dalam rangka pengajian biasanya guru atau penceramah didatangkan dari luar dan imbalan jasanya ditanggung secara bersama oleh warga peserta pengajian. Mendatangkan guru bukan berarti tidak ada warga RT yang bisa mengambil peran itu, namun hal itu dilakukan dengan tujuan memperluas silaturahmi sosial dengan orang-orang dari luar atau dari etnik lain.

Keikutsertaan orang Bima dalam pengajian selain karena alasan ibadah, juga sebenarnya disebabkan oleh latar belakang yang bersifat kultural. Menurut beberapa warga masyarakat Bima di Cikupa, melalui pengajian diharapkan kemampuan membaca Al-Quran dapat dicapai. Kemampuan membaca Al-Quran ini menempati posisi yang penting karena mengikuti kebiasaan yang berlangsung di kampung halaman. Di daerah Bima, pada masa lalu, ada "keharusan" bagi setiap penduduk untuk bisa membaca Al-Quran (mengaji). Oleh karena itu sejak kecil anak-anak sudah diajar mengaji, baik dilakukan sendiri oleh orang tuanya maupun guru ngaji khusus. Keterampilan mengaji juga ada hubungannya dengan bakal jodoh. Menurut informasi, di Bima seorang laki-laki muda yang sudah dalam status "pacaran" atau "tunangan" dengan seorang perempuan (gadis) memang dituntut agar bisa mengaji (baca Al-Quran). Sebab, misalnya orang tua perempuan sang gadis meninggal dunia, ketika dilakukan acara pengajian untuk mendoakan almarhumah, tunangannya tidak datang karena alasan tidak bisa mengaji maka konsekwensinya ialah pertunangannya dengan anak perempuan almarhum terputus.

Aspek tertentu dalam hubungan antar etnik yang menarik juga antara orang Bima dengan masyarakat lokal (orang Sunda) di Cikupa, Tangerang, ialah dalam hal kematian. Pada saat ini, di Cikupa seperti di wilayah lain sekitar Jabotabek, sudah biasa ada petugas khusus dalam penggalian kuburan yang memang memperoleh upah dalam jumlah tertentu dari pekerjaannya itu. Bagi masyarakat Bima di Cikupa, Tangerang, apabila seorang warganya meninggal dunia maka untuk menggali kuburan tidak dilakukan oleh petugas khusus, tetapi dikerjakan secara bersama oleh orang-orang Bima. Kegiatan itu sengaja dilakukan untuk menunjukkan rasa belasungkawa yang dalam. Tindakan orang-orang Bima itu tidak berarti memutuskan tali rezeki penggali kubur. Walaupun si penggali kubur tidak melakukan penggalian, tetapi sewa alatnya tetap dibayar.

Demikian pula untuk mengantar jenazah ke kuburan ada kebiasaan yang sudah lazim dilakukan ialah diangkut dengan mobil jenazah walaupun jarak antara rumah duka dan lokasi kuburan tidak jauh. Selama ini orang Bima yang meninggal belum pernah ada seorang pun yang diangkut dengan mobil ke kuburan. Orang yang meninggal cukup ditandu secara bergantian oleh seluruh anggota keluarga, orang-orang Bima, hingga sampai di lokasi kuburan. Sama halnya dengan penggalian kuburan, aktivitas bersama ini juga menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi di kalangan keluarga dan masyarakat Bima, menghormati dan ikut serta merasa kehilangan dengan meninggalnya salah seorang warga mereka. Oleh karena ditandu oleh keluarga sendiri maka tidak perlu dibayar, tidak demikian halnya jika memakai mobil jenazah.

Pada acara tahlilan bagi siapa saja yang meninggal, bagi orang Bima yang hadir sebenarnya selalu siap jika sekiranya diminta ikut serta membaca tahlil. Begitulah yang biasa terjadi di kalangan warga masyarakat Bima. Namun, seringkali terjadi, seperti pada masyarakat Sunda di Cikupa ialah kelompok pembaca tahlil memang sudah tertentu. Mereka biasanya adalah pengurus masjid, guru agama atau pegawai kantor agama setempat. Kelompok itu selalu diundang pada acara tahlilan, sehingga menurut sebagian orang Bima, ada kesan amalan

tahlilan sudah bukan kerja perorangan setiap umat Islam tetapi sudah berubah menjadi kerja kelompok dan, bahkan, kerja upahan dan borongan pula.

Berkaitan dengan aspek kegiatan sosial di tingkat RT. 013, Desa Talagasari, Cikupa, partisipasi orang yang berjumlah mayoritas senantiasa diharapkan. Ketua RT. 013 menyatakan salut atas kerelaan warga Bima menunjukkan partisipasinya. Dikatakan bahwa berkat usaha warga masyarakat Bima, terutama yang bekerja di PT Starwin (pabrik sepatu) berjumlah sekitar 60 orang, perusahaan tersebut memberikan sebagian sumbangan berupa biaya dalam rangka perbaikan jalan-jalan di RT.013. Usaha yang dilakukan itu sama sekali tidak didahului oleh desakan dari Ketua RT, tetapi muncul dari hati nurani para pekerja saja, juga didorong oleh rasa kebersamaan dan tanggung jawab mereka sebagai warga RT. PT Starwin sendiri tidak berada di wilayah Kecamatan Cikupa sehingga sebenarnya relatif tidak punya “kewajiban” memperhatikan pembangunan di wilayah itu.

Berbagai aspek yang diungkapkan di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan warga masyarakat Bima tampaknya selalu ada motivasi dan sikap gotong royong. Sifat dan sikap itu tampaknya belum juga luntur walaupun mereka sudah jauh dari kampung halaman, berada dalam dunia kehidupan masyarakat industri di Tangerang yang sudah dipengaruhi oleh aspek-aspek moderen. Bahkan ada kecenderungan kehidupan gotong royong itu ditumbuh-kembangkan di kalangan mereka di rantau. Maksudnya, jika di kampung halaman kegiatan gotong royong hanya melibatkan masyarakat se desa, maka di perantauan sudah melibatkan warga masyarakat Bima dari beberapa desa, kecamatan dan, bahkan, sampai tingkat satu kabupaten. Sikap itu juga diperkuat melalui beberapa organisasi etnik, daerah, sebagai sarannya. Memang, jika dilihat sepintas lalu, keberadaan organisasi seperti itu tampak melanggengkan eksklusifitas primordial; namun apabila diamati langkah dan kegiatannya ternyata tidak selamanya demikian. Untuk jelasnya, pada bagian berikut akan dikemukakan berbagai hal mengenai organisasi tersebut.

Wadah perkumpulan masyarakat Bima di perantauan, khususnya mereka yang berada di wilayah Jabotabek ternyata tidak hanya melingkupi masyarakat dari suatu wilayah administrasi etnik tingkat Kabupaten Bima, NTB (Nusa Tenggara Barat), tetapi juga ada bagian-bagian yang khusus merupakan organisasi masyarakat Bima tingkat kecamatan. Di Jabotabek paling kurang ada tiga organisasi mereka, yaitu (1) RKB (Rukun Keluarga Bima) adalah organisasi kerukunan yang menghimpun perantau Bima yang dihubungkan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bima sebagai daerah asal; (2) BMMB (Badan Musyawarah Masyarakat Bima) ialah organisasi permusyawaratan kelompok-kelompok masyarakat Bima dari setiap wilayah Jabotabek; (3) Ikatan kekeluargaan masyarakat Bima yang berasal dari wilayah tingkat kecamatan yang sama di Bima, seperti IKRA (Ikatan Keluarga Wera) Bima Jabotabek.

Setiap organisasi tersebut mempunyai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), tetapi dalam kegiatannya seringkali saling memberi informasi dan mengundang kehadiran sebagian anggota pengurus masing-masing. Oleh karena kebanyakan orang Bima di Cikupa, Tangerang berasal dari Kecamatan Wera, Bima, maka hanya organisasi IKRA akan dibahas lebih detail. Menurut informasi IKRA didirikan pada tahun 1975. IKRA adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat kekeluargaan beranggotakan masyarakat Jabotabek yang berasal dari Kecamatan Wera, Kabupaten Dati II Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selain di Jabotabek, IKRA juga terdapat di Surabaya, Jawa Timur dan di ibukota Propinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram. Di wilayah Jabotabek IKRA mempunyai perwakilan di beberapa wilayah, yaitu (1) Jakarta Pusat, (2) Jakarta Barat, (3) Jakarta Selatan, (4) Jakarta Timur, (5) Jakarta Utara, (6) Depok, (7) Bekasi, (8) Bogor, (9) Cileduk, (10) Ciater, (11) Tangerang (Perumnas) dan (12) Cikupa. Program utama dari organisasi ini tercermin dalam beberapa sasaran programnya untuk tahun 2000-2005 sebagai berikut. Pertama, meningkatkan jalinan rasa kekeluargaan, kebersamaan, kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial. Kedua, meningkatkan ukhuwah Islamiah dan penghayatan serta

pengamalan ajaran agama. Ketiga, meningkatkan kesadaran berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keempat, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab sosial baik sebagai anggota IKRA, warga Jabotabek maupun sebagai warga negara Republik Indonesia. Kelima, meningkatkan rasa aman, tertib dan sejahtera bagi anggota IKRA yang berdomisili di Jabotabek. Keenam, menjalin hubungan yang harmonis dan dinamis dengan BMMB Jabotabek, Pemda di wilayah Jabotabek, Pemerintah wilayah Kecamatan Wera, Pemda Kabupaten Dati II Bima, dan lembaga-lembaga masyarakat yang diakui oleh pemerintah.

Melihat sasaran program tersebut di atas semakin jelas bahwa organisasi IKRA Bima bertujuan tidak untuk meningkatkan sikap eksklusif warganya. Sebaliknya, melalui dan dimotori oleh organisasinya itu, bertujuan membangun dan mengembangkan interaksi atau hubungan-hubungan sosial dengan berbagai kelompok masyarakat, dimulai dari/di dalam lingkungan wilayah tempat tinggal mereka sampai ke lingkungan yang lebih luas, yaitu negara Indonesia.

### *ASPEK KEKERABATAN*

Hubungan kekerabatan dapat terwujud karena adanya perkawinan antar anggota-anggota dari kelompok atau unit sosial. Unit sosial bisa berarti keluarga, etnik, bangsa, agama, dan lain sebagainya. Proses interaksi terjadi karena didasari atas tujuan yang sama untuk membangun sebuah rumah tangga. Dilihat dari segi hubungan kekerabatan antar etnik melalui perkawinan bagi orang Bima di Talagasari ternyata sudah dimulai oleh pendatang pertama yaitu ZB. ZB mengawini seorang perempuan dari keluarga Sunda pada tahun 1979 dan sampai sekarang keluarga ini sudah mempunyai sebanyak 8 (delapan) anak.

Bagi ZB perkawinan memperluas wilayah kekerabatan. Melalui perkawinan antar etnik, menurutnya, sangat bermanfaat sebagai suatu cara terbaik untuk mengetahui berbagai maca adat-istiadat, kebiasaan-

kebiasaan, norma-norma sosial budaya masing-masing etnik. Dikatakan pula bahwa membina kekerabatan antar etnik sebenarnya didorong oleh adanya kesediaan yang tulus dari masing-masing pihak untuk menjadi "peserta" dalam dua macam kehidupan sosial budaya yang mungkin berbeda. Atas dasar pemikiran demikian, ZB menyatakan faktor kesamaan etnik bukan sesuatu pertimbangan yang penting dalam perkawinan anak-anaknya kelak. Sesuatu yang terpenting dalam perkawinan selain sama-sama saling mencintai ialah kesamaan agama. Agama tidak hanya menjadi pedoman dalam membina keluarga, tetapi ia adalah pedoman kehidupan di dunia dan di akhirat. Perkawinan adalah suatu hubungan sakral, dimana kedua belah pihak dipertautkan oleh jodoh yang ditentukan dan diresmikan atas nama Tuhan YMK. Dalam perkawinan antar etnik kita bukan berpikir tentang persoalan plus-minus yang bakal muncul akibat perkawinan itu, tetapi bagaimana kondisi tersebut dijadikan landasan memperkaya nilai-nilai sakral dari sebuah perkawinan.

Berbeda dengannya, MU yang juga beristeri dari keluarga Sunda serta sudah mempunyai 4 anak, memandang perkawinan berbeda untuk anak laki-laki dan perempuan. Dikatakan bahwa perkawinan keluar etnik tidak ada masalah bagi kaum laki-laki, tetapi untuk perempuan sebaiknya kawin dengan laki-laki sesama etnik. Alasannya ialah laki-laki memang diberikan keleluasaan memperkaya dan memperluas kekerabatan, sedangkan perempuan ditakdirkan untuk memperkuat tradisi kekerabatan etniknya. Itulah sesuatu yang ideal dalam kehidupan perkawinan, khususnya menjodohkan anak-anak orang Bima. Baginya, kalau bisa, anak perempuannya kelak dapat mendapatkan jodohnya dengan laki-laki Bima agar identitas ke-Bima-annya dapat terpelihara. Mungkin karena tujuan demikian itu sehingga anak pertamanya (perempuan) kuliah di UNRAM (Universitas Mataram), di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Fakta hubungan kekerabatan yang melibatkan orang-orang Bima warga penduduk Talagasari menunjukkan mereka yang kawin di luar etniknya cukup banyak. Perkawinan mereka tidak hanya dengan satu etnik lain, tetapi beberapa etnik serta melibatkan baik laki-laki maupun

perempuan. Hal yang menarik dari perkawinan keluar etnik (*ethnical exogamy*) bagi orang-orang Bima di Talagasari, Cikupa ialah "identitas etnik" (*ethnical identity*) yang dikenakan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dalam perkawinan, meskipun kedua orang tuanya memegang identitas etnik asalnya masing-masing, tetapi untuk anak-anaknya tidak selalu mengikuti identitas etnik dari bapaknya, sebagaimana lazimnya di banyak masyarakat sukubangsa Indonesia. Sebagai contoh, jika kedua orang tuanya Jawa maka secara otomatis identitas etnik anak-anaknya juga adalah Jawa. Dalam penelitian, ketika orang tuanya ditanya mengenai etnik atau sukubangsa anak-anaknya tidak semua mengatakan karena bapaknya orang Bima maka otomatis anaknya juga Bima. Artinya, ketika ditanyakan etnik anak-anaknya, ada keluarga yang menyatakan anaknya bukan orang Bima (disebutnya satu sukubangsa tertentu), mengikuti etnik ibunya saja, tergantung tempat dilahirkan dan ada juga tergantung jenis kelamin anak-anaknya. Untuk jelasnya diberikan beberapa contoh sebagai berikut.

*Pertama,*

Ikut identitas etnik bapak

Kedua orang tuanya Bima

- \*Sudirman (bapak) - Bima
- \*Suryati (ibu) - Bima
- \*Rossi D - Bima (lahir di Tangerang)
- \*Yudi - Bima (lahir di Bima)

Bapaknya Bima, ibunya Minangkabau

- \*Ahmad (bapak) - Bima
- \*Hentrisnopim (ibu) - Minangkabau
- \*Andri Bima P - Bima (lahir di Tangerang)
- \*Syahrul R - Bima (lahir di Tangerang)

*Kedua,*

Tergantung tempat kelahiran anak.

Kedua orangtuanya Bima

- \*Nurdin M (bapak) - Bima
- \*Jurhani (ibu) - Bima
- \*Ade Fitria (anak 1) - Sunda (lahir di Tangerang)
- \*Fastabulul (anak 2) - Sunda (lahir di Tangerang)

Bapaknya Bima, ibunya Sunda

- \*Zainuddin B.(bapak) - Bima
- \*Sri Suhanah (ibu) - Sunda
- \*Agus M (anak 1) s/d
- \*Dede M (anak 8) - Sunda (semua lahir di Tangerang)

Bapaknya Bengkulu, ibunya Bima

- \*Ujang H (bapak) - Bengkulu
- \*Sri Dewi (ibu) - Bima
- \*Handayani S (anak 1) - Sunda (lahir di Tangerang)
- \*Hendra (anak 2) - Sunda (lahir di Tangerang)

Kedua orangtuanya Bima

- \*M. J. Ahmad (bapak) - Bima
- \*Zaenab (ibu) - Bima

- \*Arif Rahman (anak 1) - Bima (lahir di Bima)
- \*Syamsiah (anak 2) - Betawi (lahir di Jakarta)

Bapaknya Lampung, ibunya Bima

- \*Aris Prawoto (bapak) - Lampung
- \*Leni M (ibu) - Bima
- \*Elisa M (anak 1) - Sunda (lahir di Tangerang)

*Ketiga,*

Kenurut jenis kelamin anak

Kedua orang tuanya Bima

- \*Maskur (bapak) - Bima
- \*Rohana (ibu) - Bima
- \*Hilman R (anak 1) - Bima (laki-laki, lahir di Tangerang)
- \*Nining (anak 2) - Sunda (perempuan, lahir di Bima)

Bapaknya Betawi, ibunya Bima

- \*Abdillah (bapak) - Betawi
- \*Suryati (ibu) - Bima
- \*Aisyah (anak 1) - Bima (perempuan, lahir di Tangerang)
- \*Zaenab (anak 2) - Bima (perempuan, lahir di Bima)

Beberapa contoh di atas menunjukkan pada aspek kekerabatan, khususnya dalam hal perkawinan, orang Bima di Desa Talagasari, Cikupa, cukup terbuka terhadap perubahan-perubahan sebagai konsekuensi dari keputusan mereka bermigrasi dan memilih tempat berdiam di lingkungan sosial budaya lain selama di rantau. Mereka, baik laki-laki maupun perempuan, tidak menolak untuk membangun rumah tangga dengan orang-orang dari etnik lainnya. Sebagian besar dari mereka, kalau tidak mau disebut semuanya, juga tidak terlalu banyak memikirkan tentang masalah-masalah yang cenderung dinilai bersifat negatif dari stereotip etnik (*ethnical stereotype*) ketika mencari jodoh. Jelasnya, mereka yang pada akhirnya kawin dengan orang Sunda, sebelum dan sesudah kawin tidak pernah terlalu memikirkan watak atau karakter etnik (*ethnical character*) orang Sunda. Seperti dikatakan oleh beberapa orang Bima yang diwawancarai dalam penelitian, soal etnisitas adalah sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan. Landasan utama dan terpenting untuk dipertimbangkan dalam suatu perkawinan ialah kesamaan agama. Tidak ada satupun dari mereka yang rela jika anak-anaknya kawin dengan orang berbeda agama.

Aspek identitas kesukubangsaan yang dikenakan kepada anak-anaknya, seperti digambarkan di atas, menunjukkan sikap moderat mereka terhadap masalah etnisitas cukup menonjol. Variasi identitas etnik anak-anaknya dipengaruhi oleh selain latar belakang etnik orang tuanya (bapak dan ibu), juga daerah (desa/kota) tempat lahir dan jenis kelamin anak. Perkawinan sebagai sarana interaksi, sarana hubungan kekerabatan dan sosial antar etnik tidak menjadi masalah bagi orang Bima di Cikupa. Berbeda dengan hal itu, perkawinan sebagai sarana interaksi antar agama sama sekali tidak diinginkan oleh mereka.

## KERUSUHAN Cikupa

### *KRONOLOGI PERISTIWA*

Dalam suatu masyarakat majemuk, meskipun didalamnya selalu ada unsur-unsur perekat yang menjadikannya sebagai suatu komunitas

yang utuh, namun sifatnya sebagai masyarakat terbelah (*divided society*) tidak mungkin hilang begitu saja. Masalahnya keterbelahan itu sendiri mengandung keunikan-keunikan tertentu yang dianggap bernilai tinggi oleh pendukungnya, bahkan dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan nilai lain. Kondisi demikian seringkali menjadi pertanda adanya superioritas dan inferioritas, sistem kami dan kamu, dan sejenisnya dalam kehidupan masyarakat majemuk.

“Kerusuhan Cikupa” (1979) yang melibatkan orang Bima dan masyarakat lokal (orang Sunda) mungkin saja tidak terlepas dari kondisi yang mempunyai kemiripan seperti diuraikan di atas. Dalam perkataan lain, secara internal dalam masyarakat majemuk di Cikupa memang sudah ada “stereotip etnik” yang berbeda-beda dari berbagai macam faktor sosial-budaya yang menjelaskannya. Perbedaan itu semakin diperjelas pula oleh tindakan pemerintah yang kemungkinan tujuannya untuk pembangunan (solidaritas sosial), namun tanpa disadari sebenarnya mengaktualkan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Kepeloporan Kepala Desa Talagasari yang membentuk klub sepakbola di kalangan orang Bima adalah contoh yang sangat menarik.

Dilihat dari segi sumbernya, kerusuhan Cikupa terjadi dari suatu persoalan yang pada awalnya tidak berkaitan dengan etnisitas. Menurut informasi kejadiannya di wilayah RT. 04 Desa Talagasari, dimulai dari adanya pencurian celana jeans (merek Levis) yang sedang dijemur oleh seorang yang diidentifikasi sebagai orang Bima. Hasil curian itu kemudian disimpan di tempat tinggal temannya (di rumah kontrakan “HA”). Sang maling itu sendiri meskipun orang Bima, tetapi sesungguhnya hanyalah berstatus tamu bagi temannya di kontrakan tersebut. Dia sendiri diketahui berdomisili di Tanjung Priuk, Jakarta. Penghuni kontrakan baru tahu bahwa temannya mencuri celana jemuran setelah penduduk lokal mencari di kontrakannya dan pelakunya yang juga dijumpai di sana dihajar oleh massa sampai babak belur. Warga Bima yang tinggal di RT.03 Talagasari datang meleraikan massa dan kemudian membawa si pelaku ke Puskesmas untuk berobat.

Kejadian itu sebenarnya sudah ditindak-lanjuti dengan proses perdamaian pada hari itu juga. Namun, rupanya keluarga yang dipukul (sang Maling) di Jakarta tidak mau menerima begitu saja dengan alasan telah terjadi main hakim sendiri atas anggota keluarganya. Malam hari itu juga sekitar jam 24.00, mereka secara berkelompok datang di wilayah RT. 04 Desa Talagasari dan melempar "bom Molotov". Pada malam itu sampai pagi hari tidak ada tanda-tanda respon balik dari penduduk lokal terhadap pelemparan bom Molotov. Keadaan di wilayah Talagasari tampaknya tenang. Namun, selepas siang hari kira-kira jam 14.00 terjadi kebakaran di wilayah RT.04, tepatnya di rumah kontrakan "HA". Rumah kontrakan yang berjumlah 63 petak, dengan ukuran setiap petak sekitar 6 x 9 meter, terbakar sebanyak 6 petak. Mendengar rumah kontrakannya terbakar, "HA" mengirim orang untuk mengecek kejadian sebenarnya. Sebagai antisipasi semua yang mengontrak di sana, juga mereka yang mengontrak di rumah-rumah kontrakan di RT. 03 yang kebetulan semuanya orang Bima diminta agar mengungsi dulu ke tempat yang dianggap aman. Mereka kemudian mengungsi ke RT. 013 ("kampung Bima"). Hanya saja pengungsian mereka dipersepsikan oleh penduduk lokal bahwa mereka mengatur strategi balas dendam.

Beberapa hari setelah kejadian pembakaran rumah kontrakan "HA" di kantor Kecamatan Cikupa diadakan kembali pertemuan untuk "perdamaian" yang dihadiri selain Pejabat Muspika, Kepala Desa Talagasari dan aparatnya, juga tokoh-tokoh masyarakat lokal dan Bima serta ulama setempat. Musyawarah itu menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain, memandang peristiwa itu "bukan konflik antar etnik, tetapi peristiwa kriminal biasa". Hanya saja pada malam harinya, terjadi lagi kebakaran rumah kontrakan milik penduduk lokal. Jumlah yang terbakar sekitar 10 pintu dan semua penyewanya juga terdiri atas masyarakat warga Bima. Kejadian itu, menurut seorang warga Bima, orang Bima yang tinggal di sana adalah ibarat "jatuh ketimpa tangga". Maksudnya mungkin sekali tujuannya membalas, tetapi ternyata yang kena orang-orang Bima juga.

Walaupun dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa, namun membuat pemerintah setempat turun tangan. Masalahnya ada "tendensi"

akan berbuntut kepada kerusuhan sosial etnik yang lebih luas apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, segera didatangkan petugas keamanan dari kesatuan TNI dan POLRI. Meskipun “hari-hari yang mencekam” dari peristiwa itu hanya sekitar 3 (tiga) hari, namun petugas keamanan yang ditugaskan di Cikupa untuk berjaga-jaga baru ditarik kembali setelah kurang lebih 1 bulan sejak ditempatkan.

### *STEREOTIP Etnik*

Kerusuhan itu memang sudah berlalu dan sudah selesai ataupun diselesaikan, kedamaian dalam merengkuh kehidupan bagi masyarakat Cikupa, khususnya warga etnik Bima di Talagasari, juga tampak kembali seperti sebelumnya. Realitasnya begitu yang dapat disaksikan. Dampak aktualnya juga sudah diketahui yaitu adanya pembakaran rumah kontrakan. Kebakaran di rumah kontrakan HA (Bima) yang sebenarnya hanya menghabiskan sekitar 6 dari 63 pintu (petak), oleh pemiliknya tidak lagi dibangun atau direnovasi kembali. Sebaliknya bangunan yang masih sisa dibongkar semuanya, bahan-bahannya yang masih bagus sudah dijual oleh penjaga di sana, sedangkan tanahnya pada saat ini sudah dijadikan kebun singkong oleh penduduk lokal.

Dengan kejadian tersebut ternyata masih menyisakan dampak lain bagi masyarakat, baik penduduk lokal maupun warga Bima. Dampak yang dimaksud berupa persepsi keetnikan yang cenderung mengarah kepada dimensi negatif dari stereotip etnik (*ethnic stereotype*). Hal itu sebenarnya bukanlah suatu persoalan sepanjang hanya menjadi wacana pengetahuan kebudayaan dengan tujuan memperluas pengertian akan kodrat perbedaan-perbedaan dalam masyarakat majemuk, masyarakat satu bangsa dan negara. Masalahnya menjadi lain karena dengan kejadian itu dijadikan dasar untuk suatu penilaian negatif tentang status kebudayaan etnik. Timbul penghakiman atas budaya etnik sebagai sesuatu yang tidak layak, tidak pantas, tradisional, dan sebutan lain yang bernuansa jauh dari kepatutan.

Dengan kata lain, pencurian celana jeans (Levis) sebagai penyebab konflik (1997) ternyata di kalangan sebagian masyarakat lokal hanya sebagai pemicu saja. Sesungguhnya, kejadian seperti ini sudah beberapa kali terjadi dan jenis barang curian bermacam-macam, dari pakaian sampai kepada tanaman. Orang Bima dianggap membawa kebudayaan etniknya dari kampung halaman yang tidak sesuai kondisi masyarakat setempat (Cikupa). Menghadapi kondisi seperti itu warga masyarakat lokal yang sudah menurun pula kesabarannya menjadikan pencurian celana jeans itu sebagai “momentum” peringatan. Terlepas apakah kebiasaan bawaan itu memang ada atau tidak ada dalam kehidupan orang Bima di Talagasari, Cikupa, namun dipersepsikan demikian oleh sebagian masyarakat lokal.

Dalam ruang kemasyarakatan yang lebih luas, dengan adanya “kerusakan Cikupa” timbul pula persepsi stereotip etnik orang Bima, seperti orang Bima itu galak, tidak tahu diri sebagai pendatang dan tidak mau menghargai adat-istiadat orang lain. Mereka tinggal mengumpul, terutama di RT 013, karena tidak mau bergaul dengan orang-orang lain, mereka kurang dan/atau tidak punya toleransi terhadap orang yang bukan dari kelompoknya. Meskipun dari penelitian lapangan tidak ditemukan adanya seseorang yang menyatakan ada korban jiwa dalam kerusakan yang terjadi, tetapi ada warga masyarakat di luar Cikupa seperti di Tangerang menyatakan ada seorang meninggal dalam peristiwa itu. Dari sini tampak dengan jelas bahwa suatu peristiwa konflik sosial yang kemudian tersebar menjadi pengetahuan publik seringkali ditambah muatan-muatan yang bersifat rekaan, imajinatif, isu-isu yang bertolak-belakang dari kenyataan yang sebenarnya. Isu-isu seperti itulah yang justru seringkali menjadi pemicu konflik sosial yang lebih besar. Bagi orang Bima sendiri, mereka mempersepsikan bahwa masyarakat lokal memang suka membesar-besarkan masalah saja. “Pencurian dilakukan oleh individu, tetapi disebar sebagai perbuatan orang Bima”.

Mungkin karena “kerusakan Cikupa” dianggap sesuatu yang memalukan, orang Bima tidak banyak komentar. Namun, ada dari mereka memberikan semacam “analisis” berdasarkan stereotip etnik mengapa ada pembelaan dari “keluarga”. Analisisnya dihubungkan

dengan latar belakang sosial budaya. Disebutkan pencuri itu, asal usulnya di Bima berasal dari suatu desa di Kecamatan Belo yang kehidupan penduduknya miskin. Di daerah itu, sejak dahulu (zaman penjajahan kolonial Belanda) ada suatu tradisi masyarakat yang memang suka terlibat dalam “perkelahian” atau “tawuran” antar komunal dan bahkan antar desa. Pada mulanya tradisi itu hanya permainan masyarakat, tetapi karena menghadapi Belanda akhirnya menjadi ajang pelatihan perang. Hanya saja setelah Belanda pergi tradisi itu tetap hidup di kalangan masyarakat sampai kini. Meskipun saat ini statusnya disebut kembali sebagai tradisi permainan rakyat

Tradisi “perang” atau “tawuran” itu disebut “*ncao*” jika hanya melibatkan seorang individu dengan individu lainnya. Apabila melibatkan banyak orang, antar masyarakat desa, disebut dengan istilah “*ndempa*”. *Ndempa* biasanya dilakukan pada musim kemarau dan melibatkan warga satu desa melawan satu atau beberapa desa lain. Lokasi pelaksanaan di wilayah batas desa. Pelaksanaannya didahului suatu perjanjian dan sebenarnya diawali lebih dulu oleh perkelahian anak-anak kecil, kemudian berlanjut kepada orang dewasa, orang tua. Prosesnya sampai ke orang tua/dewasa bisa 2 sampai 3 hari. Waktu perkelahian biasa dari pagi sampai sore hari.

Meskipun disebut permainan dan menggunakan tangan kosong, *ndempa* dilakukan secara sungguh-sungguh dalam pengertian akibat tawuran itu bisa menimbulkan korban. Dahulu bisa sampai meninggal, pada saat sekarang sampai luka-luka saja. Tawuran hanya dilakukan di lokasi yang sudah ditentukan, sehingga warga antar desa yang berbeda dan pernah terlibat tawuran jika bertemu di luar lokasi itu, misalnya di jalan-jalan desa, tidak akan terjadi sesuatu. Komunikasi mereka berjalan biasa, demikian pula hubungan sebagai kolega, teman, langganan, dan lain sebagainya. Biasa terjadi di lokasi *ndempa* mereka bertindak sebagai lawan, setelah itu bersama-sama tidur dalam satu pondok untuk menjaga kebun. Dalam pelaksanaan *ndempa* itu ada penonton dari setiap desa yang terlibat, mereka tidak akan terganggu oleh permainan tawuran itu. Peserta tawuran sendiri punya tanda, seperti dengan kain ke atas, celana digulung.

Terlepas dari akibatnya, dengan adanya ndempa itu masyarakat suatu desa, apalagi keluarga, merasakan eratnya jalinan rasa persaudaraan mereka. Perasaan seperti itu tetap ada meskipun sudah berada di rantau. Malahan bisa terjadi, kalau di kampung halaman pernah terlibat dalam permusuhan, di rantau menjadi kawan seperjuangan. Mungkin saja adanya pembelaan dari keluarga merupakan suatu "keharusan" bagi mereka sebagai bagian dari tradisi ndempa yang berlanjut dalam bentuk lain di perantauan.

## PENUTUP

Studi hubungan antar etnik menyangkut selain persoalan yang hubungan antar individu dan/atau kelompok warga suatu etnik dengan yang lainnya ternyata juga berhubungan dengan faktor-faktor seperti kehidupan ekonomi, politik dalam berbagai tingkatannya, kegiatan sosial dan organisasi, kekerabatan, pendidikan dan lain sebagainya. Intensitas dan hirarkis makna suatu hubungan antar etnik ternyata sangat tergantung kepada kondisi dimana hubungan antar etnik itu berlangsung, proses-proses hubungan yang terjadi dan bagaimana warga suatu etnik menyikapi keadaan dari persoalan dan faktor-faktor tersebut.

Hubungan antar etnik di Cikupa yang melibatkan didalamnya warga Bima dengan warga masyarakat lokal, pada dasarnya tercipta dalam kondisi yang disebutkan di atas. Dalam realita, individu maupun kelompok dapat dianggap oleh warga kelompok lain sebagai representasi etniknya. Persoalan perkawinan dua orang yang berbeda sukubangsa, misalnya, yang sebenarnya hanya melibatkan dua individu, ternyata dalam konstruksi sosial budaya menghubungkan selain antar masing-masing keluarga, juga dua kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budayanya. Ketika perkawinan itu telah berkembang sebagai suatu kelompok kekerabatan baru, dalam pengertian telah menjadi keluarga batih (*nuclear family*) yang lengkap – suami, isteri ditambah anak-anak – maka kedudukan anak dilihat dalam konteks hubungan antar etnik sebenarnya adalah faktor integratif yang kuat. Dalam pengertian anak-anak adalah hasil dari suatu proses interaksi

etnik. Walaupun demikian, ketika sang anak atau orang tuanya ditanya mengenai status etnik anaknya mungkin akan bingung sehingga jawabannya tidak jelas.

Sebagai pendatang dengan tujuan khusus bekerja di bidang industri untuk menunjang kehidupan ekonominya, maka persoalan hubungan antar etnik dalam aspek ekonomi antara orang Bima dan warga etnik lainnya tidak banyak terjadi secara langsung. Dalam kondisi seperti ini faktor perusahaan menjadi media interaksi, bukan saja menghubungkan orang Bima dengan orang Sunda semata, misalnya, tetapi juga dengan orang-orang dari etnik lain yang bekerja pada perusahaan industri yang sama. Pola hubungan etnisitas secara tidak langsung terjadi melalui saluran atau jaringan kerja. Oleh karena terbatasnya saluran interaksi langsung melalui ekonomi bagi warga Bima di Cikupa maka dapat diperkirakan sumber konflik etnik dari aspek kehidupan ekonomi sangat kurang pula.

Keterlibatan orang Bima dalam hiruk-pikuk kehidupan politik nasional memang terjadi. Hanya saja karena keterlibatan mereka yang berdiam di Cikupa terbatas pada tingkat kecamatan saja maka gaungnya dalam interaksi dan konflik perpolitikan nasional tidak terdengar. Di Cikupa mereka biasa berhubungan dengan siapa saja, dari bermacam-macam partai dan orang-orang dari berbagai etnik. Dalam politik pemerintahan tingkat desa, terutama dalam kaitannya dengan pemilihan kepala desa peran orang Bima, dalam kapasitasnya sebagai kolektif etnik, menjadi sesuatu yang sangat menentukan. Dilihat dari segi etnik jumlah mereka memang bukan yang terbanyak, mungkin kedua terbanyak, tetapi dalam posisi tersebut sangat dibutuhkan sebagai faktor penentu, walaupun tidak adalah faktor penyeimbang. Oleh karena itulah setiap calon dan/atau kepala desa yang terpilih akan selalu berbaik-baik dengan mereka. Kalau perlu urusan orang Bima biarlah diurus oleh mereka sendiri, seperti terjadi saat ini.

Sebagai masyarakat perantau, berasal dari masyarakat yang masih menghargai nilai-nilai etnisitas sebagai nilai kodrati yang tidak dapat dilepaskan begitu saja, orang Bima di Cikupa ternyata tidak pula

melupakan kelompok etniknya. Kesadaran etnik muncul dalam berbagai kegiatan organisasi sosial sesama orang Bima. Selintas memang tampak suatu bentuk eksklusifitas, namun ternyata kegiatan sosial nyata dari program-program organisasinya melintasi batas etniknya sendiri. Dalam wilayah yang lebih terbatas di Cikupa partisipasi sosial mereka tidak ketinggalan. Bahkan kadang-kadang kepeloporannya justru menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi semua tanpa didistorsi oleh isu eksklusifitas organisasi etnik.

“Kerusuhan Cikupa” atau apapun namanya, bagi masyarakat warga Bima di Talagasari, Cikupa adalah sebuah “kecelakaan”. Kejadiannya seketika, sama sekali di luar konsep, referensi mereka sebagai kolektif etnik. Peristiwanya memang sudah diklamasi sebagai hanya “kriminal biasa”. Itulah cara petinggi setempat (pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat) dalam melihat persoalan tersebut dan tidak mustahil sebagai taktik dan strategi untuk meredam agar tidak tersebar dan meluas. Dalam kasus itu, anggapan “kriminal biasa” cukup handal karena sebelumnya memang tidak ada gejolak, keresahan, kerisauan, tindakan sosial yang menjadi tanda-tanda akan adanya peristiwa tersebut. Hal itulah yang membedakannya dengan berbagai kerusuhan (etnik) lain di tanah air, seperti di Ambon dan Kalimantan Barat. Meskipun demikian, peristiwa itu membawa pula dampak munculnya pandangan negatif tentang “stereotip etnik” dari dan terhadap masing-masing kelompok. Mudah-mudahan hal itu hanya merupakan persepsi sementara saja.

Desa-desa lainnya ialah Cikupa, Sukamulya, Bunder, Sukadamai, Pasirjaya, Pasirgadung, Talaga, Sukanegara, Cibadak, Bojong, Budimulya, Bitungjaya dan Dukuh.

Informasi diperoleh dari wawancara dengan beberapa pengurus IKRA Bima, Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang. IKRA adalah "Ikatan Keluarga Wera Bima", sebuah organisasi para perantau Bima yang berasal dari Kecamatan Wera. IKRA baru saja menyelenggarakan musyawarah ke VIII, di Balikota Jakarta Selatan, pada tanggal 30 Juli 2000.

Persepsi seperti itu muncul dari warga Desa Talagasari yang dalam kehidupan sehari-hari kurang berhubungan langsung dengan warga masyarakat Bima. Namun, mereka mengetahui bahwa kebanyakan orang Bima di Talagasari tinggal secara berkelompok di wilayah tertentu desa itu.

Misalnya, dalam kegiatan IKRA (Ikatan Keluarga Wera) yang mengadakan musyawarah anggota (MUSRA) ke VIII pada tanggal 30 Juli 2000 diundang pula 2 orang anggota BMMB Jabotabek dan 5 orang dari RKB untuk ikut serta sebagai peninjau MUSRA IKRA tersebut.

Cerita yang dipaparkan di sini hanyalah salah satu versi dari beberapa versi kejadian yang diinformasikan oleh beberapa informan ketika penelitian lapangan dilakukan.



Mely G. Tan. 1995. *Hubungan Mayoritas-Minoritas Dalam Masyarakat Majemuk: Suatu Masalah Integrasi Sosial*, Jakarta, Proyek Pengkajian Dinamika Sosial Budaya Dalam Proses Industrialisasi, LIPI.

Suparlan, Parsudi. 1999. "Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya", dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*. 23 (59) 1-19.

### **BAB III**

## **MASYARAKAT BETAWI SEBAGAI PENDUDUK ASLI DI BEKASI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENDATANG**

Oleh Rochmawati

Perbedaan yang ada di antara kebudayaan-kebudayaan suku bangsa yang ada di Indonesia pada hakekatnya adalah perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan sejarah kebudayaan masing-masing. Puncak dari kebudayaan tersebut merupakan konfigurasi dari masing-masing kebudayaannya sendiri, yang memperlihatkan adanya persamaan prinsip dan saling menyesuaikan satu sama lainnya yang telah menjadi landasan bagi terciptanya kebudayaan nasional Indonesia. Sehingga kemajemukan dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika bukan hanya menjadi ucapan penghias bibir saja, tetapi betul-betul menjadi landasan dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan melihat peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun, telah mendorong terjadinya perubahan kependudukan, terutama pada masyarakat asli sebagai akibat dari datangnya penduduk pendatang ke suatu wilayah. Begitu juga dengan pembangunan kawasan dan komplek perumahan baru yang terus berkembang, sarana dan prasarana transportasi dan pemukiman, serta kawasan industri terus mengalami pertumbuhan. Semuanya itu mengakibatkan terjadinya perubahan kependudukan, seperti yang terjadi di wilayah penelitian ini, yaitu di daerah Bekasi Selatan, di mana penduduk aslinya adalah masyarakat Betawi yang mulai terdesak oleh penduduk pendatang.

Oleh karena itu, fokus penelitian tahun ini adalah hubungan atau interaksi sosial antara penduduk asli Bekasi Selatan dalam hal ini yaitu masyarakat suku Betawi dengan para pendatang.



atas laki-laki 8.162 orang, sedangkan penduduk perempuannya berjumlah 8.255 orang. Dari jumlah penduduk sebesar 16.417 orang itu terdapat warga negara asing tiga orang (laki-laki dua orang dan perempuan satu orang). Apabila ditinjau dari asal-usul para pendatang, sebenarnya sangat beragam, di antaranya yaitu dari etnis Sunda, Jawa, Lampung, Palembang, Batak, Madura, Ambon dan Cina. Jika dilihat dari komposisi penduduk pendatang, jumlah terbanyak adalah mereka yang berasal dari etnis Sunda. Hal ini tidaklah mengherankan sebab wilayah Bekasi termasuk daerah Jawa Barat di mana mayoritas penduduknya berasal dari etnis Sunda. Selain etnis Sunda, penduduk pendatang yang terbanyak di wilayah penelitian ini berasal dari etnis Batak, Sumatera Utara.

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan agama, terdiri atas penduduk yang beragama Islam berjumlah 11.543 orang, Kristen 3.165 orang, Katolik 1.378 orang, Hindu 13 orang, dan Budha 154 orang. Seperti pada umumnya kecenderungan beragama di kalangan etnis Betawi, tidaklah mengherankan kalau pemeluk agama Islam merupakan jumlah terbanyak di kelurahan ini. Seperti diketahui, pada umumnya masyarakat Betawi adalah pemeluk Islam yang relatif taat dan patuh pada ajaran agamanya. Pemeluk agama Islam yang lain berasal dari sebagian para pendatang. Oleh karena hampir bisa dipastikan bahwa pemeluk agama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha adalah penduduk yang berasal dari kalangan pendatang.

Jika ditinjau dari jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya, dari data kelurahan terlihat bahwa ada sekitar 150 orang murid Taman Kanak-kanak, SD 1200 orang, SMP/SLTP 1500 orang, SMA/SLTA 2000 orang, Akademi (D1-D3) 500 orang, dan Sarjana 150 orang.

Di daerah penelitian ini, masyarakat Betawi sebagai penduduk aslinya sangat taat beribadah sehingga tidak mengherankan banyak di antara mereka yang menyelesaikan pendidikannya melalui jalur pendidikan keagamaan. Walaupun anak-anaknya mengikuti pendidikan pada jalur pendidikan umum, pendidikan di jalur agama masih tetap

dipertahankan sebagai pelengkap. Seperti contoh pagi hari anak-anak mengikuti sekolah umum, sore hari mengikuti pendidikan agama seperti Sekolah Madrasah dan begitu seterusnya. Seperti disampaikan oleh beberapa responden, di antara masyarakat Betawi pada masa sekarang di lingkungannya cukup banyak yang dapat menyelesaikan pendidikan S-1 dan sebagian besar dari mereka menyelesaikannya di perguruan tinggi yang bernafaskan agama dalam hal ini tentu saja agama Islam seperti di IAIN. Jadi dalam hubungan ini jelas sekali bahwa masyarakat Betawi walaupun pendidikannya sudah bisa mencapai perguruan tinggi namun faktor keagamaan masih mereka pertahankan.

Begitu juga dengan lingkungan di mana mereka tinggal, selain terdapat bangunan sekolah umum terdapat juga bangunan pondok pesantren yang bergerak dalam bidang pendidikan dan panti asuhan, dan madrasah-madrasah. Hal ini mencerminkan betapa kuatnya masyarakat Betawi mempertahankan unsur agama dalam pendidikan bagi anak-anak mereka. Lulusan pendidikan pondok pesantren misalnya, termasuk cukup banyak jumlahnya yaitu ada sekitar 75 orang, sedangkan mereka yang berhasil menyelesaikan pendidikan madrasah berjumlah 400 orang.

Bila dilihat dari mata pencaharian penduduk di wilayah kelurahan ini sangat bervariasi mengingat banyaknya penduduk pendatang. Hal ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
1.	Pegawai Negeri Sipil	2.020	24,1
2.	ABRI	201	2,4
3.	Swasta	5.676	67,8
4.	Wiraswasta/pedagang	192	2,3
5.	Tani	29	0,4
6.	Pertukangan	10	0,1
7.	Buruh Tani	8	0,1
8.	Pensiunan	162	1,9
9.	Pemulung	26	0,3
10.	Jasa	51	0,6
<b>Jumlah</b>		<b>8.375</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Monografi Desa/Kelurahan Jaka Mulya, tahun 1999

Kalau dilihat pada tabel di atas, pekerjaan sebagai pegawai swasta merupakan jumlah terbesar, yaitu mencapai 5.676 orang atau 67,8 persen. Hampir semua yang bekerja di kantor swasta ini adalah para pendatang, karena tingkat pendidikan mayoritas masyarakat Betawa yang relatif rendah, sulit bagi mereka untuk bersaing dan bekerja di sektor ini. Sedangkan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) menduduki peringkat kedua dengan jumlah 2.020 orang. Mereka yang bekerja di sektor ini selain penduduk pendatang ada juga penduduk masyarakat Betawi, hanya sayangnya tidak ada data yang menunjukkan jumlah yang pasti berapa orang penduduk asli Betawi yang bekerja di sektor PNS. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara diakui oleh para responden bahwa banyak di antara masyarakat Betawi yang bekerja sebagai PNS pun harus bersaing dengan para pendatang yang tingkat pendidikannya relatif lebih tinggi.

Sementara itu yang bekerja sebagai anggota TNI dan Polri (ABRI) ada sekitar 201 orang. Bahkan ada salah seorang dari putera Betawi yang berhasil sebagai Kapolsek di wilayah Bekasi Selatan. Selain itu, tabel di atas juga menunjukkan ada sekitar 29 orang yang bekerja di sektor pertanian/petani yang pada umumnya adalah mereka yang berasal dari penduduk asli yaitu masyarakat Betawi. Mereka yang tidak berpendidikan dan pada umumnya sudah berusia lanjut memilih untuk mempertahankan mata pencaharian sebagai petani. Sedangkan yang terkecil jumlahnya adalah mereka yang bekerja sebagai buruh tani sekitar 8 orang. Menurut responden, angka ini adalah jumlah pendatang yang bekerja pada masyarakat Betawi yang masih memiliki lahan atau tanah cukup luas. Sedangkan jenis pekerjaan lainnya seperti di sektor jasa, pemulung, pensiunan, pertukangan dan wiraswasta/pedagang sebagian berasal dari penduduk pendatang.

## **LATAR BELAKANG SOSIAL MASYARAKAT BETAWI**

Seperti telah diuraikan di atas masyarakat Betawi merupakan masyarakat agamis yang sangat taat dan patuh pada ajarannya. Selain itu, menurut sebagian responden, masyarakat Betawi memiliki sifat yang relatif buruk yaitu cenderung tidak pernah memikirkan orang lain. Di samping itu, masih menurut responden, mereka selalu beranggapan bahwa dirinya mampu untuk melakukan sesuatu tidak perlu dibantu oleh orang lain. Tetapi dalam kenyataannya seringkali mereka sebenarnya tidak mampu. Seperti contohnya berdasarkan pengakuan beberapa responden, dan juga atas dasar pengamatan lapangan, di wilayah kelurahan ini khususnya di perkampungan belum ada jalan dan gang yang teratur dari halaman rumah yang satu ke halaman rumah yang lain. Yang ada hanyalah tanda pembatas, yang menunjukkan ini rumah si A atau ini rumah milik si B dan seterusnya.

Dengan kondisi seperti itu maka para aparat setempat dalam hal ini seperti ketua RT maupun RW, menghimbau masyarakatnya untuk memikirkan pembuatan gang (jalan kecil) yang dapat dilalui paling tidak oleh para pejalan kaki dan sepeda motor. Dari masing-masing warga

diharapkan merelakan sedikit tanahnya untuk dibuat jalan, untuk kepentingan bersama. Namun sampai penelitian ini dilakukan himbauan dari aparat setempat nampaknya belum bisa direalisasikan. Di sini terlihat bahwa walaupun masyarakat Betawi taat beribadah seperti shalat dan mengaji, tetapi mereka juga sudah mulai memperhitungkan kerugian jika tanah mereka direlakan begitu saja untuk pembuatan jalan tanpa ganti rugi sama sekali.

Menurut sebagian responden, pada dasarnya masyarakat Betawi ini memiliki sifat egois yang tinggi dan cenderung tidak mau tersaingi oleh orang lain, padahal mereka relatif tidak mempunyai kemampuan untuk mendukungnya. Sebagai contoh hal tersebut dapat kita lihat pada masyarakat yang bermata pencaharian sebagai tukang ojek. Pada awalnya masyarakat Betawi yang tidak berpendidikan merasa gengsi apabila harus bekerja sebagai tukang ojek, namun setelah melihat para pendatang yang bekerja sebagai tukang ojek dan "berhasil", barulah masyarakat Betawi ini mulai berfikir mengapa tidak mencobanya. Sementara itu orang lain seperti pada umumnya dari kalangan pendatang bisa bekerja secara gigih sebagai tukang ojek. Pada akhirnya masyarakat Betawi mulai berfikir atas segala kekurangannya dan selalu berusaha membuka diri terhadap perubahan sebagai akibat kehadiran para pendatang.

Walaupun masyarakat Betawi cenderung mempunyai sifat egois, tetapi untuk mengikat hubungan sosial di antara sesama warga, maka dibentuklah berbagai macam kegiatan di antaranya ada yang dinamakan arisan tenda, arisan kondangan (lihat pola perkawinan, pada bab III), arisan beras, dan arisan keluarga. Kegiatan ini ditujukan kepada penduduk asli (masyarakat Betawi) dan pendatang yang sudah menetap dalam arti sudah memiliki rumah sendiri. Sedangkan para pendatang yang masih berstatus sewa/kontrak tidak diperkenankan mengikuti kegiatan tersebut karena dianggap akan mempersulit kegiatan tersebut.

Menurut penuturan responden, sifat egois masyarakat Betawi juga terlihat pada acara hajatan. Apabila seorang warga, baik yang berasal dari pendatang maupun masyarakat Betawinya sendiri, mau

mengadakan hajatan, biasanya pihak pengundang cukup memberikan undangan saja. Namun bagi masyarakat Betawi hal ini tidak cukup dan bahkan mereka merasa tersinggung sikap si pengundang. Biasanya masyarakat Betawi akan merasa terhormat apabila sebelum diberi undangan pihak sipengundang datang terlebih dahulu untuk mengutarakan niatnya sambil memohon kesediaannya untuk hadir pada acara hajatan tersebut. Setelah itu baru diberi undangannya. Namun demikian kebiasaan atau tradisi yang satu ini sudah mulai luntur dengan kehadiran para pendatang dan pada akhirnya mereka bahkan banyak belajar cara-cara bermasyarakat yang baru kepada para pendatang.

Selain kegiatan tersebut, masyarakat Betawi masih memiliki ikatan hubungan sosial lainnya yakni berupa pengajian, baik yang diselenggarakan oleh bapak-bapak maupun para ibu-ibu. Kegiatan inipun diikuti tidak hanya oleh masyarakat Betawi saja melainkan juga para pendatang yang beragama Islam dan memang berminat untuk mengikutinya. Jika dilihat dari intensitasnya, kegiatan pengajian para ibu nampaknya lebih aktif jika dibandingkan dengan pengajian para bapak.

Hubungan sosial lainnya di antara masyarakat Betawi adalah melalui upacara kematian. Mereka masih memegang teguh tradisi seperti acara tahlilan dari mulai hari pertama, ketiga, seminggu, empat puluh hari dan seterusnya. Yang menarik dalam acara tahlilan ini adalah bahwa pada saat upacara tahlilan selesai, para tamu disuguhi makanan berupa nasi dan lauk-pauk yang ditaruh di atas tampah yang terbuat dari kaleng, dan dimakan oleh tiga orang secara bersama-sama. Tradisi ini masih berlangsung ketika penelitian ini dilakukan. Dengan kehadiran para pendatang, masyarakat Betawi mempunyai satu tambahan kegiatan yang tidak pernah dialami sebelumnya yaitu sebagai pembaca doa atau pembaca Al Quran bila ada warga pendatang yang meninggal. Apabila ada di antara para pendatang yang anggota keluarganya yang meninggal, maka beberapa warga Betawi akan dipanggil oleh keluarga pendatang untuk mengisi acara tahlilan ataupun mengaji, dan pada umumnya mereka selain memperoleh makanan, juga uang sebagai jasanya.

Kebiasaan baru ini pada umumnya dilakukan oleh para pendatang yang bertempat tinggal di kompleks-kompleks perumahan.

## Aspek-Aspek INTEGRASI Sosial

### 1. Kehidupan Ekonomi

Kalau dilihat dari kehidupan ekonomi sehari-hari masyarakat Betawi di Bekasi tampaknya relatif maju. Hal ini merupakan salah satu dampak positif dari interaksi mereka dengan para pendatang dari berbagai daerah yang memilih bertempat tinggal di Bekasi. Seperti diketahui, masyarakat Betawi yang merupakan penduduk "asli" di beberapa kawasan di Bekasi, dikepung oleh pemukiman para pendatang, baik dalam bentuk kompleks-komplek perumahan maupun para pendatang yang memilih areal perkampungan dan bertetangga dengan masyarakat Betawi. Secara umum para pendatang yang memilih hidup berdampingan dengan masyarakat Betawi dapat dibedakan atas dua kecenderungan, yaitu mereka yang mengontrak rumah penduduk asli, dan sebagian lagi adalah mereka yang membeli tanah kemudian membangun rumah di atasnya.

Dengan banyaknya para pendatang, baik yang tinggal di perumahan maupun di perkampungan, ternyata secara ekonomis sangat menguntungkan masyarakat Betawi setempat. Hal ini bisa dilihat dari kecenderungan para pendatang untuk berbelanja keperluan dapur pada "pasar kaget" di sekitar pemukiman yang pada umumnya merupakan hasil kebun dari masyarakat setempat. Dengan demikian masyarakat Betawi setempat bisa memperoleh keuntungan ekonomis dari kehadiran para pendatang di lingkungan mereka melalui penjualan produk perkebunan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Seperti pada umumnya masyarakat asli, masyarakat Betawi di Bekasi pun dikenal memiliki tanah yang luas. Ketika para pendatang makin banyak dan penduduk makin padat, maka dengan sendirinya nilai ekonomi dan harga tanah menjadi sangat mahal, sehingga orang-orang Betawi di Bekasi pun menjadi tuan tanah. Dengan memiliki tanah yang

luas, mereka merasa tenang sebab lahan tersebut berfungsi ganda. Selain digunakan untuk tempat tinggal, tanah yang kosong pada umumnya ditanami tanaman yang bernilai ekonomi, sehingga nantinya akan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Pada masa lalu hasil perkebunan masyarakat Betawi seperti buah salak, durian, kecap, dan sayuran seperti daun singkong, dipasarkan ke tempat yang relatif jauh yakni ke pasar yang terletak di kawasan Jatinegara Jakarta. Biasanya mereka membawa hasil kebunnya dengan menggunakan sepeda, sehingga pada umumnya mereka bisa menghabiskan waktu satu hari penuh untuk memasarkan produk perkebunannya mengingat perjalanan yang harus ditempuh sangat jauh dari rumah mereka. Dari hasil penjualan produk perkebunan itu mereka membiayai kebutuhan sehari-hari seperti beras, garam dan lauk pauk. Pada umumnya mereka menjual hasil kebunnya dilakukan tidak setiap hari melainkan satu minggu sekali, begitu juga dengan belanja kebutuhan sehari-harinya dilakukan sekali dalam seminggu, yaitu ketika memasarkan produk perkebunan mereka.

Penjualan produk perkebunan di pasar ini merupakan kesempatan bagi masyarakat Betawi untuk berinteraksi dengan berbagai masyarakat etnis lain. Transaksi perdagangan seperti ini telah berlangsung sejak masyarakat Betawi menyebar di Bekasi sampai pada awal tahun 1970-an. Namun mulai periode 1970-an itu masyarakat Betawi Bekasi tidak perlu lagi menjual hasil kebunnya jauh-jauh ke Jakarta sebab di wilayah Bekasi sendiri, tepatnya di daerah Kranji, mulai dibangun pasar sehingga memudahkan mereka untuk membawa dan menjual hasil kebunnya di pasar tersebut. Mereka tidak lagi satu minggu sekali menjual hasil kebunnya, tetapi tergantung dari berapa banyak hasil panen kebunnya itu dalam seminggu sehingga dalam satu minggu bisa 2 sampai 3 kali pergi ke pasar.

Sejak akhir 1970-an dan periode 1980-an, daerah Bekasi mulai diincar sebagai kawasan pemukiman bagi para pendatang dari luar, terutama mereka yang bekerja di Jakarta namun tidak mempunyai

kemampuan membeli rumah ataupun tanah di ibukota yang makin mahal. Masyarakat Betawi di Bekasi sangat diuntungkan dengan kehadiran para pendatang ini mengingat terbukanya peluang untuk memasarkan produk pertanian dan perkebunan kepada para pendatang. Selain hasil perkebunan, tanah merupakan komoditas utama yang menunjang kelangsungan hidup masyarakat Betawi Bekasi. Penjualan tanah kepada para pendatang sangat marak pada periode 1970-an dan pada umumnya hasil penjualan itu dipakai untuk naik haji ke Tanah Suci dan sebagian lagi digunakan untuk membeli barang-barang konsumtif. Pada mulanya ang hasil penjualan tanah itu tidak ditabung di bank, melainkan membeli hewan ternak seperti kambing dan kerbau. Apabila suatu saat ada tetangga sesama masyarakat Betawi yang mau menjual tanahnya bisa dibarter dengan kambing, atau dengan kerbau ditambah sejumlah uang. Begitulah cara masyarakat Betawi di Bekasi memanfaatkan hasil penjualan tanahnya.

Akibat cara investasi yang tradisional dan penggunaan uang yang cenderung konsumtif itu, maka kini sudah jarang anggota masyarakat Betawi Bekasi yang memiliki tanah lebih dari 1000 meter persegi. Sebaliknya, mereka yang memiliki tanah lebih dari 1000 meter persegi justru adalah para pendatang. Hal ini juga berkaitan dengan kenyataan bahwa pada masa lalu, jarang orang Betawi Bekasi yang memiliki pekerjaan tetap di luar pekerjaan pertanian dan perkebunan milik mereka masing-masing. Mereka cenderung hidup dari tanah warisan keluarga, sehingga ketika membutuhkan biaya untuk menyekolahkan anak misalnya, sumbernya adalah dengan menjual sebagian tanah milik mereka. Begitu juga ketika mereka memerlukan uang untuk biaya perkawinan, ataupun kebutuhan uang untuk menyuap dalam rangka mencari pekerjaan bagi si anak, maka satu-satunya sumber untuk memperoleh uang adalah dengan menjual tanah. Akibatnya, lama-kelamaan tanah-tanah warisan itu pun habis dan jatuh kepada para pendatang.

Selain keuntungan ekonomis dari penjualan hasil perkebunan, kehadiran para pendatang juga berpengaruh terhadap cara hidup dan cara pandang masyarakat Betawi di Bekasi. Pengaruh itu terlihat dalam

perubahan pemanfaatan uang hasil penjualan tanah yang tidak semata-mata hanya untuk naik haji dan pembelian barang konsumsi. Masyarakat Betawi Bekasi mulai berpikir untuk menyekolahkan anak-anak mereka yang kurang mendapat perhatian sebelum kehadiran para pendatang, walaupun kesadaran itu sendiri terlambat di mana tanah milik mereka sudah mulai habis. Bahkan para orang tua juga mulai berfikir untuk memberi semacam modal kerja kepada anaknya, baik yang statusnya bujangan maupun yang sudah berkeluarga tetapi masih menganggur, yaitu dibelikan sepeda motor untuk mencari nafkah sebagai tukang ojek.

Dewasa ini banyak di antara masyarakat Betawi di Bekasi yang menjadi tukang ojek. Tetapi jika dibandingkan dengan tukang ojek yang berasal dari para pendatang, tukang ojek dari penduduk asli ini tampaknya kalah gesit dan kurang gigih dalam mencari uang. Hal ini diakui dan sangat disadari oleh beberapa responden (tokoh-tokoh masyarakat Betawi yang diwawancarai). Para tokoh masyarakat Betawi itu mengatakan bahwa memang masyarakat Betawi ini pada dasarnya malas, jadi tidaklah mengherankan kalau mereka kalah bersaing dengan para pendatang. Hal itu juga terlihat dari jam kerja tukang ojek para pendatang yang relatif lebih banyak dibandingkan tukang ojek penduduk asli.

Kembali pada masalah kepemilikan tanah seperti telah diuraikan di atas, Masyarakat Betawi di Bekasi terbagi dua, yaitu mereka yang memiliki tanah tetapi tidak bisa menginvestasikannya sehingga lama-kelamaan tanahnya habis terjual. Yang kedua adalah mereka yang tanahnya luas namun tidak terjual habis karena hasil penjualan tanahnya selain untuk pergi haji atau untuk biaya pendidikan, sebagian dari hasil penjualannya mereka belikan lagi tanah di tempat lain yang lebih murah atau sawah di luar kecamatannya tapi masih di wilayah Bekasi. Oleh sebab itu ketika penelitian ini dilakukan banyak sekali toko/warung yang khusus menjual beras, padahal di kawasan tersebut tidak ada persawahan, yang ada hanyalah kebun-kebun. Jadi beras-beras tadi merupakan hasil dari pengolahan sawah masyarakat Betawi yang dimilikinya di tempat lain tetapi masih di wilayah Bekasi.

## 2. PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN

Agama Islam sebagai pedoman hidup utama bagi masyarakat Betawi dapat dikatakan sebagai konfigurasi dari kebudayaan Betawi. Keterbelakangan masyarakat Betawi antara lain disebabkan karena mereka cenderung menolak (anti) terhadap sekolah dan kemajuan, yang dianggap dibawa oleh kolonial Belanda yang kafir, dan karena itu sekolah dan kemajuan dianggap sama saja dengan kekafiran itu sendiri. Pandangan seperti tersebut di atas relatif tidak dianut lagi oleh orang-orang Betawi masa kini. (Supardi Suparlan dalam buku *Masalah-masalah Kebudayaan Tradisional, Kasus Orang Betawi*, Hal:5).

Seperti diketahui, masyarakat Betawi hampir selalu identik dengan masyarakat agamis, sebab kalau dilihat dari pendidikannya masyarakat Betawi jaman dulu bahkan sampai sekarang jenjang pendidikannya tidak terlepas dari unsur keagamaan. Kalau melihat pendidikan masyarakat Betawi pada generasi tua, mereka jarang yang berpendidikan tinggi, paling tinggi hanya sampai tingkat SD. Namun pada masa sekarang nampaknya Masyarakat Betawi sudah memahami betapa pentingnya arti pendidikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pada kalangan masyarakat Betawi mulai ada kemajuan, dalam arti kesadaran untuk sekolah atau menyekolahkan anak mereka sudah tumbuh.

Hal itu terlihat terutama di tiga kelurahan yang menjadi lokasi penelitian ini, yaitu Kelurahan Jaka Mulya, Jaka Setia, dan Jaka Sampurna. Namun kesadaran dan perubahan yang pesat baru tampak jelas sejak awal periode 1980-an, yakni ketika di wilayah mereka sudah mulai banyak para pendatang yang secara tidak langsung telah memberi dorongan atau memacu penduduk asli setempat untuk berkembang. Sejak saat itu masyarakat Betawi di daerah tersebut mulai sadar betapa pentingnya pendidikan. Hal lain yang berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat Betawi di daerah ini adalah kerja keras para

pendatang dalam mencari nafkah khususnya dan meningkatkan kualitas hidup pada umumnya.

Kalau dilihat dari segi pendidikan, pada jaman dulu masyarakat Betawi Bekasi ini selain berpendidikan rendah, dan berorientasi pendidikan agama seperti Madrasah, mereka juga hampir tidak memiliki kemauan untuk mengubah nasib. Seperti kita ketahui dan diakui oleh para responden, mereka mempunyai sifat pemalas sehingga untuk belajar atau mengecap pendidikan kejenjang lebih tinggi nampaknya agak sulit. Sejalan dengan itu, di ketiga wilayah kelurahan yang menjadi lokasi penelitian ini dahulu hanya ada satu sekolah, yaitu Sekolah Rakyat dan yang boleh bersekolah di sekolah tersebut pada umumnya golongan masyarakat Betawi yang benar-benar kaya atau dari kalangan Raden. Akibatnya, masyarakat Betawi yang berasal dari golongan biasa tidak mendapat kesempatan bersekolah disana. Tidak mengherankan apabila generasi tua dari masyarakat Betawi Bekasi ini pada umumnya hanya bisa membaca dan menulis huruf Arab.

Kini dengan adanya pengaruh positif dari kehadiran para pendatang, di lingkungan lokasi penelitian ini mereka yang berpendidikan SD hanya tinggal sebagian kecil saja. Sekarang sudah banyak yang berpendidikan tinggi bahkan sampai kejenjang perguruan tinggi. Banyak di antara keluarga masyarakat Betawi yang sudah menjadi sarjana dan pada umumnya bekerja di kantor pemerintah. Sebagian dari mereka yang berpendidikan sarjana dan mengambil bidang pendidikan pada umumnya menjadi guru, bahkan ada yang sudah berhasil menjadi kepala sekolah di lingkungan mereka. Ada juga sebagian dari mereka yang berpendidikan kepolisian, sehingga ada di antaranya yang menjadi Kapolsek di wilayah Bekasi Selatan. Sementara itu bagi mereka yang hanya berpendidikan SMP dan SMA, kalau tidak bisa diterima bekerja di lingkungan pemerintahan, pada umumnya mereka bekerja sebagai buruh di pabrik-pabrik yang ada di wilayah Bekasi.

Terlepas dari kemajuan yang dialami masyarakat Betawi dalam bidang pendidikan dengan segala macam disiplin ilmu yang mereka pelajari, di lokasi penelitian ini terdapat satu-satunya Yayasan

Pendidikan Pondok Pesantren "Almasaturiah" yang dikelola oleh tokoh-tokoh masyarakat Betawi setempat. Yayasan pendidikan yang berorientasi agama ini mayoritas gurunya adalah orang-orang Betawi juga. Kalau dilihat dari komposisi jumlah 14 orang guru yang mengajar pada yayasan tersebut, mereka terdiri atas guru-guru yang berasal dari etnis Sunda satu orang, etnis Jawa dua orang, dan selebihnya yaitu sebanyak 11 orang berasal dari masyarakat Betawi. Yayasan ini didirikan pada tahun 1997 dan bergerak di bidang pendidikan dan panti asuhan. Apabila dilihat dari jumlah muridnya yang berjumlah kurang lebih 200 orang, sebagian besar berasal dari masyarakat Betawi baik yang berasal dari lingkungan setempat maupun yang berasal dari luar kecamatan tetapi masih di wilayah Bekasi.

Sementara itu jika dilihat mata pencahariannya, pekerjaan masyarakat Betawi ternyata sangat bervariasi, yaitu:

1. Pegawai pemerintah, yaitu mereka yang umumnya berpendidikan relatif tinggi.
2. Pedagang, yaitu mereka yang bekerja di sektor perdagangan seperti menjual hasil kebunnya, atau membuka warung atau toko kelontong. Mereka yang berusaha di sektor perdagangan ini pada umumnya adalah generasi tua dan kurang lebih berusia 50 tahun ke atas.
3. Tukang ojek dan penjaga keamanan (satpam) di perumahan di sekitar tempat tinggal mereka. Pada umumnya mereka adalah putera Betawi yang berpendidikan relatif rendah.
4. Tukang cuci dan setrika atau pembantu rumah tangga di komplek-komplek perumahan yang pada umumnya terdiri atas perempuan Betawi yang berusia di atas 30 tahun.
5. Buruh pabrik. Mereka pada umumnya terdiri dari putera-puteri Betawi yang berpendidikan sekolah menengah, SMP dan SMA.

### 3. POLA PERKAWINAN

Tampaknya pola perkawinan tradisional masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Betawi walaupun tidak utuh lagi. Pada masa lalu diakui oleh beberapa responden bahwa memang betul di kalangan masyarakat Betawi ada pelapisan sosial, yaitu mereka yang berasal dari keturunan raden atau bangsawan, dan mereka yang berasal dari kalangan bawah atau rakyat biasa. Oleh karena itu di jaman dulu dalam hal perkawinan ini mereka masih mempertahankan budayanya yang didasarkan pada pembedaan status sosial tersebut. Ketika sebuah keluarga bangsawan memutuskan akan menikahkan salah seorang anggota keluarganya, maka calonnya harus berasal dari keluarga bangsawan atau raden juga. Akibat budaya itu maka di kalangan masyarakat Betawi berkembang semacam peribahasa yang mengatakan bahwa "orang duren pasti kawin dengan orang duren, tidak mungkin orang duren kawin dengan orang capi", yang artinya "orang kaya pasti akan kawin dengan orang kaya, tidak mungkin orang kaya kawin dengan orang miskin".

Akan tetapi dengan kehadiran para pendatang di lingkungan mereka dan juga interaksi sosial yang makin luas dengan berbagai kelompok etnis yang ada, cara pandang demikian secara berangsur-angsur berubah. Masyarakat Betawi sekarang tidak lagi mengharuskan anaknya kawin dengan sesama suku saja melainkan juga dengan suku atau etnis lain melalui perkawinan campur antar-etnis. Perubahan ini tampak sekali terutama setelah membanjirnya para pendatang di wilayah kelurahan-kelurahan ini yang mencapai puncaknya pada periode 1990-an.

Bagi mereka sekarang, tidak penting lagi dari mana asal usul etnis calon pasangan putera-puterinya, karena yang dianggap terpenting adalah mempunyai iman (agama) yang sama serta berpendidikan. Di kalangan masyarakat Betawi ada sebagian yang mempunyai prinsip bahwa walaupun seiman tetapi tidak berpendidikan maka si orang tua akan berfikir dulu, tidak akan cepat-cepat mengawinkan anaknya. Sebab menurut mereka semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka

semakin luas cara pandang dan pola berfikirnya pun semakin terbuka. Dengan bekal pendidikan yang cukup tinggi apabila terjadi sesuatu dengan dirinya, yang bersangkutan dapat memecahkan persoalannya sendiri dan Tuhan akan memberi jalan keluarnya.

Walaupun mereka sudah mengalami perubahan cara pandang dalam mengenai perkawinan, tetapi masih ada satu hal yang menarik dan tampaknya masih dipertahankan sampai sekarang, yaitu tradisi upacara perkawinan maupun khitanan. Apabila masyarakat Betawi mengadakan upacara perkawinan maupun khitanan maka para undangan diharapkan hadir dan memberikan kado (sekarang berupa uang). Jika untuk kado tersebut seseorang memberi uang Rp. 10.000, maka di dalam amplop tersebut selain ditulis nama, harus pula menyebutkan jumlah uang yang diberikannya. Sebab hal ini sangat penting bagi mereka karena pada saat si pemberi tadi mempunyai acara yang sama, diharapkan akan memperoleh pemberian jumlah uang yang sama dari si pengundang sebelumnya.

Selain itu, jika seseorang, katakanlah si A diundang oleh si B, dan secara kebetulan si B ini sudah mengadakan tiga kali pesta dan setiap kali pesta si A diundang dan datang terus, dan setiap kali datang memberikan uang sebesar Rp.10.000, maka si B harus memberikan jumlah yang sama yaitu Rp.30.000 (tiga kali Rp.10.000) apabila diundang dan hadir dalam pestanya si A. Kalau si B memberinya kurang dari Rp.30.000,- maka si B ini akan mendapat reputasi jelek pada masyarakat Betawi khususnya di lingkungannya, dan si A akan menjadi sakit hati gara-gara sikap si B tersebut. Tampaknya hal ini bukan hanya berlaku pada lingkungan masyarakat Betawi saja, sebab mulai diikuti pula oleh para pendatang di lingkungan mereka.

Perubahan juga berlangsung berkenaan dengan jangka waktu pesta itu sendiri. Pada masa lalu upacara perkawinan bisa diselenggarakan selama tiga sampai empat hari berturut-turut lengkap dengan keseniannya. Begitu juga dengan pakaian pengantinnya seperti contohnya untuk mempelai laki-laki berjubah dan bersorban seperti khatib Jum'at, dan ditambah dengan aksesoris. Jubah dan sorbannya

berenda, selendang sutera berbunga-bunga dililit di leher, dan berkalung bunga. Selain itu pengantin prianya mengenakan celana dibuat dari batik, atau sutera yang dihiasi benang emas. Sedangkan mempelai perempuannya didandani seperti penganten Cina, memakai gelang, kalung, anting-anting, dan kelat bau (sejenis gelang yang dikenakan di bahu). Akan tetapi sekarang dengan banyaknya perkawinan campur dengan etnis lain maka pakaian pengantin baik mempelai laki-laki maupun perempuannya telah dimodifikasi sehingga terkesan lebih moderen. Pesta perkawinannya tidak seperti dulu lagi yang memakan waktu beberapa hari, sekarang cukup satu hari saja bahkan keseniannya pun cukup dengan memutar film layar tancap.

## PERSEPSI DALAM HUBUNGAN ANTAR-ETNIS

Setiap orang mempunyai identitas lebih dari satu, dan salah satu identitas tersebut muncul dalam interaksi sosial dan digunakan untuk kepentingannya sesuai dengan struktur interaksi tersebut. Identitas-identitas yang telah dikembangkan dan dipunyainya tidak akan dengan mudah dipisahkan dari latar belakang kebudayaan dan pengalaman-pengalaman pribadinya yang subjektif dalam kehidupan sosialnya. Persoalan yang muncul dalam hal pengidentifikasian dirinya dengan suatu kelompok, sebagai kerangka acuannya, biasanya terjadi pada mereka yang merasa terbelakang atau terkucil kedudukannya karena identitas tersebut. Sedangkan kelompok-kelompok yang menikmati kedudukan yang baik dalam struktur kehidupan yang ada, dan begitu juga mereka yang dapat menikmati kekuasaan dan prestise dalam masyarakat, tidak menghadapi persoalan identifikasi tersebut (Prohansky dan Newton, 1968 : 213 dalam buku *Masalah-masalah Kebudayaan Tradisional, Kasus Orang Betawi* yang ditulis kembali oleh Parsudi Suparlan, hal: 7).

Seperti diketahui bahwa penduduk di wilayah Kelurahan Jaka Mulya, Jaka Setia, dan Jaka Sampurna Bekasi pada masa sekarang sudah sangat beragam karena banyaknya penduduk pendatang dari berbagai macam etnis yang di Indonesia. Sebelum kita membicarakan bagaimana

persepsi masyarakat Betawi dalam hubungannya dengan etnis lain, kita perlu melihat pula apa dan siapa sebenarnya masyarakat Betawi itu, bagaimana sifat mereka dan seterusnya.

Secara historis yang dimaksud dengan masyarakat Betawi adalah kelompok masyarakat yang telah lebih dari dua generasi dari manapun asal suku bangsanya dan menjadi pendukung kebudayaan Betawi, yang ciri utamanya mempergunakan bahasa Betawi sebagai bahasa ibu, tinggal dan berkembang di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya (Jabotabek). Artinya, terlepas dari kenyataan apakah seseorang sebelumnya berasal dari Sumatera, Bali, Jawa, Sunda, Cina, Arab, ataupun bangsa Eropa dan apapun agamanya, apabila selama lebih dari dua generasi menetap dan berkembang di Jakarta dan sekitarnya serta menjadi pendukung kebudayaan Betawi, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai anggota masyarakat Betawi.

Sementara itu secara geografis wilayah budaya Betawi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Masyarakat Betawi Tengah. Bagian Betawi Tengah meliputi wilayah yang dahulu menjadi Gemente Batavia.
2. Masyarakat Betawi Pinggiran. Masyarakat Betawi Pinggiran pada dasarnya dibagi dalam dua bagian lagi, *pertama*, masyarakat Betawi Pinggiran Bagian Utara. Kelompok ini meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Tangerang yang dalam kebudayaannya tampak banyak dipengaruhi oleh Cina. Misalnya musik Gambang Kromong, Tari Coket, dan Teater Lenong. Kedua, masyarakat Betawi Pinggiran Bagian Selatan. Kelompok ini berada di wilayah yang meliputi wilayah Jakarta Timur, sebagian Jakarta Selatan, Bogor dan Bekasi yang dipengaruhi kuat oleh kebudayaan Jawa dan Sunda tanpa menghilangkan unsur budaya Melayu Betawinya itu sendiri. Dari segi sub dialek bahasa Betawi mereka mengubah ucapan kata-kata yang memiliki akhiran yang berhuruf "a" dengan huruf tambahan huruf "h", misalnya: "gua" menjadi "guah", "saya" menjadi "sayah", "saja" menjadi "sajah". Kelompok ini memegang kokoh nilai-nilai tradisional. Hal ini sering kurang berkenan

terutama bagi kelompok masyarakat Betawi Tengah yang melihatnya dari kacamata Islam. (Bunyamin Ramto: Realitas Masyarakat Betawi di Tengah Metropolitan dalam buku *Masalah-masalah Kebudayaan Tradisional*, Hal: 20-22).

Berdasarkan penyebaran geografisnya jelas masyarakat Betawi Bekasi termasuk ke dalam kelompok masyarakat Betawi pinggiran bagian selatan, yang dipengaruhi budaya Jawa dan Sunda. Akan tetapi ketika di lapangan kelihatan bahwa pengaruh budaya Sundanya lebih menonjol jika dibandingkan dengan pengaruh budaya Jawa. Namun hal ini tidaklah begitu mengherankan sebab lokasi Bekasi sendiri berada di wilayah Jawa Barat sehingga pengaruh budaya Sundanya lebih menonjol. Seperti telah kita ketahui bahwa masyarakat Betawi ini merupakan penganut agama Islam yang taat, mempunyai sifat egois yang tinggi, dan seperti diakui para responden, mereka cenderung pemalas. Oleh sebab itu ketika para pendatang datang ke wilayah ini, apakah bisa menerima atau tidak? Tampaknya kehadiran para pendatang disambut dengan baik.

Para pendatang ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu para pendatang yang bertempat tinggal di perumahan-perumahan dan yang satunya lagi pendatang yang tinggal di perkampungan berbaur langsung dengan masyarakat Betawi. Para pendatang yang tinggal di komplek perumahan seperti diketahui berasal dari berbagai macam etnis, sementara itu pendatang yang tinggal diperkampungan pada umumnya berasal dari etnis Sunda, Jawa, Minang, Palembang, Batak, Cina, Lampung. Dilihat dari segi banyaknya jumlah pendatang di perkampungan, jumlah terbanyak adalah etnis Sunda dan Batak.

Tampaknya masyarakat Betawi tidak terbuka terhadap semua etnis. Mereka memiliki kekhawatiran atas kehadiran para pendatang yang berasal dari etnis Batak. Namun para responden mengakui bahwa mereka sebetulnya bisa bergaul dengan etnis Batak tetapi yang beragama Islam, karena lebih enak diajak bergaul dan mudah beradaptasi mungkin karena seagama. Tetapi untuk berinteraksi dengan etnis Batak nonmuslim mereka kurang akomodatif karena adanya kebiasaan

minum-minuman keras dan kebiasaan menyanyi setiap saat serta watak keras etnis dari daerah Sumatera Utara tersebut. Terlebih lagi masyarakat Batak nonmuslim yang mengontrak rumah kepada penduduk asli setempat, sering menimbulkan masalah mulai dari cara pembayaran kontrakan rumah, kemudian kebiasaan minum-minum, bahkan sampai tradisi berjudi yang bisa memberi pengaruh negatif kepada lingkungannya. Kekhawatiran itu beralasan karena di wilayah ini terdapat tempat perjudian di mana pemiliknya berasal dari etnis Batak, pada awal mulanya yang bermain judi hanya terbatas kepada etnis Batak saja, namun lama kelamaan etnis lainnya banyak yang terlibat, termasuk warga etnis Betawi yang selama ini dikenal taat beribadah, sekarang sudah ada terlibat dalam permainan judi.

Hal tersebut sangat dikhawatirkan oleh sebagian masyarakat Betawi sebab banyak sekali kejadian seperti berikut: Seorang anak Betawi yang masih dibawah umur, disuruh ibunya untuk memanggil ayahnya yang sedang bermain judi. Bagaimana perasaan si anak ketika melihat bapaknya sedang asyik bermain judi, sementara di sekolah dan di rumah diberikan pelajaran harus menjauhi pekerjaan yang dilarang oleh agama, sementara si bapak sendiri melakukannya dengan tereterangan. Oleh sebab itu masyarakat betawi yang masih taat dengan ajaran agamanya merasa khawatir, takut kalau nanti si anak atau generasi mudanya akan mencotoh perbuatan yang tidak baik. Bahkan di antara para penjudi tersebut ada salah seorang mantan pengurus RT, dan dia diberhentikan dari jabatannya karena memang hobinya bermain judi dan sudah sering tertangkap basah sehingga masyarakat Betawi merasa dicemarkan namanya.

Masyarakat Betawi mulai khawatir kalau kebudayaannya yang sangat Islami suatu saat akan luntur, terlebih-lebih setelah melihat pengaruh negatif dari kebiasaan minum-minum etnis lain yang berdampak pada generasi muda Betawi. Beberapa responden mengatakan bahwa sebagai akibat takut terpengaruh lingkungan yang mulai tercemar, maka anak-anaknya sepulang dari sekolah cukup bermain di dalam rumah sampai sore menjelang magrib, kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib bersama (berjamaah). Setelah itu belajar mengaji, belajar

membaca Al Qur'an, dilanjutkan makan malam bersama. Sesudah semua kegiatan itu selesai baru mereka disuruh belajar pelajaran sekolah, menonton TV, lalu tidur.

Mereka juga sadar bahwa pergaulan anak-anak selain dipengaruhi lingkungan setempat juga dipengaruhi film. Kebiasaan memutar layar tancap misalnya juga berpengaruh buruk karena film yang diputar tidak jarang untuk usia dewasa. Selain itu, lingkungan mereka sekarang menjadi tidak aman seringkali ada pengontrak rumah yang ternyata seorang pencuri, dan akhirnya segera diusir untuk meninggalkan rumah kontraknya. Walaupun kelompok masyarakat Betawi ini bukan tipe pendendam, mereka tidak suka dilukai hatinya, sebab kalau mereka sudah terluka hatinya akan segera bereaksi membalas dengan cara mereka sendiri.

Pada saat diajukan pertanyaan bagaimana tentang persepsi mereka terhadap para pendatang dari etnis Sunda, Jawa, Ambon, Padang, Cina juga Batak? Secara umum mereka menilai bahwa etnis Sunda dan Jawa hampir sama, yakni orangnya halus, ramah, tata kramanya baik, sedangkan Cina biasanya tidak peduli terhadap "orang kampung" (maksudnya Masyarakat Betawi), sedangkan Batak terkesan sombong, kalau berbicara semaunya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Dan ketika para responden ini ditanya lebih suka bergaul dengan etnis mana, mereka memberikan jawaban yang senada yaitu lebih enak bekerja sama atau bergaul dengan sesama masyarakat Betawi sendiri. Jika bergaul atau bekerjasama dengan masyarakat lain sebetulnya agak sulit sebab mereka tidak mengetahui kemauan etnis lain itu seperti apa, wataknya bagaimana dan seterusnya.

Kalau melihat jawaban-jawaban dari para responden seperti itu, bagi masyarakat Betawi Bekasi, di satu sisi kedatangan para pendatang sangat dinilai menguntungkan, namun di sisi lain masih memperlihatkan ketidakterbukaan mereka terhadap etnis tertentu yang dianggap mempengaruhi lingkungan setempat.

## PENUTUP

Masyarakat Betawi yang ada di wilayah Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, sudah ada sejak jaman dulu secara turun temurun. Ditinjau dari segi pendidikan, masyarakat Betawi di wilayah ini sudah mulai ada perubahan, terutama dalam hal kesadaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan keluarga mereka. Hal ini merupakan salah satu pengaruh positif dari kehadiran para pendatang. Selain itu, masyarakat Betawi merupakan masyarakat agamis yang sangat kuat dan taat beribadah, sehingga walaupun mereka sudah menyelesaikan sampai jenjang perguruan tinggi tetapi tetap saja masih melengkapinya dengan pendidikan bernafaskan agama Islam. Begitu juga dengan pola pekerjaan, masyarakat Betawi di daerah ini sudah mengalami pergeseran, tidak lagi sebagai pengolah sawah atau kebon, tapi mulai ada yang bekerja di pemerintahan, perdagangan, serta juga sebagai buruh pabrik.

Sementara itu dalam pola perkawinan juga mulai ada perubahan. Di antara mereka misalnya sudah banyak yang melakukan perkawinan campur dengan etnis atau suku lain asalkan tetap menganut agama yang sama (Islam).

Dengan bertambahnya jumlah para pendatang, baik diperkampungan maupun di komplek perumahan-perumahan, secara tidak langsung relatif banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat Betawi baik dari segi positif maupun negatif. Mereka juga cukup merasa khawatir bahwa tradisi Betawinya akan hilang begitu saja. Begitu juga dengan hubungan masyarakat Betawi dengan etnis pendatang tampaknya relatif tidak ada persoalan. Hanya saja masyarakat Betawi masih memperlihatkan ketertutupannya terhadap etnis tertentu yang dianggap mempengaruhi lingkungan setempat.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Kabupaten Bekasi Dalam Angka, BPS Kabupaten Bekasi, 1996.
- Monografi Desa/Kelurahan Jaka Mulya, Bekasi Selatan, 1999
- Muhadjir, *Bahasa Betawi, Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Penerbit Yayaan Obor, 1999.
- Ridwan Saidi, *Profil Orang Betawi, Asal Muasal, Kebudayaan dan Adat Istiadat*, Jakarta: Penerbit Gunara Kata, 1997.
- \_\_\_\_\_, "Sejarah Betawi", dalam Yasmin Zaki Shahab, ed., *Betawi Dalam Perspektif Kontemporer*, Jakarta: LKB, 1997.
- Tim Peneliti PMB-LIPI, *Pemecahan Masalah Hubungan Antar Etnis: Etnisitas dan Konflik Sosial*, Jakarta, PMB-LIPI, 1999.
- Parsudi Suparlan, et.al., *Masalah-masalah Kebudayaan Tradisional Kasus Orang Betawi*, Jakarta: Medika Ika, tanpa tahun.
- \_\_\_\_\_, *Interaksi Antar Etnik di Beberapa Propinsi di Indonsia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1989.



## **BAB IV**

### **MASYARAKAT ARAB SEMARANG**

#### **DALAM HUBUNGAN ANTAR ETNIK DAN KONFLIK SOSIAL**

Oleh Abdul Rachman Patji & Hayaruddin Siagian

Keberadaan orang-orang Arab di Semarang sama tuanya dengan keberadaan kota Semarang. Cikal bakal kota Semarang adalah sebuah dusun nelayan kecil yang dibuka pertama kali oleh Kyai Ageng Pandan Arang seorang maulana dari negeri Arab yang nama aslinya Maulana Ibnu Abdullah. Konon, Maulana Ibnu Abdullah adalah murid Sunan Ampel yang dikenal sebagai salah seorang dari sembilan wali (*wali songo*) penyebar agama Islam di tanah Jawa. Menurut Amen Budiman (1979) ketika kemudian Semarang berkembang menjadi pusat pemerintahan, Kyai Ageng Pandan Arang menjadi “bupati”nya yang pertama. Ia memerintah sampai akhir hayatnya pada tahun 1418 Saka atau 1496 Masehi. Pada mulanya jenazahnya dimakamkan di komplek kabupaten di Bubakan, setelah beberapa tahun dipindahkan ke Mugas, daerah bekas pedepokannya ketika awal kedatangannya di daerah Semarang.

Amen Budiman (1979) lebih lanjut menceritakan bahwa sekalipun Kyai Ageng Pandan Arang mendirikan cikal bakal kota Semarang, tetapi arsitek pencipta nama kota Semarang adalah Syekh Wali Lanang, juga seorang maulana dari negeri Arab yang dikenal dengan sebutan “*tyang kaot, bangsanira ing ngarah wiyose*” (seorang bangsawan utama yang lahir di tanah Arab). Selain memberi nama kota Semarang, Syekh Wali Lanang juga pernah meramalkan bahwa kelak di masa yang akan datang akan banyak orang bertempat tinggal di kota itu, daerahnya akan bertambah luas pula jangkauannya serta akan menjadi

sebuah “*kuta pasirah*”<sup>1</sup> atau ibukota. Dalam bukunya tentang kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, de Graaf dan Pigeaud (1989) mengungkapkan bahwa Ki [Kyai] Pandan Arang adalah juga orang yang sama dikenal dengan gelar “Sunan Tembayat”. Dia adalah pendiri kota Semarang dari keadaan awalnya sebagai suatu pelabuhan yang kurang penting dibandingkan dengan Jepara pada masa itu.

Dari informasi singkat di atas dapat diketahui bahwa orang-orang Arab adalah pendiri dan pengembang kota Semarang. Hanya saja dari beberapa sumber yang menyatakan demikian, para “maulana” yang disebutkan tidak disertai suatu keterangan jelas mengenai negeri asalnya di tanah Arab. Juga tidak diketahui apakah ada hubungannya dengan orang-orang Arab yang berasal dari Hadramaut yang menurunkan banyak keturunan di Indonesia, seperti di kota Semarang. Dahulu di kalangan masyarakat Indonesia (lokal) terdapat perbedaan penghormatan yang diberikan terhadap orang-orang Arab yang diduga berasal dari negeri Arab (Saudi Arabia saat ini) dan yang berasal dari Hadramaut (van der Kroef, 1954). Namun, karena dalam perkembangannya justeru orang Arab Hadramaut yang bertambah banyak datang sehingga perbedaan itu semakin kabur. Apalagi di kalangan Arab Hadramaut itu sendiri sudah ada stratifikasi sosial tersendiri yang mengarah kepada jauh dan dekatnya dengan kekerabatan Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayid dan non-Sayid.

Keturunan orang Arab Hadramaut (selanjutnya disebut “Arab”) sudah merupakan komunitas khusus di beberapa kota di Indonesia baru pada akhir abad ke-18 (Steenbrink, 1984; van den Berg, 1989; Patji, 1991). Di Semarang mereka sudah merupakan suatu komunitas, dalam pengertian sudah memiliki “kapten”, sejak tahun 1819. Mereka tidak tinggal di kampung tersendiri, tetapi bertempat tinggal bersama-sama dengan kelompok masyarakat lainnya, seperti orang Jawa, Banjar, Cina,

---

<sup>1</sup> Tembayat adalah nama suatu daerah di sebelah selatan Klaten. Meskipun tidak termasuk dalam kelompok wali songo, tetapi Sunan Tembayat juga adalah seorang yang berpengaruh, termasuk keturunan bupati Semarang dan bahkan dianggap seorang suci (H.J. De Graaf dan Th.G.Th. Pigeaud, 1989:69).

dan lain-lain. Disebutkan lebih jauh oleh Steenbrink (1984) bahwa antara tahun 1840 dan 1855 beberapa orang Arab Semarang menjadi kaya sekali, tetapi antara tahun 1860-1870 kekayaan mereka mulai merosot. Bahkan sebagian keturunan mereka yang kehidupannya hanya ditunjang oleh penghasilan dari milik yang masih ada pindah ke Pekalongan.

Di Indonesia, orang-orang Arab diterima dalam kehidupan masyarakat lokal sepertinya tanpa masalah. Masa awal kedatangan mereka sudah berhubungan dengan masyarakat (lokal) Indonesia melalui perdagangan, penyebaran agama (Islam) dan perkawinan. Ini bisa terjadi sebab mereka masuk ke negeri-negeri Nusantara memang dengan tujuan berdagang sambil memperkenalkan agama mereka (Islam). Dalam proses itu, untuk mempererat hubungan dan sudah adanya tujuan menetap, mereka pun mengambil isteri dari perempuan-perempuan pribumi. Dalam perkembangan selanjutnya, karena penerimaan, penghormatan dan penghargaan penduduk lokal yang cukup baik, diantara mereka pun ada yang berhasil menjadi pembesar beberapa kerajaan masa lalu. Di daerah tertentu di Indonesia, seperti di Kalimantan Barat, bahkan mendirikan kerajaan-kerajaan Islam.

Sejak masa sebelum Indonesia merdeka sampai saat ini, strategi adaptasi sosial itu tetap dipelihara dan, bahkan, diperluas pula dengan kegiatan dalam bidang pendidikan. Semua hal itu bisa tercapai dan masih dapat disaksikan sampai sekarang. Mungkin saja sebagian prosesnya sudah berubah, misalnya politik kerajaan pada masa lalu sudah digantikan dengan keterlibatan dalam politik kepartaian, tetapi sesuatu jelas bahwa semua itu adalah hasil dari suatu interaksi sosial yang mereka kembangkan dalam berhubungan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Apakah kondisi itu disebabkan oleh proses interaksi mereka yang berhasil dengan berbagai kelompok masyarakat lokal?. Bagaimana sebenarnya pola interaksi mereka sehingga kurang menimbulkan banyak konflik sosial dengan masyarakat lainnya?. Berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan di atas (perkawinan, pendidikan, ekonomi dan perdagangan serta sosial politik) dan yang berkaitan dengannya menjadi pokok perhatian dalam penelitian di Semarang dan dalam konteks masa kini.

## Wilayah PEMUKIMAN ORANG ARAB di SEMARANG

Sejak dahulu<sup>2</sup>, juga sampai sekarang, orang Arab yang datang ke Semarang tidak bermukim secara eksklusif. Hal ini berarti mereka bertempat tinggal tidak hanya bersama-sama dengan warga kelompok masyarakatnya sendiri (sesama Arab), tetapi juga dengan warga kelompok masyarakat lainnya. Wilayah pemukiman mereka juga tidak hanya satu lokasi, tetapi bertempat tinggal di beberapa kampung dalam wilayah yang berbeda-beda, seperti di kampung atau kelurahan Kauman, Purwodinatan, Tanjung Mas, Panggung Kidul, Panggung Lor dan Dadapsari. Dilihat dari segi karakteristik umum wilayah pemukiman yang didiami menunjukkan adanya masjid, jalan-jalan besar yang bisa dilalui kendaraan roda empat melalui wilayah tersebut, di wilayah itu juga tinggal orang-orang keturunan asing lainnya, seperti Benggali, Cina dan Pakistan serta pemukiman mereka biasanya berdekatan dengan pasar dan/atau pertokoan.

Dari segi penyebaran pemukiman, orang Arab terbanyak bertempat tinggal di kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara.<sup>3</sup> Kelurahan ini mempunyai luas 81.350 Ha dengan batas-batas wilayah sebelah utara dengan Jalan Kakap, Jalan Tamba; sebelah selatan dengan Jalan Imam Bonjol; sebelah barat dengan Jalan Petek, Jalan Dorang, Jalan Tamba serta sebelah timur dengan Jalan Layur, Kali Semarang. Pada saat ini (Juli 2000), kelurahan Dadapsari berpenduduk 11.070 jiwa,

---

<sup>2</sup> L.W.C. van den Berg menggambarakannya secara singkat sebagai berikut "Di Semarang orang Arab tidak memiliki wilayah sendiri, mereka menetap di wilayah Melayu yang menampung pula banyak orang Cina. Di sana terdapat sebuah masjid untuk bersembahyang sehari-hari yang dibangun oleh orang Arab" (1989:75).

<sup>3</sup> Penelitian dilakukan dipusatkan di kelurahan Dadapsari ini. Pemilihannya berdasarkan informasi tentang jumlah terbesar orang Arab di Semarang, adanya masjid mereka di sana, adanya lembaga pendidikan yang dibangun oleh mereka terletak di kelurahan itu. Informasi diperoleh dari berbagai sumber, baik dari kalangan pemerintah maupun perguruan tinggi dan warga masyarakat.

terdiri atas 5.225 laki-laki dan 5.815 perempuan. Jumlah penduduk sebanyak itu tergabung dalam 2.224 KK (Kepala Keluarga). Bidang jasa adalah merupakan jenis mata pencaharian terbanyak dari penduduk Dadapsari, yaitu dilakukan oleh 4.561 orang; kemudian disusul oleh mereka yang bekerja sebagai buruh (2.789 orang), karyawan 436 orang, wiraswasta 211 orang, pensiunan 193 orang, pertukangan 59 orang dan nelayan 3 orang.

Dilihat dari status kewarganegaraan, penduduk kelurahan ini mempunyai WNA (Warga Negara Asing) sebanyak 16 orang, menurut informasi dari kantor kelurahan semuanya warga Cina. Dengan demikian, tidak ada lagi keturunan Arab yang berstatus WNA di kelurahan Dadapsari. Kemudian, dari segi agama penduduk menunjukkan pemeluk Islam sebanyak 9.187 orang, Kristen 543 orang, Katolik 951 orang, Hindu 5 orang dan Budha 384 orang. Tempat peribadatan yang ada hanya Masjid 6 buah dan Mushallah 12 buah.

Wilayah Dadapsari dikenal juga sebagai bagian dari kampung Melayu yang juga merupakan tempat tinggal beberapa kelompok masyarakat lainnya, yaitu selain keturunan asing yang sudah disinggung di atas, juga orang Jawa (baik asal Jawa Tengah maupun Jawa Timur), Sunda, Madura, Banjar, Bali, Bugis, Makassar dan lain sebagainya. Dalam penelitian tidak diperoleh jumlah yang pasti mengenai banyaknya orang Arab di kelurahan Dadapsari (data Sensus 2000 yang mencantumkan sukubangsa belum dikeluarkan). Adanya masjid yang dibangun pada abad ke-19 oleh orang Arab terletak di wilayah kelurahan ini, tepatnya di pinggir Kali Semarang, dan adanya lembaga pendidikan yang mereka bangun memberikan kesan bahwa wilayah Dadapsari merupakan pemukiman utama mereka di Semarang sejak dahulu sampai sekarang.

Sebagaimana terjadi masa lalu, pada masa sekarang meskipun rumah tempat tinggal orang Arab banyak terdapat di Dadapsari, namun sentra-sentra pekerjaan atau mata pencaharian mereka tersebar di beberapa wilayah di kota Semarang. Sebagai contoh, keluarga "Abdad" yang tinggal di wilayah Dadapsari adalah pemilik "Hotel Flamboyan",

rumah makan “Bunda Kandung”, apotik “Sejati Farma” yang semuanya terletak di Jalan Pemuda, termasuk wilayah kelurahan Purwodinatan. Namun, harus disebutkan pula bahwa perbedaan lokasi antara rumah tinggal dan tempat pekerjaan bukan semata-mata karena faktor pemilik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lainnya, seperti perkembangan kota Semarang dan penduduknya. Gambaran mengenai pemukiman ini melengkapi data dasar dan latar belakang pembahasan tentang masyarakat Arab di Semarang dalam hubungan antar etnik dan konflik sosial.

### **PERKAWINAN: PEMBENTUKAN KOMUNITAS ARAB**

Sebenarnya suatu perkawinan adalah hubungan atau tindakan personal antar dua orang (laki-laki dan perempuan), namun karena dalam prosesnya melibatkan keluarga dan orang-orang lain sehingga citranya menjadi suatu “peristiwa sosial”. Perkawinan campuran yang mempertautkan orang-orang dari sukubangsa yang berbeda dalam jumlah yang banyak menimbulkan citra telah terjadinya suatu proses interaksi sosial yang intensif. Perkawinan campuran merupakan wadah kecil dari Bhinneka Tunggal Ika bagi penduduk Indonesia yang majemuk.

Hubungan antar etnik melalui perkawinan campuran antara orang Arab dan warga {pribumi} Indonesia sudah berlangsung sejak kedatangan orang Arab untuk menetap di pulau-pulau Nusantara. Pola hubungan yang terjadi dalam proses perkawinan itu pada umumnya adalah pihak laki-laki dari keturunan Arab mendapatkan jodoh dengan perempuan penduduk pribumi. Pola hubungan tersebut sangat difahami dan dibanggakan oleh generasi peranakan Arab di semua wilayah berpenduduk warga masyarakat Arab di Indonesia, termasuk di Semarang. Menurut mereka para kakek-moyangnya meninggalkan negeri Hadramaut kemudian sampai di Indonesia tanpa isteri dan kebanyakan masih berstatus bujangan. Oleh karena itu mereka mengambil isteri dari perempuan penduduk pribumi, sehingga ikatan darah antara orang Arab dengan penduduk pribumi merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri. Sebagaimana halnya di daerah-daerah lain, orang-orang

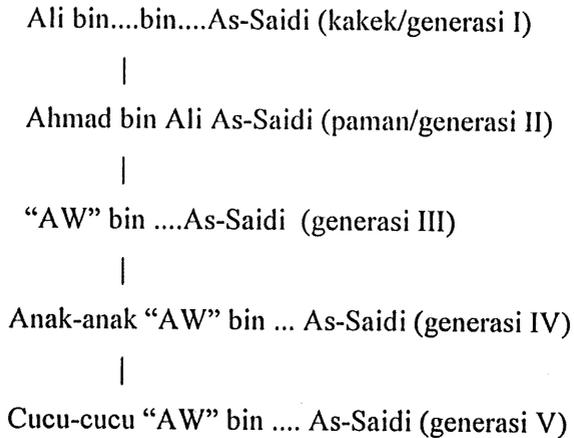
keturunan Arab di Semarang menempatkan seluruh orang pribumi sebagai keluarga dari pihak ibunya. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan sebutan *akhwal* - kata jamak dari *khal* - yang mempunyai makna adik atau kakak laki-laki dari pihak ibu atau dengan ucapan *khala*, yaitu kata jamak untuk adik atau kakak perempuan dari pihak ibu.

Anggapan bahwa orang Arab yang datang ke Indonesia dahulu hanya terdiri atas kaum laki-laki sesungguhnya tidak seratus persen benar. Kalaupun benar hal itu mungkin hanya terjadi pada tahun-tahun pertama kedatangan mereka (abad XVII). Selanjutnya, dalam perkembangan migrasi mereka ke negeri-negeri Nusantara, seperti terjadi pada tahun 1938, orang Arab yang masuk Indonesia berjumlah 503 orang. Dari jumlah itu terdapat 24 perempuan dan ada 7 dari mereka berusia di bawah 12 tahun (van der Kroef, 1954).

Ketika penelitian, peneliti dapat berjumpa dan melakukan wawancara dengan seorang laki-laki bernama "AW". Dia adalah migran orang Arab terakhir yang datang dari Hadramaut dan masih bertempat tinggal di Semarang sampai saat ini. "AW" dari keluarga As-Saidi datang ke Semarang pada tahun 1927, ketika usianya baru 10 tahun, jadi pada saat ini (tahun 2000) usianya sudah mencapai 74 tahun. Dia dikirim oleh ayahnya untuk menemui pamannya, adik ayahnya yang memang memanggilnya. Diceritakan tentang perjalanannya bahwa pertama kali dia naik kapal Belanda di Mukalla, Hadramaut kemudian turun di Singapura. Dari Singapura juga dengan kapal laut sampai ke Jakarta kemudian melanjutkan perjalanan ke Semarang. Sejak datang "AW" tidak pernah lagi kembali ke tanah leluhurnya, Hadramaut, Yaman, dengan alasan ada rasa malu karena tidak sukses dalam hidup dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Meskipun demikian, pada tahun 1997 dia ke Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji.

"AW" kawin dengan perempuan pribumi dan mempunyai anak 7 orang. Anak-anaknya ada yang tinggal di Bandung, Ungaran dan, pada saat ini, ada pula yang bekerja dan tinggal di Saudi Arabia. Dilihat dari generasi kekeluargaan "As-Saidi" yang ada di Indonesia, "AW" adalah

urutan generasi ketiga dari keseluruhan lima generasi yang sudah ada. Urutannya sebagai berikut:



Kebanyakan perkawinan yang terjadi pada masa lalu memang masih murni menghubungkan orang Arab laki-laki dengan perempuan pribumi asli. Pada saat ini sudah ada sedikit pergeseran, yaitu terjadinya banyak perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesama keturunan Arab. Kecenderungan seperti itu menjadi cikal-bakal terbentuknya komunitas Arab di Indonesia. Untuk mengekalkan komunitasnya, maka pemakaian nama keluarga adalah salah satu identitasnya. Di Semarang dikenal nama-nama keluarga Arab sebagai berikut: Abdat, Aljufri, Alatas, Al-Munawar, As-Saidi, Asy-Saggaf, al-Batati, al-Kaff, Ba-agil, Basyaib, Baswedan, Basyarahil, Basalamah, Hadrami, Muthahar, Sungkar, dan lain sebagainya.

Meskipun kecenderungannya demikian, namun dalam perkawinan antar sesama keturunan Arab ini ternyata biasa juga ada masalah. Masalah utama adalah kurangnya terjadi perkawinan antara anak-anak keturunan Arab dari golongan *Sayid* dan *bukan Sayid*. Dalam struktur sosial masyarakat Arab Hadramaut golongan *Sayid* dikenal

sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui putrinya Fatimah. Anggota golongan ini yang juga biasa disebut dengan istilah “kaum Alawiyin”<sup>4</sup> menganggap diri lebih tinggi derajat sosialnya sehingga tidak pantas kawin dengan orang-orang yang tidak sama derajatnya dengan mereka, sekalipun sesama keturunan Arab. Kaidah ini masih secara ketat diberlakukan terutama untuk kaum perempuan *Sayid* yang disebut dengan gelar “*Syarifah*”. Menurut informasi, kesulitan untuk mendapatkan jodoh dari golongan *Syarifah* bagi seorang laki-laki bukan dari golongannya sendiri, termasuk orang Arab bukan *Sayid*, juga terjadi di Semarang.

Perkawinan yang terjadi antara orang keturunan Arab dengan warga pribumi di Semarang, sebagai wacana hubungan atau interaksi antar etnik, tidak juga semuanya berlangsung secara mulus. Dari penelitian diperoleh beberapa kasus yang mungkin bisa dikategorikan “sisi negatif” dari perkawinan. Berikut ini dikemukakan dua kasus.

---

<sup>4</sup> Pembahasan yang lebih lengkap mengenai seluk-beluk golongan Arab Sayid atau kaum Alawiyin ini sudah banyak ditulis dalam beberapa buku baik yang ditulis oleh warga keturunan Arab Indonesia sendiri, maupun dari buku-buku terjemahan. Diantara buku-buku tersebut adalah karangan Mahayudin Haji Yahaya, *Sejarah Orang Syed di Pahang*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1984; Allamah Sayyid Abdullah Haddad, *Thariqah Menuju Kebahagiaan*, (terjemahan, cetakan VIII), khususnya Pengantar tentang Kaum Alawiyin yang disusun oleh Muhammad Al-Baqir, Bandung, Penerbit Mizan, 1996; H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini, *Pembaharu Abad Ke-17 Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Riwayat, Pemikiran, Nasihat dan Tarekatnya*, (terjemahan), Bandung, Pustaka Hidayah, Juli 1999; M. Hasyim Assagaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafa'ah Syarifah*, Bandung, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, September 2000.

## KASUS I.

Seorang perempuan (*Syarifah*), artinya dari keluarga terhormat masyarakat Arab terhormat, yang bekerja sebagai guru SD telah kawin dengan seorang laki-laki dari sukubangsa Jawa. Perkawinannya memang tidak mendapat restu dari keluarganya karena perempuan tersebut mengambil suami dari bukan golongannya. Sejak kawin dia sudah dianggap bukan lagi anggota keluarga oleh kerabat dan saudaranyasendiri. Ternyata ultimatum keluarga itu juga masih tetap berlaku atasnya ketika ibu yang melahirkannya dan dicintainya meninggal dunia. Ketika itu, dia memberanikan diri menampakkkan diri pada suasana duka tersebut. Namun begitu terlihat oleh saudara dan kerabatnya sendiri dia “diusir” karena sudah dianggap sudah keluar dari lingkungan keluarga Arabnya.

Dari kasus I ini menunjukkan betapa perkawinan yang sebenarnya merupakan salah satu wacana membangun hubungan antar etnik secara lahiriyah dan batiniyah, ternyata tidak selamanya bermakna demikian di kalangan golongan tertentu dalam masyarakat multietnik. Kiranya persoalan gengsi golongan dalam kasus I di atas telah menjadi hambatan yang serius dan menimbulkan masalah “citra sosial” dalam proses hubungan antar etnik. Sebenarnya, memang ada anggapan secara umum yang hidup di kalangan masyarakat keturunan Arab di Indonesia bahwa perkawinan antar golongan etnik bukanlah sesuatu yang terpenting dalam hubungan antar etnik. Menurut mereka yang terpenting ialah tumbuhnya rasa keterlibatan pada masalah-masalah yang dihadapi masyarakat secara umum (Baswedan, 1982).

Meskipun sikap enggan dalam perkawinan demikian itu telah menjadi kendala konsepsional dan berbeda dengan konsep masyarakat umum yang seharusnya diterima untuk bangsa yang majemuk seperti masyarakat Indonesia, namun sikap enggan itu tentu saja mempunyai latar belakang. Dari beberapa kali wawancara yang pernah dilakukan dengan orang-orang keturunan Arab, tampak adanya tiga alasan utama munculnya sikap enggan itu, antara lain: (1) keturunan Arab masih berpegang kepada jauh-dekatnya hubungan keluarga, terutama dalam

pemilihan jodoh untuk anak perempuannya; (2) sehubungan dengan hal itu mereka sangat memperhatikan soal nasab (keturunan) untuk menghindari penyesalan-penyesalan yang bakal muncul kemudian; (3) sebagian dari mereka memang beranggapan status sosialnya lebih tinggi sehingga hanya pantas mengawinkan anaknya dengan yang sederajat (Patji, 1988).

## KASUS II.

Seorang “habib” (panggilan lain dari kaum *Sayid*) kawin dengan seorang perempuan sukubangsa Jawa. Mereka dikaruniai anak empat orang, kebetulan perawakan dan wajahnya lebih mengikuti ayahnya. Ketika sang ayah masih hidup tidak terjadi sesuatu pada keluarga tersebut. Sebaliknya, ketika sang ayah sudah meninggal, anak-anak yang dilahirkannya sendiri mengucilkan ibu kandungnya. Setelah suaminya meninggal, untuk menyambung hidup sang ibu berjualan kerupuk, gado-gado dan sejenisnya. Rupanya hal itulah yang tidak diinginkan oleh anak-anaknya. Karena merasa gengsinya sebagai keturunan habib tercemar oleh ulah ibunya sendiri, maka ketika ibunya sakit bukannya diusahakan untuk diobati tetapi justru dipulangkan ke desa asalnya. Sampai ibunya meninggal di desanya, keempat anaknya tidak pernah menengoknya. Hubungan kekeluargaan mereka dari pihak ibunya sudah terputus.

Kasus II adalah suatu kisah “tragis” yang dialami oleh seorang perempuan yang menjadi korban “keakuan” golongan pihak ayah dari anak-anaknya sendiri. Di sini terlihat bahwa perkawinan campuran sebagai sarana hubungan antar etnik kurang bermakna karena adanya pandangan tentang etnisitas yang tidak setara. Memang sikap bangga yang berlebihan terhadap kedudukan suatu etnik bisa saja menimbulkan sikap meremehkan kelompok etnik lainnya. Sikap dan kondisi demikian itu adalah lahan subur bagi tumbuhnya “ethnocentrism”.

Berdasarkan uraian dan kasus yang dikedepankan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan campuran sebagai wacana

hubungan antar etnik yang berbeda selain dapat membuahkan citra sosial yang positif, juga dapat menimbulkan citra sosial negatif. Timbulnya citra negatif karena sikap-sikap yang melatarbelakanginya berakar pada suatu perasaan keterikatan yang kuat sekali dalam suatu kelompok dan kebudayaan (*in group feeling*).

## Pendidikan SEBAGAI SARANA HUBUNGAN ETNIK

Bidang pendidikan yang akan dikaji di sini ialah menyangkut beberapa lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat keturunan Arab di Semarang. Sebagai sarana hubungan antar etnik akan dilihat peranan dan manfaat lembaga-lembaga itu bagi warga masyarakat dari berbagai kelompok etnik. Pertama-tama ingin dikemukakan bahwa lembaga pendidikan yang didirikan oleh warga keturunan Arab yang terletak di kelurahan Dadapsari adalah TK (Taman Kanak-Kanak) Al-Irsyad, SD (Sekolah Dasar) Al-Irsyad dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) Al-Irsyad. Semua sekolah tersebut berada dibawah suatu yayasan disebut "Yayasan Al-Irsyad". Dalam wacana pengetahuan tentang keturunan Arab di Indonesia, Al-Irsyad dikenal sebagai suatu organisasi dari orang-orang keturunan Arab pembaharu (reformis) yang kegiatannya terutama meliputi aspek agama dan pendidikan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Al-Irsyad atau lengkapnya *Jamiyat Al-Islah Wal-Irsyad Al-Arabiyah* adalah organisasi yang didirikan oleh orang-orang keturunan Arab bukan *Sayid*. Pendirian organisasi tersebut dipelopori oleh Syaikh Ahmad Syurkati (1874-1943) sebagai langkah pembaharuan mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat Arab di Indonesia pada masa lalu. Ia merupakan organisasi alternatif diluar Jamiat Khair (*Ak-Jamiyat Al-Khairiyah*) yang telah didirikan lebih dulu dan diklaim sebagai organisasi himpunan orang Arab *Sayid*. Mengenai Al-Irsyad dan riwayat pencetusnya Syaikh Ahmad Syurkati dapat diikuti, antara lain dalam buku karangan Bisri Affandi, *Syaikh Ahmad Syurkati (1874-1943) Pembaharu & Pemurni Islam di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Pustaka Al-Kautsar, 1999.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pola hubungan antar etnik pada bidang pendidikan tersebut menempatkan orang-orang keturunan Arab pada posisi sebagai tim “management” (pimpinan, pengurus); orang-orang pribumi (Jawa dan lain-lain) sebagai “executor” atau “executive” (pelaksana) dan penduduk atau masyarakat umum sebagai “user” (pengguna). Keturunan Arab disebut sebagai pimpinan karena dari merekalah muncul inisiatif, kebijakan, modal dasar, untuk mendirikan lembaga pendidikan. Mereka duduk sebagai pengurus “Yayasan Al-Irsyad”. Nama-nama pengurus terasnya pada saat penelitian dilakukan adalah terdiri atas: Osman Baswedan (Ketua), Umar Basyarahil (Sekretaris) dan Nadji Abdat (Bendahara). Pengurus yayasan bertugas dalam pembinaan hubungan organisasi dengan Al-Irsyad pusat di Jakarta, juga menyusun kebijakan pengembangan (*development policy*) secara umum dan membangun hubungan keluar, misalnya mencari bantuan dari negara Arab Saudi.

Nama Al-Irsyad yang digunakan memang tidak terlepas dari cita-cita gerakan Al-Irsyad yang pertama kali dicetuskan sebagai organisasi orang-orang keturunan Arab bukan *Sayid*, yaitu melakukan pembaharuan dalam kehidupan keagamaan di kalangan masyarakat keturunan Arab. Akan tetapi dalam kiprahnya sebagai lembaga pendidikan, Al-Irsyad Semarang lebih merupakan sebuah “lembaga otonom”. Status otonomi di sini maksudnya adalah bahwa lembaga pendidikan tersebut dapat melaksanakan urusan-urusan sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan, keperluan dan kepentingannya tanpa harus mengikuti hal-hal yang diberlakukan pada lembaga pendidikan Al-Irsyad pusat. Sebagai contoh, untuk mengangkat guru-guru dan karyawan lainnya, menetapkan jumlah murid yang diterima setiap awal tahun ajaran, penetapan jumlah dan mekanisme penggajian guru dan karyawan, menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan Depdiknas serta pelajaran muatan lokal dan agama, Al-Irsyad Semarang dapat melakukannya sendiri tanpa perlu persetujuan dari Al-Irsyad pusat.

Dilihat dari segi pelaksana pendidikan, maksudnya guru-guru, dapat dikatakan dari tiga jenis sekolah yang ada (TK, SD dan SMP)

hampir semua tenaga pengajarnya diangkat dari orang-orang pribumi (Jawa, Banjar, Madura. dan lain-lain). Artinya orang keturunan Arab yang menjadi guru di lembaga pendidikan Al-Irsyad sangat terbatas jumlahnya. Keadaannya dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1**  
**Jumlah Tenaga Pengajar**  
**di Lembaga Pendidikan Al-Irsyad Semarang**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Guru*)	Orang Pribumi	Orang Arab
1.	TK Al-Irsyad	5	4	1**)
2.	SD Al-Irsyad	19	18	1***)
3.	SMP AL-Irsyad	24	23	1****)

- \*) Termasuk kepala sekolah masing-masing jenis pendidikan  
 \*\*) Luwiyah Alatas  
 \*\*\*) Anisah Yamani  
 \*\*\*\*) Nizar Basyaib

Terbatasnya jumlah guru yang berasal dari warga keturunan Arab selain disebabkan oleh kurangnya dari mereka yang berminat untuk profesi tersebut, juga tidak ditunjang oleh latar belakang pendidikan yang relevan. Menurut informasi warga masyarakat Arab Semarang yang memilih spesialisasi pendidikan guru (SPG/IKIP) memang sangat kurang, sedangkan spesialisasi di bidang agama dan ilmu pengetahuan umum lainnya juga jumlahnya terbatas. Ada kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir anak-anak keturunan Arab yang sudah menyelesaikan pendidikan setingkat SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) jika tidak secara langsung dapat bekerja di berbagai usaha dan perusahaan keluarganya, memilih pergi ke negara-negara Arab, terutama Saudi Arabia. Bekerja di luar negeri khususnya negara-negara Arab, menurut beberapa informan keturunan Arab, selain untuk melatih

kemandirian, dekat dengan pusat orientasi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, dapat memperoleh hasil yang memadai, juga memberikan semacam kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Keinginan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sesudah tamat SLTA tampaknya bukan sesuatu yang terlalu diharapkan.

Dari wawancara yang dilakukan dengan pengurus “Yayasan Al-Irsyad” disebutkan antara lain bahwa peluang kerja yang terbuka lebar di negara-negara Arab justeru perlu direbut. Untuk itu ada rencana yang dipersiapkan yaitu membuka STM pada tahun 2001 yang akan datang. Rencana itu sebagai respon terhadap banyaknya peluang kerja sektor keteknikan tingkat menengah di beberapa negara Arab. Ditambahkan pula bahwa pada saat ini dan juga pada tahun-tahun mendatang sangat diperlukan banyak spesialis otomotif di negara-negara Timur Tengah.

Murid/pelajar dari sekolah-sekolah lembaga pendidikan Al-Irsyad Semarang sekitar 90 persen adalah anak-anak penduduk pribumi. Keadaan tersebut sebenarnya sudah merupakan indikasi awal sejak dahulu, sebagaimana diungkapkan oleh seorang pegawai Kelurahan Dadapsari, alumni SMP Al-Irsyad itu. Keadaan jumlah murid/pelajar yang mayoritas anak-anak penduduk pribumi itu, menurut pengurus yayasan, bukan berarti bahwa tujuan memfasilitasi anak-anak keturunan Arab sendiri dengan pendidikan tidak berhasil. Masalahnya adalah jumlah keluarga dan/atau warga keturunan Arab di Semarang terbatas. Seperti sudah disinggung sebelumnya, pada masa lalu pernah terjadi perpindahan banyak keluarga Arab dari Semarang ke kota Solo dan Pekalongan. Mengenai jumlah murid/pelajar dari tiga lembaga pendidikan Al-Irsyad Semarang dilukiskan pada tabel 2.

**Tabel 2**  
**Jumlah Murid/Pelajar**  
**Lembaga Pendidikan Al-Irsyad Semarang**

No.	Jenis/Tingkat Pendidikan	Jumlah murid (bukan Arab)	Jumlah murid (Arab)	Total
1	TK	147	10	157
2	SD, Kelas I	36	6	42
	Kelas II	39	7	46
	Kelas III	52	5	57
	Kelas IV	58	11	69
	Kelas V	68	12	80
	Kelas VI	59	11	70
3	SMP, Kelas I	53	4	57
	Kelas II	66	2	66
	Kelas III	67	5	72
<b>Total</b>		<b>645</b>	<b>73</b>	<b>718</b>

Sumber: masing-masing sekolah

Dari sejumlah murid/pelajar yang diidentifikasi sebagai “bukan Arab” selain orang-orang pribumi (Jawa, Banjar, Madura, dan sebagainya), juga termasuk didalamnya seorang anak di kelas 4 SD adalah keturunan India dan seorang anak di kelas 1 SMP adalah keturunan Persia (Iraq). Sementara anak-anak Arab yang menjadi murid/pelajar ternyata tidak hanya dari keluarga keturunan Arab bukan Alawiyyin (bukan *Sayid*), tetapi juga meliputi anak keturunan Arab dari golongan Alawiyyin.

Keterlibatan warga masyarakat di lembaga pendidikan Al-Irsyad, dengan asal-usul keluarga dan etnik yang beragam seperti dilukiskan di atas, baik sebagai tenaga pengajar maupun sebagai murid/pelajar, menunjukkan bahwa suatu lembaga pendidikan (sekolah) memang merupakan sarana hubungan antar etnik yang efektif dan positif. Melalui sekolah yang juga berfungsi sebagai sumber untuk memperoleh ilmu

pengetahuan yang mengajarkan nilai-nilai demokratis (tanpa pemihakan atas dasar apapun) akan menjadi bekal yang abadi bagi orang-orang yang mencitai kebersamaan dan kesetaraan. Dikatakan oleh Kepala SD Al-Irsyad Semarang “meskipun Al-Irsyad didirikan oleh masyarakat keturunan Arab bukan *Sayid*, tetapi sekolah ini sudah banyak juga menghasilkan alumni dari keturunan Arab *Sayid*”. Lembaga pendidikan yang didirikan oleh kalangan masyarakat Arab *Sayid* sendiri di Semarang tidak ada. Tidak adanya lembaga pendidikan yang didirikan oleh golongan *Sayid* di Semarang menyebabkan tidak dapatnya dibuat suatu perbandingan dengan perguruan Al-Irsyad yang ada.

Selain tiga jenis sekolah di atas, sebenarnya terdapat pula “Pesantren Al-Irsyad” yang berlokasi di Ungaran. Pesantren yang didirikan tahun 1988 ini dikhususkan untuk mendidik santri pria yang diharapkan sebagai calon ulama masa depan. Pada saat ini jumlah santrinya sebanyak 450 orang. Dalam kiprahnya selama ini mendapat bantuan guru-guru dari Saudi Arabia. Pesantren ini sudah berhasil mengirim alumninya sebanyak 15 orang untuk melanjutkan pendidikan di Madinah.

Kegiatan lain yang juga merupakan bagian dari metoda memberikan pendidikan yang berada dibawah naungan Al-Irsyad Semarang ialah TPA (Taman Pendidikan Al-Quran), pengajian “Putri Al-Irsyad” dan “Wanita Al-Irsyad”. Pengelola dari kegiatan-kegiatan tersebut menjalankan aktivitasnya secara mandiri dan memiliki otonomi sendiri. Setiap kegiatan juga mempunyai tim pengelola atau pengurus, tetapi keikutsertaan didalamnya terbuka untuk semua kalangan dan lapisan masyarakat tanpa dibatasi oleh latarbelakang kelompok, golongan dan etnik. Sistem keterbukaan dalam pengelolaan yang diberlakukan oleh semua bagian dari organisasi pendidikan Al-Irsyad Semarang mungkin menjadi “kunci peredam” tidak adanya pertentangan yang muncul dari semua aktivitasnya, apalagi yang mengarah kepada konflik sosial.

## PENUTUP

Sejarah menunjukkan bahwa cikal-bakal kota Semarang didirikan oleh seseorang dengan latar belakang bangsa Arab. Hanya saja tidak diketahui secara pasti negeri asalnya di kawasan Timur Tengah. Demikian pula ketidakjelasan hubungannya dengan orang-orang Arab Hadramaut yang keturunannya banyak di Semarang sampai saat ini.

Wilayah pemukiman orang Arab (turunan Hadramaut) di Semarang tidak hanya satu lokasi, namun jumlah terbanyak dari mereka bertempat tinggal di kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara. Di kelurahan itu rumah-rumah mereka tidak saling berdekatan antar sesama Arab, tetapi lebih banyak bersebelahan dengan rumah kelompok etnik lain, seperti Jawa, Banjar dan Madura.

Dalam konteks hubungan antar etnik, sebenarnya perkawinan antara laki-laki Arab dengan perempuan pribumi memang tampaknya merupakan suatu keharusan pada masa awal kedatangan mereka. Namun, dalam perkembangan selanjutnya setelah keluarga campuran itu mempunyai anak-anak, maka perkawinan selanjutnya cenderung mempertautkan antara satu keluarga Arab dengan keluarga Arab lainnya. Oleh karena itu seakan-akan terbentuk suatu “komunitas Arab” peranakan. Dalam perkawinan antar etnik Arab dan pribumi biasa timbul perselisihan, pertentangan yang rupanya dipicu oleh “egoisme etnik” yang berlebihan.

Melalui sarana pendidikan “Yayasan Al-Irsyad”, hubungan antar berbagai etnik tidak menemukan masalah. Tidak pernah terdengar adanya suatu pertentangan serius yang menjurus ke konflik sosial dari segi pendidikan. Kondisi yang relatif tenteram itu dapat tercipta karena sistem keterbukaan, tanpa dibatasi oleh kendala bernuansa kelompok, golongan dan etnik, diaplikasikan dalam pengelolaan pendidikan.

## INTERAKSI ANTAR ETNIK di BIDANG PEREKONOMIAN

Perkembangan kelurahan Dadapsari, Semarang Utara tidak terlepas dari sejarah kota Semarang. Wilayah kelurahan Dadapsari ini juga diwarnai oleh aktivitas empat kelompok etnik, yaitu Melayu, Cina, Arab dan Jawa. Kini masing-masing etnik mempunyai spesialisasi dalam kehidupannya sehari-hari. Pada umumnya etnik Melayu lebih banyak sebagai nelayan. Cina, dominan di bidang perdagangan umum seperti toko elektronika, kelontong, souvenir (makanan ringan), pabrik minuman dan tekstil, alat-alat berat dan pergudangan. Sedangkan etnik Arab bergerak di bidang perdagangan tekstil, material (bahan-bahan bangunan), percetakan dan toko buku, perhotelan. Yang terakhir etnik Jawa lebih banyak bergerak di bidang perdagangan hasil bumi, pertanian, pedagang kaki lima dan buruh atau pekerja toko swalayan.

Pola pembagian aktivitas demikian telah berlangsung lama, diduga berkaitan dengan budaya masing-masing etnik yang diwariskan secara turun temurun. Orang Cina dan Arab yang datang ke daerah ini adalah pedagang di daerah asal, sementara orang Melayu yang dianggap sebagai penduduk pertama di daerah ini bekerja sebagai nelayan dan orang Jawa adalah petani. Spesialisasi pekerjaan ini terus berkembang baik sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, karena keterampilannya etnik Cina dan Arab lebih banyak dimanfaatkan oleh penguasa Belanda untuk memenuhi kebutuhannya, di antaranya di bidang administrasi pemerintahan, perdagangan dan distribusi barang-barang kebutuhan rumah tangga pihak penguasa kolonial (Pemerintah Daerah Kotamadya Semarang, 1979: 23).

Kini pemukiman mereka menyebar di kota Semarang dan sekitarnya. Salah satu daerah pemukiman mereka adalah kelurahan Dadapsari. Di kelurahan ini pada umumnya orang Arab dari golongan ekonomi menengah ke bawah lebih terkonsentrasi dan bermukim dengan tetangganya dari berbagai etnik seperti Cina, Melayu, Jawa, Madura dan Batak, yang juga termasuk dalam golongan ekonomi menengah ke bawah.

Jika dilihat dari segi mata pencahariannya, warga kelurahan ini mempunyai bidang pekerjaan yang beraneka ragam. Sebagian besar dari mereka bekerja di bidang jasa sebesar 55,2%(4561). Jumlah warga yang bekerja sebagai buruh dan karyawan di sektor industri seperti pabrik minuman Anggur Colesom dan Karoseri juga cukup besar, yaitu sebesar 39,0%(2789).

**Tabel No.1**  
**Penduduk Menurut Mata Pencahariannya**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan	436
2	Wiraswasta	211
3	Pertukangan	59
4	Buruh	2.789
5	Pensiunan	193
6	Nelayan	3
7	Jasa	4.561
<b>Jumlah</b>		<b>8.252</b>

Sumber: Kelurahan Dadapsari Dalam Angka Tahun 1999.

Menurut seorang nara sumber etnik Jawa W (46 tahun), pada umumnya mereka yang bekerja sebagai wiraswasta dan bekerja di bidang jasa adalah etnik Arab dan Cina. Jumlah kedua etnik ini berimbang dalam kedua bidang pekerjaan tersebut. Sedangkan bidang pekerjaan lainnya dilakukan oleh etnik lainnya seperti Jawa dan Melayu. Dengan demikian di daerah ini terjadi kesenjangan secara struktur sosial ekonomi. Akan tetapi dalam realitasnya, situasi tersebut nampaknya tidak menimbulkan sikap bermusuhan antara etnik Arab dan Cina di satu pihak dengan etnik Jawa dan Melayu di pihak lainnya. Menurut W yang telah bermukim di daerah ini kurang lebih 30 tahun dan seorang etnik Melayu S (52 tahun) yang lahir dan tinggal di daerah ini, hubungan antar etnik di daerah ini relatif baik karena adanya kesadaran terutama di pihak

etnik Jawa, Melayu dan etnik pribumi lainnya bahwa posisi mereka demikian disebabkan oleh pengetahuan, pendidikan dan keterampilannya relatif terbatas.

Pandangan demikian nampaknya menjadi pendapat umum warga etnik pribumi. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara mendalam dengan 3 orang nara sumber lainnya, yaitu D (49 tahun), H (56 tahun) dan I (39 tahun). Ketiga orang ini menguatkan pendapat nara sumber W dan S tersebut di atas. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh etnik Arab A (54 tahun) dan etnik Cina (43 tahun). Kedua nara sumber ini menyatakan bahwa tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan adalah faktor yang sangat menentukan status ekonomi setiap orang. Dalam penelitian yang dilakukan di kelurahan Dadapsari ini nampak kebenaran pendapat nara sumber baik etnik pribumi maupun etnik pendatang tersebut. Pendidikan, pengetahuan dan keterampilan etnik Arab dan Cina jauh lebih baik dari etnik pribumi. Di daerah ini orang Arab dan Cina berpendidikan paling rendah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), sementara etnik pribumi pada umumnya hanya pada tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Kesenjangan tersebut nampaknya tidak berpengaruh terhadap interaksi antar etnik. Dalam kehidupannya sehari-hari mereka saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan di bidang sosial ekonomi. Di pasar tradisional di wilayah kelurahan ini orang Arab atau Cina akan menjadi konsumen bagi etnik Melayu atau Jawa. Sebaliknya apabila etnik pribumi memerlukan barang-barang non produk hasil bumi maka mereka akan menjadi konsumen bagi etnik Arab dan Cina. Di perusahaan-perusahaan atau toko yang ada di daerah ini, etnik pribumi akan menjadi karyawan.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa hubungan etnik Arab dengan Cina relatif berjalan baik khususnya dalam bidang sosial ekonomi. Dalam realitasnya kedua etnik ini sering melakukan kerjasama ekonomi. Misalnya seorang etnik Arab Achmad yang menjadi pengusaha dan pemilik toko bahan-bahan material (bangunan) kehabisan

barang maka untuk memenuhi permintaan konsumennya, ia akan minta tolong kepada temannya pengusaha dan pemilik toko material orang Cina, Suryadi untuk menyediakannya. Demikian juga sebaliknya, apabila Suryadi kehabisan barang, ia akan meminta bantuan kepada Achmad.

Jadi di daerah ini tercipta suatu hubungan fungsional antar warganya. Bentuk hubungan itu nampaknya tidak terusik oleh adanya perbedaan latar belakang etnik dan agama. Meskipun demikian barangkali pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius dan memecahkan kesenjangan di bidang pendidikan, pengetahuan dan keterampilan antar berbagai etnik agar masyarakat di daerah ini merasa sejahtera aman dan tertib di masa depan.

## Aspirasi dan Partisipasi Politik

Warga kelurahan Dadapsari sebagai bagian dari bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari kehidupan politik nasional dan lokal. Aspirasi dan partisipasi politik mereka nampak dalam 2 bidang kegiatan, yaitu pertama kesediaan mereka sebagai pengurus Rukun Tetangga(RT) dan Rukun Warga(RW) dan kedua sebagai peserta pemilihan umum baik pada masa Orba tahun 1997 maupun pada masa reformasi tahun 1999.

Dalam pemilihan pengurus RT dan RW masalah perbedaan etnik tidak pernah timbul ke permukaan. Yang menjadi kriteria adalah kepemimpinan yang demokratis dan kesiapan calon. Artinya dasar pemilihan pengurus RT dan RW sangat rasional. Seiring dengan itulah 6 orang ketua RW dari 9 RW adalah non Jawa. Ketua RW 2 Siregar(Batak), ketua RW 3 Chandrawati(Cina), ketua RW 4 Swandi(Madura) dan ketua RW 6 Anang Sobari(Banjar) dan ketua RW 7 Poniman HS(Ternate). Demikian juga halnya dalam kepengurusan RT. Dari 54 RT sebanyak 20 RT diketuai oleh etnis non Jawa. Sebanyak 3 ketua RT berasal dari etnik Arab.

Partisipasi warga terhadap kegiatan Pemilihan Umum(Pemilu) juga cukup besar. Seluruh warga yang mempunyai hak pilih menggunakannya pada saat pelaksanaan Pemilu. Pada pemilu tahun 1997 sebesar 60% warga memilih Golkar dan sebesar 30% memilih PDI. Tetapi pada pemilu tahun 1999 sebagian besar 80% warga memilih PDIP dan sebesar 15% memilih Golkar.

Ketika ditanyakan tentang fenomena ini kepada 2 orang nara sumber Umar(45 tahun, Arab) dan Salam(51 tahun, Jawa) diperoleh informasi bahwa kemenangan PDIP disebabkan oleh adanya anggapan masyarakat bahwa PDIP adalah satu-satunya partai yang akan memperjuangkan kaum”cilik” dan persatuan nasional. Selanjutnya keduanya menyatakan bahwa kemenangan PDIP tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak luar: jadi betul-betul timbul dari hati sanubari warga. Berbeda dengan kemenangan Golkar pada tahun 1997, terutama karena adanya paksaan dari aparat pemerintah.

Dengan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa warga kelurahan Dadapsari memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Mereka sadar bahwa melalui persatuan nasional bangsa Indonesia akan menjadi besar dan disegani dalam pergaulan internasional.



## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Bisri. 1999. *Syaikh Ahmad Syurkati (1874-1943) Pembaharu & Pemurni Islam di Indonesia*. Jakarta, Penerbit Al-Kautsar.
- Al-Husaini, H.M.H. Al-Hamid. 1999. *Pembaharu Abad Ke-17 Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Riwayat, Pemikiran, Nasihat dan Tarekatnya*. Bandung, Pustaka Hidayah.
- Assagaf, M. Hasyim. 2000. *Derita Putri-Putri Nabi, Studi Historis Kafa'ah Syarifah*. Bandung, Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Budiman, Amen. 1979. *Semarang Juwita, Semarang Tempo Doeloe, Semarang Masa Kini Dalam Rekaman Kamera, Jilid 1, Semarang*, Penerbit Tanjung Sari.
- de Graaf, H.J. dan TH.G.TH. Pigeaud. 1989. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa Peralihan dari Majapahit ke Mataram*. Cetakan Ketiga, Jakarta, Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti.
- Haddad, Allamah Sayyid Abdullah. 1996. *Thariqah Menuju Kebahagiaan*. Diterjemahkan dari *Risalah Al-Muawanah wa Al Muzhaharah wa Al-Muwazarah li Al-Raghibin min Al-Mu'minin fi Suluk Al-thariq Al-Akhirah*, oleh Muhammad Al-Baqir, Cetakan VIII, Bandung, Mizan.
- Kelurahan Dadapsari Dalam Angka Tahun 1999*
- Patji, Abdul Rachman. 1988. "Asimilasi Golongan Etnis Arab, Suatu Studi Lapangan di Kelurahan Ampel Surabaya", dalam *Stereotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*. Kata Pengantar Prof. Dr. Selo Soemardjan, Jakarta, Diterbitkan PT Pustaka Grafika Kita untuk YIIS (Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial).

- Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta, Penerbit Bulan Bintang.
- van den Berg, L.W.C. 1989. *Hadramaut dan Koloni Arab di Indonesia*. Terjemahan dari *Le Hadhramout Et. Les Colonies Arabes Dans L'Archipel Indien*, oleh Rahayu Hidayat, Jakarta, INIS.
- van der Kroef, J.M. 1954. *Indonesia in the Modern World*, Part I, Bandung-Indonesia, Printed by Masa Baru.
- Yahaya, Mahayudin Haji. 1984. *Sejarah Orang Syed di Pahang*. Kuala Lumpur, Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran.
- Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Semarang. 1979. *Semarang Masa Lalu, Masa Sekarang dan Masa Mendatang*.

## **BAB V**

# **Etnis(itas) Urban Surabaya : Orang Madura di Kampung-kampung Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto**

Oleh Soewarsono

Kelurahan Sidodadi adalah salah satu dari sekian banyak kelurahan di wilayah Surabaya Utara. Kelurahan terletak di Kecamatan Simokerto, Kotamadya Surabaya. Kelurahan mempunyai jarak  $\pm 2$  Km dari pusat pemerintah kecamatan,  $\pm 2$  Km dari pusat pemerintah Kota Administrasi dan berjarak  $\pm 2$  Km dari ibu kota kotamadya Dati II Surabaya. Dan berikut batas-batas wilayah Kelurahan Sidodadi: Sebelah Utara: Kelurahan Simolawang; Sebelah Selatan: Kelurahan Kapasan Sebelah Barat : Kelurahan Nyamplungan; Sebelah Timur: Kelurahan Simokerto

Dengan jumlah penduduk 16.241 orang, Kelurahan Sidodadi tergolong daerah yang memiliki keragaman etnis dan agama. Dari keseluruhan angka tersebut, tercatat jumlah laki-laki sebanyak 7.079 orang dan perempuan berjumlah 8.362 orang, dan yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) berjumlah 14.746 orang dan mereka yang berkewarganegaraan asing (WNA) sebanyak 1.495 orang. Sedangkan dilihat dari jumlah penduduk menurut agama, tercatat bahwa mereka yang beragama Islam berjumlah 13.210 orang, Kristen 1.618 orang, Katolik 741 orang, Hindu 35 orang dan Budha 637 orang.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Monografi Data Kelurahan Tahun 1999.

## 1

Dengan luas wilayah sekitar 8 ha, Kelurahan Sidodadi terbagi ke dalam 10 Rukun Warga (RW).<sup>7</sup> Kesepuluh RW tersebut tidak hanya terbagi menjadi 64 Rukun Tetangga (RT). Masing-masing RW juga terbagi ke dalam wilayah-wilayah yang diistilahkan dengan kampung. Kampung-kampung tersebut diantaranya Kampung Seng, Srengganan, Sidodadi, Cantian, Kapasan Lor dan Sidokapasan.

Yang merupakan batas wilayah antar kampung biasanya hanya merupakan lorong-lorong kecil. Di pingir-pinggir jalan kecil tersebut biasanya terdapat kali kecil, misalnya di sepanjang jalan Sidodadi dan memasuki Kampung Seng.

Dengan memasuki wilayah perkampungan Kelurahan Sidodadi itu sendiri seseorang mendapati adanya gang-gang kecil yang disamping kanan-kirinya berjejer padat rumah-rumah penduduk. Ukuran gang-gang yang sempit itu, sebagai akibat populasi penduduk yang sangat padat, menimbulkan kesan seakan hampir tidak ada bedanya antara jalan dan pekarangan rumah. Pada sore hari seringkali terlihat anak-anak kecil bermain-main di depan pekarangan rumah orang-orang tua mereka yang menjadi gang/jalan lintas masuk orang. Masing-masing gang terdapat bangunan joglo kecil yang menjadi pintu gerbang memasuki gang. Disamping kiri atau kanan, tepat menempel pada bangunan joglo itu, terdapat papan nama yang bertuliskan nama gang, misalnya Jalan Kampung Seng.

Di depan kiri atau kanan pada hampir setiap gang-gang sebelum memasuki perkampungan, terdapat pula becak-becak yang menjadi salah satu sarana transportasi warga setempat. Umumnya para tukang becak tersebut berasal dari daerah sekitar. Menurut Mukhit (27 th), salah seorang warga Kampung Seng:

---

<sup>7</sup> Data Monografi Kelurahan Tahun 1999.

“Mereka (para tukang becak) itu rata-rata masih tergolong tetangga saya sendiri. Mereka semuanya berasal dari Madura yang mencari mata pencaharian di Surabaya.”<sup>8</sup>

Di sekitar gang itu pula menjadi tempat bergerombol sekawanan pemuda kampung setempat. Mereka terkadang sekedar berbincang-bincang, bermain kartu dan tidak jarang pula pada sore hari bermain sepak bola. Tidak jauh beda dengan kebiasaan para mudanya, para orang tua juga cenderung menyenangi kebiasaan berbincang bareng (*ngrumpi*) dengan tetangga-tetangga terdekat. Biasanya di depan beberapa rumah penduduk etnis Madura menyediakan ‘lencak’ (sejenis tempat duduk yang bentuknya panjang segiempat terbuat dari kayu) yang menjadi tempat ngobrol mereka.

## 2

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat serta aparat kelurahan, Kelurahan Sidodadi termasuk salah satu kelurahan di Surabaya yang memiliki penduduk beretnis Madura yang paling dominan. Jika dihitung dalam prosentase jumlah penduduk secara umum, kira-kira 60 % warga yang beretnis Madura dari jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Kelurahan Sidodadi.<sup>9</sup>

Angka tersebut wajar karena mengingat di sepanjang masa telah terjadi migrasi penduduk dalam jumlah yang besar, baik untuk selama-selamanya, ataupun untuk waktu yang singkat maupun untuk masa yang panjang ke Jawa dan ke pulau-pulau lain di Nusantara. Sudah sejak pertengahan abad yang lampau terdapat 833.000 orang Madura yang bertempat tinggal di Jawa Timur, dua kali lipat lebih banyak daripada

---

<sup>8</sup> Wawancara tanggal 28 November.

<sup>9</sup> Wawancara dengan tokoh dan aparat kelurahan, tanggal 28 & 29 November 2000.

jumlah orang yang bertempat tinggal di pulau itu sendiri. Bagian terbesar penduduk di pantai utara Jawa Timur berasal dari Madura dan kira-kira sepertiga dari penduduk Surabaya dan Gresik berketurunan Madura.<sup>10</sup>

Di sisi lain sebagian besar warga etnis Madura di Kelurahan Sidodadi umumnya menempati beberapa area tertentu dalam satu komunitas yang cenderung berkelompok. Pada umumnya mereka tinggal di pemukiman atau kampung-kampung padat penduduk yang hampir seluruhnya—jika tidak dikatakan semuanya—beretnis Madura.

Sebagian besar perkampungan Kelurahan Sidodadi didominasi oleh warga keturunan Madura. Sehingga dapat dikatakan bahwa etnis Madura yang merupakan etnis dominan di Kelurahan Sidodadi. Kampung-kampung yang banyak didomisili oleh warga etnis Madura adalah Kampung Seng, Sidokapasan, Cantian dan Srengganan. Kebanyakan mereka yang bermukim di kampung tersebut berasal dari daerah Sampang dan Bangkalan.

Bahasa komunikasi diantara mereka relatif tidak berubah dari bahasa daerah aslinya, yaitu bahasa Madura. Meskipun tidak jarang dalam kesehariannya, mereka juga menggunakan bahasa Jawa yang berdialek khas Surabaya tapi bercampur logat Madura. Bahasa Madura yang mereka gunakan adalah bahasa *ngoko* dan bahasa *madya* yang berdialek Bangkalan. Jarang sekali digunakan bahasa *kromo* (baca: bahasa halus) diantara mereka.<sup>11</sup>

Corak komunikasi “halus” di atas, umumnya terbatas di kalangan para orang tua yang masih berpegang pada tradisi etnis yang “asli.” Sedangkan di kalangan remaja dan pemuda—termasuk anak-anak—keturunan Madura hampir semuanya menggunakan bahasa Jawa dalam komunikasi sehari-hari. Pengamatan di lapangan menunjukkan

---

<sup>10</sup> Hageman Czn. 1858: 324-35.

<sup>11</sup> Bahasa *ngoko* adalah ragam bahasa yang digunakan sesama kawan dalam situasi pergaulan akrab. Bahasa *madya* adalah ragam bahasa yang digunakan oleh sesama kawan dalam situasi resmi, satu sama lain saling menghormati. Lihat **Ensiklopedi Nasional Indonesia**, 1990: jilid 10; 20.

penggunaan bahasa Madura dalam keseharian mereka cenderung tidak tetap dan tidak teratur. Terkadang menggunakan bahasa Madura tetapi pada saat yang lain berbahasa Jawa (*ala* Surabaya yang berlogat Madura). Namun yang menarik adalah dialek Madura mereka yang tetap melekat dan kental ketika mereka berbahasa Jawa ataupun berbahasa Indonesia.

Selanjutnya tingkat kepadatan populasi penduduk etnis Madura yang bermukim di kampung Kelurahan Sidodadi tersebut tergolong sangat besar. Hal ini nampak pada jarak antar rumah yang satu dengan rumah lainnya yang sangat berdekatan bahkan hampir tidak berjarak. Kecendrungan hidup berkelompok dalam satu komunitas ini disebabkan karena adanya ikatan kekeluargaan dan persaudaraan yang tinggi diantara sesama etnis. Sehingga wajar jika warga etnis Madura tersebut memiliki solidaritas sosial yang kuat di dalam kehidupan bermasyarakat.

Rata-rata mereka masih memiliki ikatan/hubungan darah yang sama, misalnya antara warga Kampung Seng dan warga Srengganan yang masih lingkup Kelurahan Sidodadi. Kita bisa menelusuri asal usul sebagian besar warga di sana yang rata-rata berasal dari daerah-daerah sekitar Kabupaten Bangkalan. Di kampung Seng, misalnya, hampir semua warga etnis Madura berasal dari kampung halaman yang sama di Madura. Bahkan rata-rata masih memiliki hubungan darah.<sup>12</sup>

Pemukiman mereka tersebut nampaknya masih berpegang pada tradisi kuno pemukiman penduduk di pedesaan Madura, khususnya Madura bagian timur dengan apa yang diistilahkan sebagai “tanean lanjang”. Dari segi bentuk fisik dan luasnya kurang tepat kiranya jika disebut sebagai tanean lanjang, karena rata-rata dari masing-masing rumah hampir tidak ada tanean (baca: pekarangan) yang luas sehingga layak disebut sebagai tanean lanjang. Namun penulis masih melihat adanya substansi tradisi dan nilai yang masih melekat dari “tanean lanjang” di dalam komunitas kampung tersebut. Arti harfiahnya ialah “pekarangan panjang”, sebuah perumahan petani yang berkelompok

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Maksum (40 th), ketua RW II Kampung Seng dan warga setempat, tanggal 27 November 2000.

menjadi satu. Didirikan secara berdampingan dengan arah yang sejajar dengan panjangnya pulau. Setiap keluarga luas memiliki sebuah pekarangan. Tanean lanjang mungkin sekali merupakan bentuk pemukiman yang tertua di Pulau Madura.<sup>13</sup>

Meskipun, terdapat banyak peregeseran atas tradisi aslinya, bila dilihat dari situasi dan kondisi dalam kehidupan perkotaan (Surabaya) yang tingkat kepadatan penduduk amat besar. Percepatan ini, seperti telah dijelaskan semula, mempengaruhi perubahan pada pola hidup penduduk etnis Madura. Lihat saja betapa populasi yang cukup padat di kampung-kampung/pemukiman etnis Madura tersebut memberi citra kumuh (bukan bahasa Madura, artinya: tidak sehat di mata) jika dibandingkan dengan daerah-daerah atau kampung-kampung lain yang tidak dihuni oleh etnis Madura. Pembuangan sampah yang tidak wajar terlihat di pinggir-pinggir kali yang banyak dipenuhi dengan sampah-sampah, sebut saja di pinggiran kali Kampung Seng. Geledak-geledak sampah yang ada di pinggir jalan terlihat malah menambah wajah kumuh perkampungan. Apalagi geledak tersebut sudah penuh dengan sampah dan terkadang diparkir seandainya di pinggir jalan dekat pembuangan sampah.

Hal ini nampaknya menjadi gejala sosial yang umum terjadi pada hampir semua pemukiman etnis Madura di Surabaya termasuk di kampung-kampung di Kelurahan Sidodadi. Konsekuensinya kemudian jelas bahwa wajah kumuh perkampungan Madura tersebut menjadi stereotype tersendiri bagi kaum etnis Madura urban.

### 3.

Berdasarkan survei dan hasil wawancara dengan 7 orang responden (beberapa warga, tokoh masyarakat, ketua RW dan kepala kelurahan setempat) diperoleh data lapangan bahwa hampir 70 %—jika

---

<sup>13</sup> Cf. Koenoe 1975: 16-19; Laceuelle 1929: 613-648; Ter Haar 1939: 19-44 dalam Hub de Jonge 1989: 13.

tidak lebih—dari penduduk etnis Madura usia kerja berprofesi sebagai pedagang. Sisanya bekerja sebagai kuli (buruh harian) dan karyawan.

Dilihat dari latar belakang pendidikan, misalnya, penduduk yang berusia 40 tahun ke atas berlatar pendidikan yang relatif rendah (rata-rata lulusan SD hingga SLTP). Belum lagi penduduk yang juga tidak jarang tidak tamat SD bahkan tidak berpendidikan. Adapun penduduk usia remaja atau pemuda, rata-rata mereka telah berpendidikan SLTP hingga SMU meskipun masing-masing jarang yang ditemukan meniti jenjang perkuliahan. Salah satu alasan lemahnya tingkat pendidikan warga etnis Madura urban di sana adalah karena faktor prinsip atau pandangan orang tua yang lebih suka memilih anaknya untuk bekerja.

Bagi Bambang (63 th), warga kampung Srengganan yang dianggap tokoh masyarakat:

“..... prinsip seperti itu sedikit demi sedikit mulai berubah. Terbukti saat ini banyak orang tua yang beretnis Madura di Kelurahan Sidodadi yang sadar akan arti penting pendidikan meskipun jenjang pendidikan yang ditempuh anak masih hanya pada tingkat SLTA. Setelah itu anak-anak keturunan Madura yang lulus sampai jenjang SLTA tersebut biasanya memilih untuk bekerja atau berdagang .....”

Hal yang sama juga dikatakan oleh Busyro (45 th), salah seorang warga yang tergolong terpandang di Kampung Srengganan dalam wawancara tanggal 1 Desember 2000:

“..... soal pendidikan, masyarakat etnis Madura di Kelurahan Sidodadi lebih senang menyekolahkan anak-anaknya di pendidikan umum. Karena faktor kemauan anak-anak etnis Madura sendiri yang lebih suka memilih bersekolah di pendidikan umum. Faktor itu didorong oleh usia-usia remaja etnis Madura. Lebih senang bersekolah di sekolah-sekolah umum seperti SMP dan SMU ketimbang sekolah-sekolah agama, misalnya MTS dan MAN.”

Jadi, faktor gengsi (lebih gaul) dalam pendidikan berperan dalam praktik keseharian mereka. Bukan karena faktor kurikulum yang menjadi andalan sebuah institusi pendidikan. Model pendidikan lainnya, seperti pendidikan agama masih dijalankan melalui pendidikan non-formal, misalnya TPA (Taman Pendidikan al-Qur'an) yang statusnya hanya sebagai aktifitas di luar pendidikan formal.

Di sisi lain ada kecendrungan perilaku yang bias dari sebagian besar warga keturunan Madura dalam soal gender. Ada tendensi diskriminatif ketika mereka memperlakukan anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dianggap simbol kebanggaan para orang tua yang kelak diharapkan sebagai orang yang paling mampu meneruskan cita-cita sang bapak. Sehingga perhatian orang tua lebih condong kepada anak laki-laki daripada perempuan. Sedangkan anak perempuan biasanya setelah dianggap cukup umur oleh orang tuanya, mereka dikawinkan dengan jodoh yang telah dipilih orang tua.

Namun perilaku yang cenderung diskriminatif itupun masih bersifat relatif. Misalnya, bagi warga keturunan Madura yang tergolong mapan tingkat ekonominya dan telah melakukan proses interaksi yang cukup lama dengan etnis lain—misalnya, Jawa—yang tergolong berpendidikan dan mapan tingkat ekonominya, maka mereka cenderung sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Dengan kata lain diskriminasi gender tidak berlaku dalam hal ini. Ini berbeda dengan warga yang tergolong pas-pasan tingkat ekonominya. Disamping faktor ekonomi yang kurang mendukung, faktor lain yang menjadi penyebab utamanya terletak pada prinsip etos kerja yang tinggi dari orang Madura.

Disamping itu diskriminasi gender tersebut tidak berlaku dalam dunia pekerjaan. Baik laki-laki ataupun perempuan etnis Madura sama-sama berkemampuan dalam berdagang. Tidak jarang perempuan Madura usia dewasa yang membuat usaha sendiri disamping usaha suaminya, misalnya dengan berjualan rujak, jajan dan kain-kain. Menurut Mu'afiah (25 th), salah seorang warga etnis Madura kampung Srenganan yang

berjualan bermacam-macam barang (baju-baju dan kain) dan makanan ini mengatakan:

“Hal yang wajar sebenarnya jika banyak perempuan Madura yang berumah tangga berdagang dan berjualan bermacam-macam barang. Hal ini demi menambah pendapatan keluarga agar bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Syukur-syukur jika ada keuntungan lebih dari hasil penjualan tersebut.”<sup>14</sup>

#### 4.

Dalam wilayah perdagangan, warga etnis Madura amat menguasai lapangan dibandingkan dengan etnis-etnis lainnya. Mereka rata-rata memiliki toko-toko kecil yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari warga setempat, menjadi penjual kain, jamu dan dagang asongan lainnya (termasuk pedagang rombongan yang menjual barang-barang bekas). Proses interaksi sosial etnis Madura dengan etnis lainnya terutama etnis Jawa tidak jarang diwujudkan melalui aktifitas berdagangnya. Hal ini diakui oleh Mu'afiah (25 th) dan Maksun (40 th) yang sehari-hari menjadi penjual jamu di samping sebagai ketua RW Kampung Seng. Tidak jarang mereka menawarkan kepada orang-orang Jawa di sekitar kampung mereka. Bagi Mu'afia, misalnya, ia seringkali menawarkan barang-barang dagangannya seperti kain dengan harga penjualan sistem kredit pada orang-orang Jawa.

Aktifitas perdagangan yang mereka jalani masih relatif kecil dari segi modal jika dibandingkan dengan etnis Cina. Etnis Cina yang dimaksud adalah mereka yang memiliki toko-toko relatif besar di jalan-jalan protokol sepanjang jalan Kapasan yang letaknya tidak jauh dari perkampungan/daerah Sidodadi.

---

<sup>14</sup> Wawancara tanggal 2 Desember. Responden terkadang menggunakan bahasa campuran anatar Jawa dan Madura ketika diwawancarai.

Di level pergaulan birokrasi, warga etnis Madura banyak yang menempati posisi strategis di dalam birokrasi pemerintahan lokal kelurahan. Di tingkat kelurahan, posisi-posisi strategis yang dimaksud adalah jabatan sekretaris lurah (carik), staf-staf kelurahan, dll. Di tingkat RW dan RT, rata-rata etnis Madura menjabat ketuanya. Tokoh-tokoh masyarakat nonformal banyak pula yang beretnis Madura daripada Cina dan Jawa.

Etos kerja selalu terkait dengan tradisi tertentu, sebagai pengimbang kerasnya pekerjaan yang dijalani etnis Madura. Tradisi-tradisi yang tetap berlaku misalnya upacara perkawinan ala Madura, tradisi selamatan (yang diistilahkan dengan 'pelet bettheng') bagi wanita yang hamil 7 bulan, acara-acara selamatan menyambut hari-hari besar agama (Islam) dan selamatan haul mengenang nenek moyang mereka yang meninggal (biasanya menyambut 40 hari, 100 hari hingga 1000 hari orang yang meninggal bahkan diperingati dalam setiap tahunnya). Dalam hal "angka-angka mistis" ini, akan terlihat afiliasi religius etnis Madura, yang (sengaja) memegang tradisi keagamaan NU di Jawa dan Madura.

Menyambut bulan Maulud Nabi, mereka bukan hanya memperingati secara bersama-sama di mesjid-mesjid sebagaimana dalam tradisi Islam pada umumnya melainkan juga secara individual bagi mereka yang tergolong mampu dengan mengundang warga Muslim setempat. Tradisi-tradisi tersebut masih tetap berlaku dalam kehidupan mereka meskipun ada tradisi "Madura" yang cenderung sudah berbaur dengan tradisi Jawa, salah satunya seperti dalam upacara perkawinan diiringi dengan musik-musik gamelan Jawa, dll.

Dapat dikatakan bahwa dalam "stratifikasi sosial" di masyarakat, penduduk etnis Madura secara menyeluruh menempati strata sosial yang tinggi. Modalitas "posisi mereka" adalah menggunakan pengaruh kekuasaan dan kewibawaan dalam perilaku sosial dan kebudayaannya. Pengaruh dominasi kekuasaan etnis Madura tersebut tidak mengganggu interaksi sosial antar etnik di Kelurahan Sidodadi, apalagi yang mengarah pada terjadinya konflik antar etnik.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa etnik Cina dan Madura cenderung hidup dalam komunitasnya sendiri-sendiri. Sedangkan etnis Jawa cenderung bisa berbaur baik dengan etnis Madura dan Cina. Namun “kerawanan” konflik ini relatif teratasi dengan peran dan kebijakan elit lokal dalam ikut mengatur dan membina hubungan antar etnik ini. Menurut Lurah Sidodadi, Prayitno (42 th), khususnya bagi etnis Cina yang mampu secara ekonomis, mereka diminta ikut membantu menangani pengentasan kemiskinan warga di daerah setempat dengan memberikan sumbangan dana secara rutin melalui birokrasi kelurahan. Di samping itu pihak kelurahan juga cukup intens mengadakan pertemuan-pertemuan silaturahmi antar etnik (disamping rapat-rapat resmi tokoh dan aparat lokal) guna membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga dari sini kemudian tercipta integrasi sosial karena rasa kebersamaan dan rasa memiliki terhadap kelurahan (wawancara tanggal 5 Desember).

## 5.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mayoritas penduduk memeluk agama Islam ( $\pm 90\%$ ). Sedangkan dari etnis-etnis yang ada, penduduk etnis Madura merupakan etnis yang paling dominan ( $\pm 60\%$ ). Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan beberapa responden, penduduk etnis Madura semuanya beragama Islam. Sehingga aktifitas-aktifitas keagamaan di mesjid-mesjid ataupun tradisi-tradisi keagamaan banyak diwarnai oleh penduduk etnis Madura (seperti telah disebutkan sebelumnya). Jumlah mesjid yang ada di kelurahan sebanyak 2 buah, sedangkan mushalla atau langgar sebanyak 21 buah.

Ada gejala dan kecendrungan umum dalam perilaku keberagaman di kalangan masyarakat etnis Madura, yaitu di masing-masing kampung yang dihuni etnis Madura terdapat langgar-langgar atau mushalla-mushalla kecil yang dianggap sebagai alternatif dari mesjid. Setiap kampung etnis Madura tersebut biasanya memiliki satu hingga dua langgar. Ukuran atau luas langgar yang satu dengan langgar yang ada di kampung lainnya tidak jauh beda dan berukuran relatif kecil, kira-kira  $\pm$

5 X 8 m. Langgar-langgar tersebut digunakan untuk tempat ibadah sholat jemaah setiap waktu terutama di waktu-waktu maghrib dan isya'. Pada waktu-waktu tersebut penduduk etnis Madura khususnya yang laki-laki secara bersama-sama melakukan shalat jama'ah di langgarinya. Apalagi pada bulan Ramadhan, biasanya digunakan untuk shalat tarawih dan tadarrus bersama.

Di samping itu langgar-langgar tersebut juga digunakan untuk acara tahlil bersama warga baik untuk acara selamatan tertentu, misalnya selamatan untuk kerabat yang meninggal ataupun pada acara rutin yang biasa dilaksanakan setiap minggu atau sebulan sekali. Tahlil rutin tersebut menjadi salah satu aktifitas keagamaan rutin yang biasanya dilakukan secara bergiliran. Pada acara-acara tahlil bersama tersebut, setiap orang yang mengikutinya memperoleh 'bêrkat', yaitu istilah orang Madura untuk menyebut jajan/makanan yang diberikan oleh orang yang berhajat pada acara tahlil tersebut. Disamping tradisi-tradisi keagamaan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, masyarakat etnis Madura memiliki tradisi yang masih kuat dalam hal kepatuhan terhadap kyai.

Meskipun kyai (ulama) yang dimaksud tidak hidup di sekitar atau di tengah-tengah mereka, namun kyai masih dianggap sebagai tokoh kharismatik yang memiliki pengaruh sangat besar. Sikap ketaatan atas kharisma kyai ini diantaranya ditunjukkan dengan tradisi keagamaan yang masih berlaku seperti tahlil dan afiliasi mereka terhadap ormas keagamaan NU (Nahdlatul Ulama) dan PKB sebagai partai pilihannya. "Islam adalah NU".

Pemaknaan dari kepatuhan "ajaran" di atas berlangsung seperti "biasa" yaitu berguru kepada kyai tertentu yang layak dipercaya menjadi panutan. Tujuan bergurunya adalah untuk mendapatkan *barokah*, keselamatan dan kesuksesan dalam pekerjaannya, khususnya berdagang. Biasanya mereka mendatangi kyai guna memohon do'a atau amalan-amalan tertentu yang perlu dilakukan guna menunjang aktivitas duniawi mereka.<sup>15</sup>

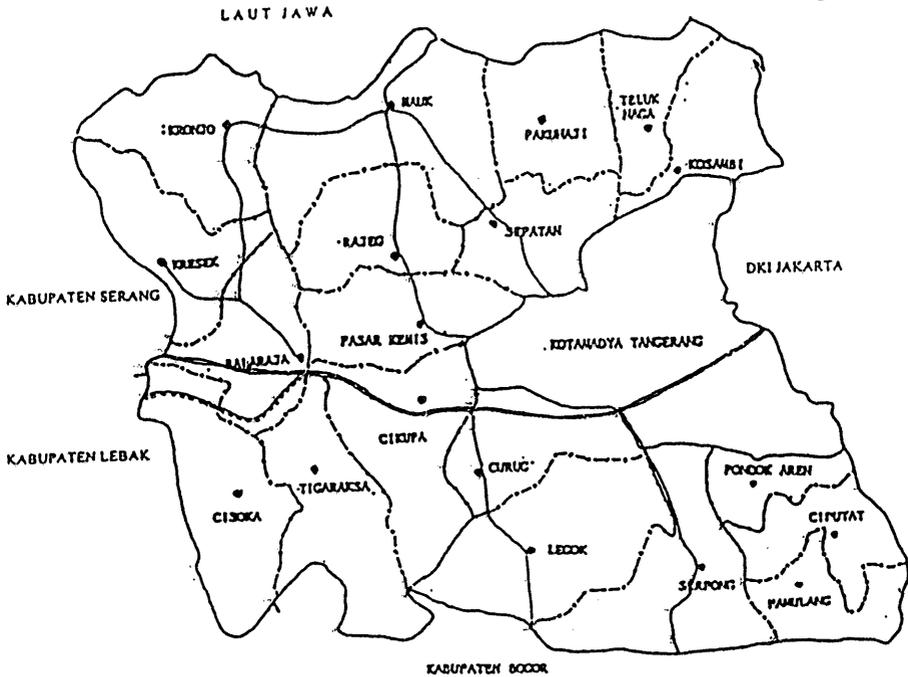
---

<sup>15</sup> Hasil olahan dari wawancara dengan Bambang [63 th], tanggal 2 Desember.

Lampiran 1 :

PETA WILAYAH KABUPATEN TANGERANG

Skala 1 : 280.000



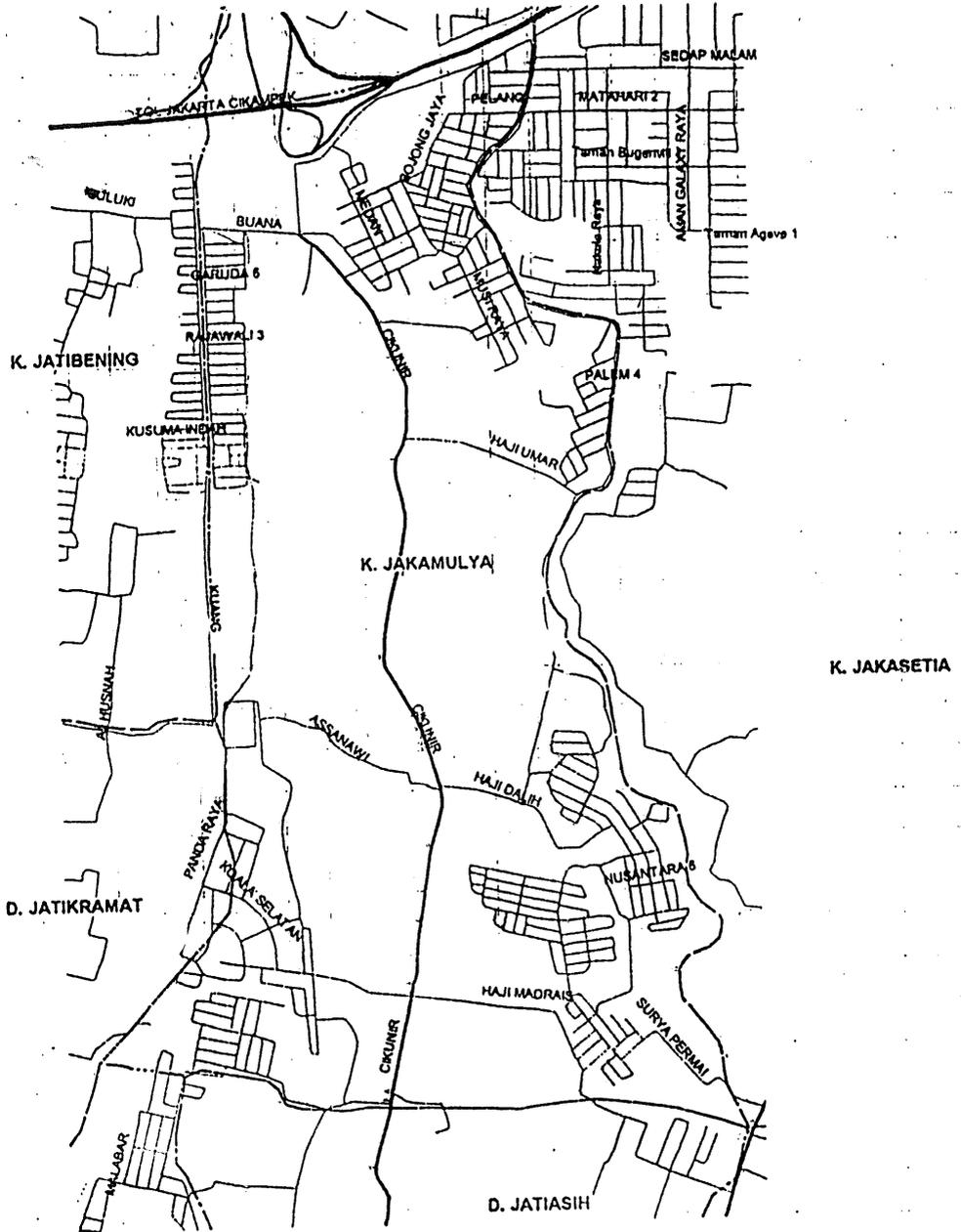
Legenda :

- +--+ Batas Kabupaten
- .- Batas Kecamatan
- Ibukota Kecamatan

- Jalan Tol
- ==== Jalan Negara
- Jalan Kabupaten



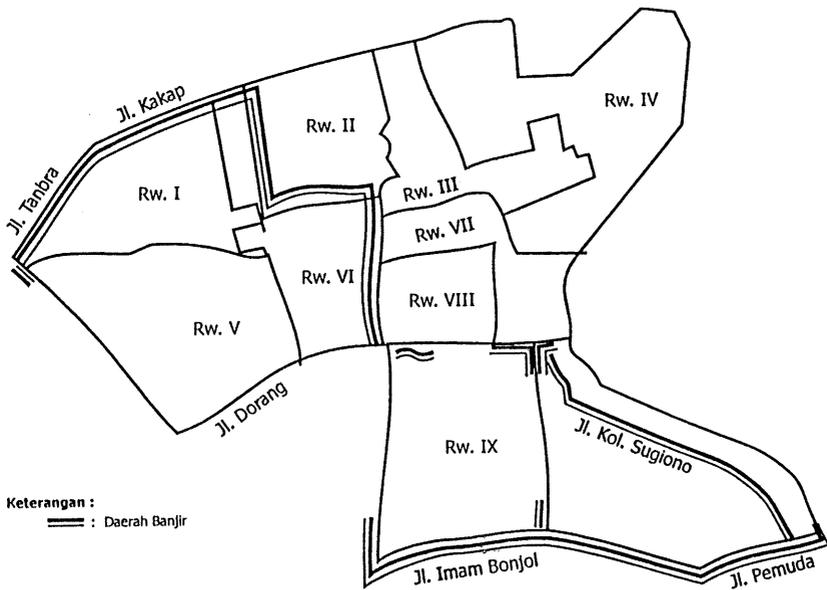
Lampiran 2 : **PETA KECAMATAN BEKASI SELATAN**





Lampiran : 3

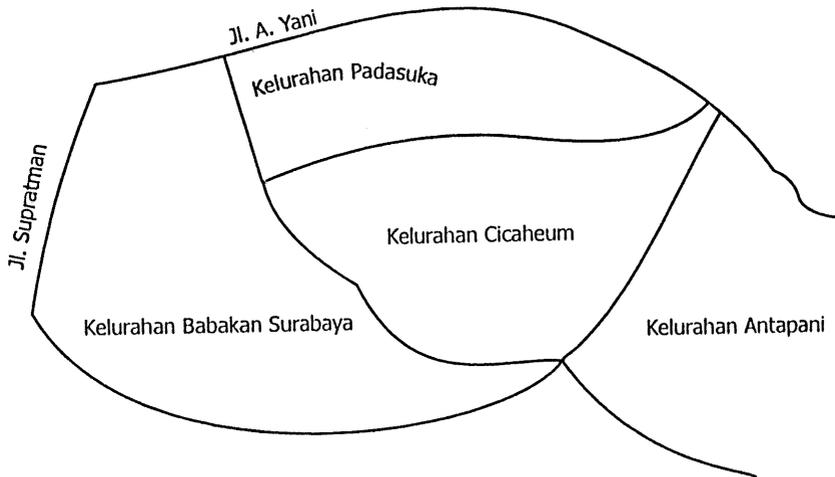
## PETA KELURAHAN DADAPSARI, SEMARANG UTARA





Lampiran : 4

## **PETA KELURAHAN CICAHEUM, KECAMATAN KIARACONDONG BANDUNG**









# KATA PENGANTAR

Konflik dan kerusuhan massal yang merebak di Indonesia sejak 4 tahun terakhir ini telah membuat banyak pihak merasa sangat prihatin. Tidak hanya karena konflik dan kerusuhan tersebut memakan korban jiwa dan harta benda tetapi juga karena konflik dan kerusuhan tersebut mulai makin dirasakan akan membahayakan sendi-sendi negara kesatuan Indonesia, yang telah lama ditegakkan dengan susah payah, dengan cucuran darah dan keringat.

Pada saat yang sama, ada keprihatinan yang mendalam di kalangan ilmuan dan pengamat sosial budaya karena ketidak mampuan mereka memberikan penjelasan atau jawaban yang memuaskan ketika banyak warga masyarakat menoleh ke arah mereka untuk mendapatkan jawaban tentang sebab-sebab peristiwa tersebut. Sebagian dari mereka menyadari bahwa peristiwa-peristiwa tersebut hanya dapat dijelaskan jika ada pengetahuan yang mendalam dan baik tentang masyarakat di mana konflik dan kerusuhan itu terjadi. Sayangnya pengetahuan semacam itulah, yang kini sangat langka. Berbagai perubahan sosial budaya yang berlangsung di depan mata nampaknya tidak pernah diketahui secara mendalam dan teliti sehingga pengetahuan tentang mekanisme dan proses perubahan yang terjadi juga tidak pernah memadai.

Pengetahuan tentang berbagai macam konflik yang terjadi yang diperoleh bukan dari lapangan, tetapi dari majalah, surat kabar, berita televisi dan radio telah mendorong para pengamat memberikan penjelasan, yang seringkali tidak memperjelas permasalahan tetapi malah mengaburkannya. Misalnya dalam penjelasannya adanya dugaan bahwa perbedaan latar belakang etnik dan agama merupakan faktor-faktor yang dianggap telah menyebabkan terjadinya konflik dan kerusuhan.

Dengan penelitian yang dilakukan oleh Tim Penelitian tentang Hubungan Antar Etnik dan Konflik Sosial di Indonesia di daerah sekitar

perkotaan di Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang dan Surabaya nampak bahwa perbedaan latar belakang etnik dan agama pada dasarnya bukan merupakan penyebab konflik. Konflik terjadi sebagai akibat fungsi persaingan dalam penguasaan sumber-sumber daya tertentu yang terbatas sifatnya atau merupakan fungsi dari pembagian kerja yang didasarkan pada spesialisasi dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu menganggap perbedaan etnik sebagai faktor pemicu konflik komunal pada dasarnya mencerminkan ketidak pahaman tentang fenomena etnisitas itu sendiri serta keterkaitannya dengan kondisi dan situasi sosial budaya masyarakatnya.

Meskipun demikian, sumbangan pemikiran dari berbagai kalangan terutama ilmuan masih diharapkan untuk penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Mudah-mudahan buku ini mendapat perhatian khususnya dalam memahami interaksi sosial antar etnik di Indonesia. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berpartisipasi terhadap pelaksanaan penelitian ini.

Jakarta, Desember 2000

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI

Ttd.

**Dr. Riwanto Tirtosudarmo**